BADAN POM

Laporan

Kinerja Interim

TW I 2025

BBPOM di Palembang



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR LAMPIRAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
HIGHLIGHT	x
BAB I . PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	3
1.3 Struktur Organisasi	6
1.4 Isu Strategis	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 Uraian Singkat Rencana Strategi	11
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	13
2.3 Perjanjian Kinerja	14
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	15
2.5 Metode Pengukuran	15
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	18
3.2 Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi	94
3.3 Realisasi Anggaran	108
BAB IV. PENUTUP	164

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2025

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

LAMPIRAN 3 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

LAMPIRAN 4 KERTAS KERJA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

LAMPIRAN 5 PENGUKURAN EFISIENSI KINERJA

LAMPIRAN 6 HISTORY PERUBAHAN LAPORAN

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang (BBPOM di Palembang) dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja Interim BBPOM di Palembang disusun dalam rangka menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dikenal dengan *Good governance* dan *Clean government*. Laporan Kinerja Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dengan penuh kebanggan dan antusiasme, kami mempersembahkan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025 BBPOM di Palembang sebagai wujud tanggung jawab dan akuntabilitas kinerja dan anggaran pada DIPA tahun 2025. Misi kami adalah untuk mendukung Visi Badan POM RI ”*Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045*” dengan merampungkan berbagai program dan kegiatan untuk memberikan kinerja terbaik yang terhimpun dalam pencapaian kinerja 9 (sembilan) sasaran kegiatan yang diukur dengan 25 (dua puluh lima) indikator kinerja.

BBPOM di Palembang telah merealisasikan 99,87% anggaran yang dialokasikan selama triwulan I 2025 untuk mengelola 25 Indikator dan telah berhasil mencapai **Nilai Kinerja Organisasi** sebesar **105,32%** dengan predikat **"Istimewa"**.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Biro Perencanaan dan Keuangan serta Inspektorat Utama Badan POM yang telah melakukan bimbingan dan asesmen secara berkelanjutan dengan rekomendasi yang semuanya telah ditindaklanjuti oleh BBPOM di Palembang. Saya juga memberikan apresiasi yang tinggi bagi seluruh pegawai di lingkungan BBPOM di Palembang dan semua pihak yang telah berkontribusi mengelola 25 Indikator Kinerja untuk mencapai Sasaran Kegiatan yang dicapai dengan predikat Istimewa. Informasi Pencapaian Kinerja telah disajikan dengan lengkap dalam laporan ini dan dapat diandalkan untuk evaluasi bagi pimpinan dan pihak yang berkepentingan. Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan anggaran triwulan I 2025 tidak menyisakan ketidaksesuaian yang perlu dilaporkan. Kami berharap untuk dapat terus menjalankan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang dan melakukan perbaikan berkelanjutan.

Saya, selaku Kepala BBPOM di Palembang, dengan bangga mempersembahkan pencapaian kinerja triwulan I di tahun 2025 dalam laporan ini dan berkomitmen untuk selalu memastikan bahwa Balai Besar POM di Palembang memiliki dukungan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi misinya di tahun 2025 dan selanjutnya.

Palembang, 19 Agustus 2025
Kepala Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan di Palembang,



Yani Ardiyanti, SF, Apt., M.Sc

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025 Balai Besar POM di Palembang merupakan wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran dalam mencapai visi, misi sebagaimana dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang mengacu pada Rancangan Rencana Strategis Balai Besar POM di Palembang Tahun 2025-2029. Laporan ini memuat informasi tentang pengukuran kinerja dan efektivitas pelaksanaan kegiatan selama Triwulan I Tahun 2025 yang mencerminkan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada periode tersebut.

Pada Tahun 2025, BBPOM di Palembang memiliki 23 (dua puluh tiga) program/kegiatan untuk mencapai 9 (sembilan) sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dan diukur dengan 25 (dua puluh lima) indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2025. Nilai Kinerja Organisasi pada triwulan I 2025 tercatat sebesar **105,32%** dengan predikat **Istimewa.** Nilai ini diperoleh dari rata-rata pencapaian 25 indikator kinerja, yang mencakup: 8 indikator yang memiliki capaian kinerja di atas 110% (kategori “tidak dapat disimpulkan”) sehingga dilakukan normalisasi capaian yaitu sebesar 110%; 3 indikator kinerja dengan capaian kinerja di atas 100% (kategori “sangat baik”); 4 indikator memiliki capaian 100% (kategori “baik”) dan 1 indikator yang memiliki capaian di bawah 90% (kategori “cukup)

Sementara itu, 9 indikator lainnya, terdapat 3 indikator yang belum dapat dihitung capaian kinerjanya karena cara dan formula perhitungan indikatornya masih dalam pembahasan bersama Unit Pengampu dan Biro Perencanaan dan Keuangan. Adapun 6 indikator lainnya belum memiliki target pada Triwulan I Tahun 2025 karena target kinerjanya ditetapkan secara tahunan.

Capaian kinerja atas 25 indikator secara rinci, sebagai berikut :

1. Indikator kinerja “Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” dengan capaian 113,49% masuk dalam kategori “tidak dapat disimpulkan” sehingga dilakukan normalisasi menjadi 110% untuk perhitungan NKO.
2. Indikator kinerja “Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO” belum dapat diukur pencapaiannya karena target ditetapkan pada akhir tahun.

3. Indikator kinerja “Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” dengan capaian 117,22% masuk dalam kategori “tidak dapat disimpulkan” sehingga dilakukan normalisasi menjadi 110% untuk perhitungan NKO.
4. Indikator kinerja “Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar” belum dapat diukur pencapaiannya karena belum adanya sampel KLB yang diuji Balai Besar POM di Palembang. Indikator ini tidak mempengaruhi penilaian kinerja organisasi pada triwulan ini.
5. Indikator kinerja “Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” dengan capaian 83,01% masuk dalam kategori “cukup”.
6. Indikator kinerja “Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder” dengan capaian 126,55% masuk dalam kategori “tidak dapat disimpulkan” sehingga dilakukan normalisasi menjadi 110% untuk perhitungan NKO.
7. Indikator kinerja “Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” dengan capaian 111,11% masuk dalam kategori “tidak dapat disimpulkan” sehingga dilakukan normalisasi menjadi 110% untuk perhitungan NKO.
8. Indikator kinerja “Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” belum dapat diukur pencapaiannya karena cara dan formula perhitunga masih dalam pembahasan Unit Pengampu dan Biro Perencanaan dan Keuangan. Indikator ini tidak mempengaruhi penilaian kinerja organisasi pada triwulan ini.
9. Indikator kinerja “Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” belum dapat diukur pencapaiannya karena cara dan formula perhitunga masih dalam pembahasan Unit Pengampu dan Biro Perencanaan dan Keuangan. Indikator ini tidak mempengaruhi penilaian kinerja organisasi pada triwulan ini.
10. Indikator kinerja “Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” dengan capaian 125% masuk dalam kategori “tidak dapat disimpulkan” sehingga dilakukan normalisasi menjadi 110% untuk perhitungan NKO.
11. Indikator kinerja “Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan” dengan capaian 123,77% masuk dalam kategori “tidak dapat disimpulkan” sehingga dilakukan normalisasi menjadi 110% untuk perhitungan NKO.

12. Indikator kinerja “Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” dengan capaian 100% masuk dalam kategori “baik”.
13. Indikator kinerja “Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL” dengan capaian 109,52% masuk dalam kategori “sangat baik”.
14. Indikator kinerja “Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang” dengan capaian 108,50% masuk dalam kategori “sangat baik”.
15. Indikator kinerja “Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan” dengan capaian 100% masuk dalam kategori “baik”.
16. Indikator kinerja “Jumlah desa pangan aman” dengan capaian 100% masuk dalam kategori “baik”.
17. Indikator kinerja “Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas” dengan capaian 100% masuk dalam kategori “baik”.
18. Indikator kinerja “Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan” dengan capaian 118,53% masuk dalam kategori “tidak dapat disimpulkan” sehingga dilakukan normalisasi menjadi 110% untuk perhitungan NKO.
19. Indikator kinerja “Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai Besar POM di Palembang” dengan capaian 104,16% masuk dalam kategori “sangat baik”.
20. Indikator kinerja “Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar” dengan capaian 416,67% masuk dalam kategori “tidak dapat disimpulkan” sehingga dilakukan normalisasi menjadi 110% untuk perhitungan NKO.
21. Indikator kinerja “Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palembang” belum dapat diukur pencapaiannya karena target ditetapkan pada akhir tahun.
22. Indikator kinerja “Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Palembang” belum dapat diukur pencapaiannya karena target ditetapkan pada akhir tahun.
23. Indikator kinerja “Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang” belum dapat diukur pencapaiannya karena target ditetapkan pada akhir tahun.
24. Indikator kinerja “Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Palembang” belum dapat diukur pencapaiannya karena target ditetapkan pada akhir tahun.
25. Indikator kinerja “Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Palembang” belum dapat diukur pencapaiannya karena target ditetapkan pada akhir tahun.

Untuk mendukung Pencapaian 25 indikator kinerja tersebut, Balai Besar POM di Palembang memperoleh alokasi anggaran selama triwulan I sebesar Rp3.443.751.978. Realisasi anggaran pada triwulan I adalah Rp 3.439.312.265 atau 99,87% dari alokasi anggaran. Dengan memanfaatkan anggaran yang ada, dan membandingkan dengan pencapaian tiap indikator kinerja maka diperoleh Tingkat Efisiensi (TE) penggunaan sumber daya (anggaran) antara 0 hingga 3,17. Dalam pengelolaan anggaran telah dilakukan perbaikan yaitu kualitas perencanaan yang detail dan *applicable* dalam penyusunan PoA, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan anggaran secara berkala, perkuatan *supporting* data dari tim pengelola keuangan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut.

Sebagai bentuk usaha peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan baik internal maupun eksternal, Balai Besar POM di Palembang mendorong adanya terobosan dan inovasi. Inovasi dan terobosan untuk meningkatkan pelayanan publik diantaranya AmPEra (Amankan Pangan Edukasi Masyarakat) sebagai wadah untuk menyediakan layanan pusat informasi di lingkungan pasar, PEMPPEK (Pendampingan dalam Pemenuhan Persyaratan Perizinan Produk sebagai program agar pelaku usaha UMKM Pangan mendapatkan pendampingan dalam pemenuhan persyaratan perizinan produk .

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025 Balai Besar POM di Palembang diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif atas capaian kinerja organisasi sebagai hasil dari dedikasi dan upaya terbaik seluruh pegawai. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai aspek yang perlu disempurnakan dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan secara berkelanjutan guna mengoptimalkan peran kelembagaan, meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas kinerja seluruh pegawai dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

Selama pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I Tahun 2025, Balai Besar POM di Palembang menghadapi sejumlah tantangan, antara lain dinamika kebijakan anggaran yang cukup signifikan, sinergi lintas fungsi dan lintas sektor yang masih perlu diperkuat, serta keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap aspek keamanan produk yang beredar di pasar. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keamanan obat dan makanan berpotensi meningkatkan risiko konsumsi produk yang tidak memenuhi standar dan membahayakan kesehatan masyarakat.

Menyikapi hal tersebut, Balai Besar POM di Palembang perlu lebih *agile* dalam menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan kebijakan anggaran baik di tingkat nasional

maupun internal kelembagaan. Selain itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia menjadi hal yang esensial guna menghadapi perkembangan teknologi yang terus berkembang. Di sisi lain, upaya peningkatan efektivitas kegiatan edukasi dan sosialisasi juga perlu terus ditingkatkan untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas, serta menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya pengawasan terhadap produk yang dikonsumsi.

Berbagai upaya tersebut dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, pemangku kepentingan lintas sektor, serta pelaku usaha, sebagai bagian dari sinergi dalam pengawasan obat dan makanan di wilayah Sumatera Selatan. Kami akan terus mendorong semangat kolaboratif dalam rangka perbaikan berkelanjutan demi kemajuan Balai Besar POM di Palembang dan perlindungan kesehatan masyarakat. Penyusunan laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan capaian kinerja Balai Besar POM di Palembang ke depan. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian visi dan misi organisasi secara lebih optimal.

Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak lintas sektor yang telah menjalin kerja sama dengan Balai Besar POM di Palembang, serta kepada masyarakat yang telah berpartisipasi aktif melalui berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan. Semoga sinergi ini dapat terus diperkuat dan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan semakin merasakan kehadiran serta manfaat dari peran Balai Besar POM di Palembang. Kami juga berharap laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang konstruktif guna peningkatan kinerja, baik secara internal maupun eksternal.

HIGHLIGHT
TRIWULAN I TAHUN 2025



Peringkat I Kategori Satuan Kerja Sedang Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W

Pada tanggal 24 Januari 2025, Balai Besar POM di Palembang menerima penghargaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan sebagai Peringkat I Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W kategori Satuan Kerja Sedang dengan nilai akhir 95,28.

Peringkat I Penilaian Pengguna Digipay Terbaik

Pada tanggal 5 Maret 2025, Balai Besar POM di Palembang mendapat penghargaan dari KPPN Palembang sebagai peringkat I pada penilaian pengguna digipay terbaik periode semester II tahun 2024 kategori UP KKP Besar.





Audiensi Bersama Kwarda Sumsel

Pada tanggal 15 Januari 2025, BPOM di Palembang melakukan audiensi dengan Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Sumatera Selatan. Dengan kegiatan audiensi ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dengan kwarda Sumsel Gerakan Pramuka Sumatera Selatan sehingga mampu berkolaborasi Bersama mewujudkan Saka POM di Balai Besar POM di Palembang.

HUT Ke-24 BPOM, Balai Besar POM di Palembang Turut Memeriahkan dengan Hadir di area *Car Free Day* Kambang Iwak

Dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Palembang melakukan layanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan mobil laboratorium keliling dengan tema "Cek Produkmu Bersama BPOM". Kegiatan layanan dilakukan di acara Car Free Day (CFD) Kambang Iwak Palembang pada hari Minggu 19 Januari 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya keamanan dan mutu sediaan farmasi dan pangan olahan.







Audiensi dengan Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi (STIFI) Bakti Pertiwi dan UIN Raden Fatah Palembang

BBPOM di Palembang melakukan audiensi bersama STIFI Bakti Pertiwi dan UIN Raden Fatah Palembang pada 17 dan 20 Januari 2025. Kolaborasi ini diharapkan menjadi salah satu alternatif menciptakan generasi muda yang mampu mengelola isu keamanan pangan dan membantu menciptakan konsumen cerdas sadar pangan aman.

Balai Besar POM di Palembang Sambut Kunjungan Edukasi

Pada Triwulan I Tahun 2025, Balai Besar POM di Palembang telah menerima beberapa kunjungan edukasi dengan tujuan menciptakan generasi sadar panga naman. Sejumlah pihak seperti SMP Alifah Islamic School, Sekolah islam Terpadu Fathona Lemabang, TK SD Al Faruq dan STIKES Abdurrahman. Rangkaian kegiatan dari kunjungan edukasi ini selain pemberian materi mengenai keamanan obat dan makanan, juga dilakukan pemberian informasi menggunakan aplikasi BPOM Mobile sekaligus cara menjadi konsumen cerdas dengan selalu menerapkan CEK KLIK (Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar dan Cek Kedaluwarsa), serta dilakukan pula tour edukatif ke laboratorium yang ada di BBPOM di Palembang. Kunjungan edukasi ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi BBPOM di Palembang dengan akademisi dalam mencetak generasi yang sadar pangan aman, cerdas dalam memilih dan mengkonsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045.







BBPOM di Palembang Buka Stand Dalam Acara ASITA Business and Travel Fair " Bisnis Pariwisata di Palembang"

BBPOM di Palembang turut serta berkontribusi dengan membuka stan di Atrium Palembang Icon tanggal 11-12 Februari 2025. Pemberian informasi mengenai keamanan produk, pengujian bahan berbahaya pada pangan secara gratis, penyebaran informasi mengenai Cek KLIK dan Mobile BPOM, selanjutnya BBPOM di Palembang didapuk sebagai *speaker* dengan mengangkat tema "pangan yang baik untuk UMKM". Turut bepartisipasinya BPOM dalam rangkaian acara ini diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam mencerdaskan

Advokasi Dengan Lintas Sektor Palembang



Balai Besar POM di Palembang melakukan advokasi dengan lintas sektor di Kota Palembang. BBPOM di Palembang telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Palembang, Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya serta Bagian Tata Pemerintahan Kota Palembang. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas pelaksanaan program keamanan pangan terpadu yaitu desa/kelurahan pangan aman, keamanan pangan jajanan anak usia sekolah dan pasar pangan aman berbasis komunitas. Ketiga Program ini merupakan Program Prioritas Nasional (Pro-PN) Keamanan Pangan yang bertujuan memberdayakan masyarakat terutama agar dapat berdaya dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan di komunitas pasar, sekolah, dan desa/kelurahan.





BBPOM di Palembang Hadir Menjaga Eksistensi dalam Penjaminan Keamanan Takjil

Sebagai bentuk komitmen dalam menjamin kesehatan masyarakat dari pangan yang mengandung bahan kimia berbahaya, Balai Besar POM di Palembang kembali melakukan pengawasan jajanan takjil di beberapa titik stategis di wilayah Sumatera Selatan. Pemberian informasi selama pengawasan juga dilakukan agar masyarakat terpapar cara memilih jajanan takjil yang baik sehingga kesehatan keluarga terjamin.

Cerdaskan Masyarakat Desa dalam Memilih Obat dan Makanan Aman, BBPOM di Palembang Laksanakan KIE.







Bersama Anggota Komisi IX DPR RI, Sri Meliyana, BBPOM di Palembang melakukan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sedian farmasi dan pangan olahan yang aman di berbagai titik Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. Dengan dilaksanakannya kegiatan KIE ini, diharapkan dapat menciptakan konsumen yang cerdas sehingga masyarakat mampu mandiri dan berdaya dalam menjaga keamanan obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat serta selalu menerapkan CEK KLIK (Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin edar dan Cek Kedaluwarsa) dalam memilih produk Obat dan Makanan.





Penandatanganan MOU dan MOA BBPOM di Palembang dengan UIN Raden Fatah Palembang

Balai Besar POM di Palembang melakukan penandatanganan nota kesepahaman serta perjanjian Kerjasama antara Balai Besar POM di Palembang dengan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Kerjasama dengan UIN Raden Fatah diharapkan dapat mendukung fungsi BADAN POM dalam pemberdayaan masyarakat untuk membangun kesadaran, kompetensi, dan kapasitas pengujian laboratorium serta aktivitas lainnya. Program-program yang telah dicanangkan dan rencana aksi yang telah tertuang dalam perjanjian akan dilaksanakan berkala dan dimonitoring serta dievaluasi.

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI nomor 80 tahun 2017 Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Sebagai upaya untuk meningkatkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan, Pemerintah pada tanggal 10 Maret 2017 telah mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Dalam Instruksi Presiden ini dijelaskan Instruksi Presiden kepada 11 (sebelas) Kementerian/ Lembaga termasuk pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya masing- masing. Adanya Instruksi Presiden yang baru ini tentu memperkuat posisi strategis BPOM sebagai perisai utama dalam mengawal sistem Pengawasan Obat dan Makanan.

Berdasarkan arah kebijakan dalam RPJMN 2025-2029 untuk bidang kesehatan, terdapat beberapa strategi nasional yang relevan dengan peran BPOM, yaitu:

1. Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM (Penyakit Tidak Menular)
2. Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan Sediaan Farmasi
3. Penguatan tata kelola, data, informasi dan inovasi teknologi kesehatan

Kesemua strategi nasional ini mencerminkan fokus BPOM dalam mendukung infrastruktur kesehatan publik yang tangguh, dengan mengintegrasikan kegiatan pengawasan ke dalam sistem kesehatan nasional secara lebih luas untuk mendukung kesehatan masyarakat.

Sebagai bagian dari subsistem pembangunan nasional, Rencana Strategis BPOM Tahun 2025–2029 dirancang selaras dengan RPJMN dan berfokus pada penguatan pengawasan serta peningkatan keamanan produk di bidang obat dan makanan. Arah kebijakan strategis BPOM antara lain mencakup:

1. Penguatan pengawasan *pre-post market* dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, serta perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*;
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM;
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; dan
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Dalam menjalankan peran tersebut, Balai Besar POM di Palembang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM melaksanakan fungsi sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT pada BPOM, yang mencakup:

a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;

i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Dengan kompleksitas fungsi tersebut, Balai Besar POM di Palembang berkewajiban untuk melaksanakan pengawalan serta menyampaikan informasi kinerja secara transparan dan akuntabel. Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025 ini disusun sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk memberikan gambaran kepada para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat di wilayah Sumatera Selatan, atas capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam kerangka Rencana Strategis BPOM Tahun 2025–2029.

1.2 Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut UPT BPOM adalah organisasi yang bersifat mandiri yang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada 13 Januari 2025 telah ditetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Perubahan ini dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan efektivitas dan kualitas layanan pengawasan obat dan makanan, sehingga perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Balai Besar POM di Palembang,

berdasarkan Lampiran IV Peraturan tersebut memiliki wilayah kerja terdiri dari 11 (sebelas) Kabupaten/Kota.



Gambar 1.1. Catchment Area BBPOM di Palembang

Wilayah kerja tersebut terdiri dari 173 (seratus tujuh puluh tiga) kecamatan, dengan penyebaran sebagai berikut:

Tabel 1.1. Kecamatan di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang

I. KOTA		Ibukota	Jumlah Kecamatan
1.	Palembang	Palembang	18
2.	Prabumulih	Prabumulih	6
II. KABUPATEN		**Ibukota**	**Jumlah Kecamatan**
1.	Ogan Ilir	Indralaya	16
2.	Ogan Komering Ilir	Kayu Agung	18
3.	Ogan Komering Ulu	Baturaja	13
4.	OKU Selatan	Muara Dua	19
5.	OKU Timur	Martapura	20
6.	Muara Enim	Muara Enim	22
7.	Musi Banyu Asin	Sekayu	15
8.	Banyu Asin	Pangkalan Balai	21
9.	Penukal Abab Pematang Ilir	Talang Ubi	5

(sumber data: Keputusan Kepala BPS No. 646 Tahun 2024 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik tanggal 24 September 2024)

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM terdiri atas:

a. Kepala;
b. Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha

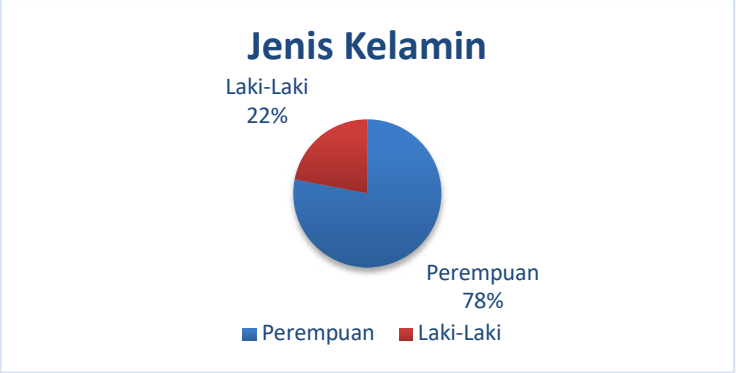
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu. Bagian Tata Usaha terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
d. pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
e. pelaksanan urusan pengelolaan kepegawaian;
f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

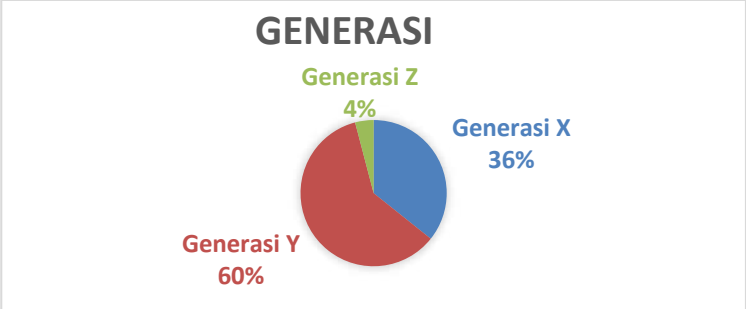
Di Lingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

Dalam mendukung tugas-tugas Balai Besar POM di Palembang sesuai peran dan fungsinya, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan potensi yang sesuai. Saat ini, jumlah PNS di BBPOM di Palembang berjumlah 74 orang dan PPPK 8 orang. Berdasarkan gender terbagi atas 64 orang Perempuan, dan 18 orang laki-laki.



Gambar 1.2. Proporsi SDM Berdasarkan Gender

Sedangkan jika dipetakan melalui generasinya, maka terdapat 3 generasi yaitu 29 orang generasi X, 49 orang generasi milenial dan 4 orang generasi Z.



Gambar 1.3. Proporsi SDM Berdasarkan Generasi

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Palembang sebagai salah satu UPT BPOM RI, SDM yang dimiliki ini telah ditempatkan sesuai dengan keahlian dan potensi yang dimiliki.

1.3 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Palembang



Gambar 1.1. Struktur Organisasi BBPOM di Palembang

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Balai Besar POM di Palembang telah melaksanakan sistem kerja berdasarkan PerMenPAN RB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan PerMenPAN RB nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Berdasarkan hal tersebut, maka hanya ada 2 pejabat yaitu pejabat pimpinan tinggi pratama (Kepala Balai Besar POM di Palembang) dan pejabat administrator (Kepala Bagian Tata Usaha). Untuk pembagian kerja dari Kepala UPT, maka dibentuk ketua tim dan anggota tim yang merupakan pejabat fungsional. Terdapat 24 (dua puluh empat) orang ketua tim kerja di Balai Besar POM di Palembang yang mengawal pencapaian 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan bertanggungjawab langsung kepada kepala UPT.

1.4 Isu Strategis

Balai Besar POM di Palembang mempunyai posisi yang strategis berkaitan dengan tugas utama pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut, sebagai UPT BPOM perlu menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat/konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dengan kepentingan strategis lainnya yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Identifikasi potensi dan permasalahan Balai Besar POM di Palembang dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2025-2029.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kegiatan Balai Besar POM di Palembang perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.
Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Pertumbuhan E-commerce dan Kejahatan Siber di Bidang Obat dan Makanan**

Perkembangan teknologi dan adanya revolusi sosial (*society 5.0*) yang terjadi hari ini

secara tidak langsung mengubah perilaku masyarakat selaku konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan, termasuk berubahnya pola jual-beli produk sediaan farmasi dan pangan olahan. Perubahan ini telah nyata terjadi di masyarakat yang dengan mudah menjangkau dan mengakses informasi mengenai kebutuhan obat dan makanannya sehari-hari hanya lewat sentuhan jari dari ponselnya kapan pun dan dimanapun mereka berada tanpa harus bepergian. Tanpa kita sadari, setiap *platform e-commerce* berlomba- lomba untuk bertumbuh guna menghadirkan peningkatan kemudahan dan kecepatan bagi konsumennya hari demi hari. Namun, pertumbuhan ini sering kali membawa risiko yang signifikan, seperti adanya potensi kejahatan siber terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan. Kejahatan ini mencakup penjualan produk palsu, kedaluwarsa, atau yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang telah ditetapkan oleh BPOM. Beberapa platform seringkali kurang dimanfaatkan dengan bijak dan dijadikan sebagai celah untuk memperjualbelikan produk sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Penertiban peredaran produk sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal yang dipasarkan secara online menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM. Pengawasan yang dilakukan pun tidak hanya dilakukan terhadap produk-produk lokal, tetapi juga harus dilakukan terhadap produk-produk impor yang masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini menjadi isu yang penting karena proses identifikasi terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal harus dilakukan dengan tepat dan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan tersebut juga harus diperkuat. Jika tidak ditangani dengan benar, maka bukan tidak mungkin bahwa risiko kesehatan masyarakat akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya kemudahan akses bagi konsumen untuk memperoleh produk-produk tersebut melalui *e- commerce*.

Balai Besar POM di Palembang melakukan sampling produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dijual secara online sebagai upaya perlindungan masyarakat dari peredaran produk yang tidak aman serta secara aktif melakukan kegiatan intelijen dan operasi intelijen pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan baik secara *offline* maupun *online* dengan mekanisme patroli siber.

2. **Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan Daya Saing Industri/Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam Negeri**

Pasar produk sediaan farmasi dan pangan olahan dalam negeri yang tengah berkembang mempresentasikan sebuah peluang untuk memperluas dan mengintensifkan fungsi pengawasan BPOM. Khususnya untuk BBPOM di Palembang untuk industri pangan olahan merupakan industri yang cukup berkembang dengan pesat, dari tahun 2020 Sarana produksi pangan yang diawasi di wilayah Sumatera Selatan sejumlah 56 sarana, dan 1.582 PIRT. Hingga 2024 ini tercatat sarana yang berada di wilayah Sumatera Selatan sejulah 126 sarana produksi pangan dan 4.120 sarana PIRT.

Di tengah pertumbuhan pasar ini, BPOM berada di posisi yang strategis untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan. Situasi ini tidak hanya menguntungkan konsumen dengan menjamin akses ke produk yang aman dan berkualitas, tetapi juga memberi produsen dalam negeri kepastian bahwa mereka beroperasi dalam pasar yang kompetitif dan adil.

Balai Besar POM di Palembang melakukan pendampingan UMKM untuk membantu pelaku usaha kecil agar produk yang ditawarkan terjamin aman, bermutu dan memenuhi standar yang ditetapkan untuk bisa dipasarkan lebih luar, termasuk ekspor. Edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang dilakukan dengan memberikan pelatihan tentang keamanan produk, sekaligus sosialisasi tentang pentingnya izin edar BPOM. Balai Besar POM di Palembang juga memberikan pendampingan sertifikasi agar membantu UMKM melewati semua proses perizinan BPOM. Pada akhirnya, upaya ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta dapat meningkatkan status Indonesia sebagai eksportir produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang terpercaya.

3. **Optimalisasi Kolaborasi dengan *Stakeholders***

Penguatan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti industri farmasi dan makanan, institusi akademik, dan organisasi profesi, menyediakan akses yang lebih luas ke sumber daya yang beragam serta berbagai inovasi terkini. Hubungan kerja sama yang optimal memungkinkan pertukaran informasi dan praktik terbaik, yang secara langsung dapat meningkatkan kemampuan Balai Besar POM di Palembang dalam memahami dan mengimplementasikan standar industri global serta tren terkini. Kemitraan dengan universitas dapat memfasilitasi penelitian bersama yang menghasilkan wawasan baru tentang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Kolaborasi ini memungkinkan Balai Besar POM di Palembang untuk menerapkan praktik terbaik dan meningkatkan standar pengawasan.

4. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Sumatera Selatan

Dalam konteks peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan Balai Besar POM di Palembang memiliki peluang strategis untuk memperkuat hubungan dan kerjasama dengan masyarakat Sumatera Selatan. Edukasi publik merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko kesehatan yang disebabkan oleh konsumsi pangan dan obat-obatan yang tidak aman. Pemanfaatan berbagai platform komunikasi, seperti media sosial, seminar, workshop, dan kampanye publik dapat menyebarkan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya keamanan pangan dan obat-obatan tetapi juga memotivasi mereka untuk aktif berpartisipasi dalam upaya pengawasan produk yang beredar di masyarakat.

Berdasarkan capaian indeks efektivitas KIE tahun 2019-2024 terlihat bahwa terjadi peningkatan untuk setiap komponen indikatornya. Indikator yang paling tinggi kontribusinya adalah indikator “manfaat” yang artinya peserta KIE dapat menerima manfaat dari KIE yang diberikan oleh BBPOM di Palembang. Sedangkan, indikator yang memiliki indeks terendah adalah “minat” yang artinya perlu ditingkatkan lagi upaya untuk meningkatkan minat masyarakat melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan KIE baik dari konsep kegiatan, materi/konten, narasumber, media yang dipilih dan lain-lain.

Dari sisi implikasi strategis, upaya peningkatan kesadaran ini dapat berujung pada peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi dan standar keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan, yang pada gilirannya meminimalisir risiko kesehatan publik. Lebih lanjut, penguatan kerjasama dan kepercayaan antara Balai Besar POM di Palembang dan masyarakat Sumatera Selatan dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun sistem pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang lebih efektif dan responsif. Dengan masyarakat yang lebih terinformasi dan terlibat aktif, potensi untuk mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran akan lebih tinggi, memungkinkan BBPOM di Palembang untuk bertindak cepat dalam menangani isu keamanan. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan tetapi juga memperkuat citra Balai Besar POM di Palembang sebagai lembaga pengawas yang kompeten dan terpercaya di mata publik.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025– 2029

Penyusunan Rancangan Renstra Balai Besar POM di Palembang tahun 2025-2029 telah mengacu pada Rancangan Renstra BPOM tahun 2025-2029 yaitu terkait dengan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai/Balai Besar POM. Sasaran kegiatan BBPOM di Palembang disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM. Penetapan Visi dan Misi yang dimaksud sebagai berikut :

VISI

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

MISI

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025-2029 adalah:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM.
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang.
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang.

SASARAN KEGIATAN:

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh Balai Besar POM di Palembang. Sasaran kegiatan dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan BBPOM di Palembang, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, yang mencakup berbagai aspek kunci dari pengawasan hingga edukasi publik, dalam upaya mencapai keamanan, kualitas, dan kemandirian di sektor obat dan makanan. Berikut adalah sasaran kegiatan serta indikator kinerja Balai Besar POM di Palembang Tahun 2025 – 2029 :

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Palembang

Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
		3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
		7	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja
		8	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		9	Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		10	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL
4	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
		16	Jumlah desa pangan aman
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai Besar POM di Palembang
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Palembang	20	Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar
8	Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palembang
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah di lingkup Balai Besar POM di Palembang yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Palembang
		23	Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang
		24	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Palembang
		25	Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Palembang

2.1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025

Balai Besar POM di Palembang telah menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan tahun 2025. RKT ini disusun untuk mengukur dan memperkirakan pada n-1 sebelum menyusun Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja . Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja tahun 2025 yang

akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pengajuan usulan kegiatan dan anggaran Balai Besar POM di Palembang T.A 2025. Rencana Kinerja Tahun 2025 disahkan melalui Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Nomor HK.02.02.5A.09.24.229 Tahun 2024 yang disahkan pada tanggal 20 September 2024. Dokumen tersebut memuat 11 (sebelas) sasaran kegiatan dengan 25 (dua puluh lima) indikator kinerja kegiatan. Namun, dokumen RKT 2025 ini belum sesuai dengan Rancangan Renstra Balai Besar POM di Palembang 2025-2029 karena pada n-1 Rancangan Renstra tersebut masih dalam proses penyusunan. Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Palembang Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh dapat dilihat pada Lampiran 1 pada Laporan Kinerja ini.

2.3. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian kinerja Balai Besar POM di Palembang disusun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dengan mempertimbangkan baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun anggaran. Perjanjian Kinerja terdiri dari format yang menghubungkan sasaran kegiatan, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran. Tanggal 12 Februari 2025 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Palembang Tahun 2025. Pada dokumen tersebut memuat 9 (sembilan) sasaran kegiatan dengan 25 (dua lima) indikator kinerja kegiatan beserta anggaran. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Palembang tahun 2025 yang sudah ditandatangani dapat dilihat pada Lampiran 2 pada Laporan Kinerja Interim ini.

Dalam menerima amanah dari pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang telah diperjanjikan, Balai Besar POM di Palembang menerima anggaran sebesar Rp29.934.726.000 yang ditetapkan dalam DIPA Balai Besar POM di Palembang SP DIPA-063.01.2.432841/2025 Tanggal 02 Desember 2024. Selama triwulan I Tahun 2025 telah dilakukan 2 (dua) kali. Pada Revisi DIPA 1 tanggal 22 Februari 2025 diperlukan sebagai tindak lanjut Surat No. B-PR.05.03.2.02.25.82 Tanggal 4 Februari 2025 dari Sekretaris Utama perihal Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025. Namun, revisi tersebut tidak menambah atau mengurangi pagu DIPA namun kebijakan efisiensi dilakukan dengan

pemblokiran anggaran sebesar Rp18.600.103.000 sehingga anggaran yang dapat digunakan adalah Rp11.334.623.000 atau sebesar 37,86% dari pagu total. Sedangkan, pada revisi DIPA 2 tanggal 21 Maret 2025 terdapat pengurangan pagu DIPA menjadi Rp29.738.436.000 dengan pertimbangan realokasi pengurangan anggaran untuk PPNPN sebesar Rpp196.290.000 sebagai tindaklanjut atas Surat Sekretaris Utama No. B-PR.05.03.2.03.25.145 tanggal 10 Maret 2025.

2.4.Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2025

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Palembang disajikan dalam bentuk tabel dengan target per bulan. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Palembang Tahun 2025 mengalami perubahan sebanyak 1 (satu) kali sesuai dengan Surat Permohonan Revisi RAPK Tahun 2025 No. B-PR.07.02.5A.04.25.411 tanggal 15 April 2025 yang diajukan Balai Besar POM di Palembang. Perubahan ini diperlukan sehubungan dengan terselenggaranya sosialisasi pengisian RHPK Tahun 2025 pada Kamis dan Jumat, 10-11 April 2025 yang menghasilkan beberapa kesepakatan diantaranya berupa perubahan Manual IKU beberapa Indikator Kinerja, sehingga perlu dilakukan penyesuaian target atas 12 (dua belas) indikator kinerja sesuai dengan formula pengukuran pada Manual IKU terbaru. Permohonan tersebut telah disepakati berdasarkan Surat Tanggapan atas Usulan Perubahan Target Bulanan RAPK Balai Besar POM di Palembang Tahun 2025 No. B-PR.07.21.04.25.87 tanggal 16 April 2025 dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM. RAPK Perubahan Pertama yang telah ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Palembang dapat dilihat pada Lampiran 3 pada Laporan Kinerja ini.

2.5 Metode Pengukuran

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Selain itu pengukuran kinerja berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan POM No. NOMOR: PR.09.01.2.03.25.10 TAHUN 2025 Tanggal 11 Maret 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, terdapat beberapa penetapan capaian kinerja, antara lain :

2.5.a. Capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. Untuk perhitungan realisasi kinerja Triwulan I sesuai dengan formula perhitungan pada Manual IKU akan dijelaskan pada subbab 3.1.1 Pencapaian Sasaran Kegiatan.

Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

Gambar 2.1. Kategori Capaian Indikator Kinerja

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja Balai Besar POM di Palembang, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

1. Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan
2. Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan normalisasi.

2.5.b. Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

a. NKO Periodik

NKP periodik merupakan nilai kinerja Balai Besar POM di Palembang secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut.

b. NKO tahunan

NKO tahunan merupakan nilai kinerja Balai Besar POM di Palembang pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

1. Capaian Perjanjian Kinerja

Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja Balai Besar POM di Palembang setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

2. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Balai Besar POM di Palembang diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah.

Berikut adalah matriks perhitungan NKO Tahunan :

Tabel 2.2 Matriks Perhitungan NKO

No	Sasaran	Indiktor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) {(1)x(100%-(2))x100)
	Total Capaian PK (4)							
	Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5)							
	Predikat NKO (6)							

Keterangan:

(1) Normalisasi Capaian PK mengacu pada poin 2. Capaian Indikator Kinerja

(2) Koreksi Normalisasi Capaian PK, merupakan hasil normalisasi capaikan PK dikoreksi dengan memperhatikan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) yang bersumber dari hasil evaluasi sebagaimana gambar berikut.



Gambar 2.2 Predikat AKIP

Predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menjadi faktor koreksi besaran capaian perjanjian kinerja yang disampaikan melalui laporan kinerja. Semakin tinggi predikat

akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa manajemen kinerja organisasi semakin baik, sehingga semakin tinggi pula capaian perjanjian kinerja yang diakui. Sebaliknya, semakin rendah predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah semakin rendah pula capaian perjanjian kinerja yang diakui sebagaimana yang tertera pada tabel berikut.

Tabel 2.3. Koreksi Normalisasi Capaian PK

Predikat AKIP	Koreksi Capaian PK setelah Normalisasi
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	

Berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 oleh Inspektorat Utama, Balai Besar POM di Palembang memiliki Predikat AKIP “A” atau “Memuaskan” dengan nilai 80,55 sehingga tidak akan terdampak koreksi normalisasi pada capaian kinerja.

2.5.c. Predikat NKO

Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa, dengan rincian sebagai berikut :

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	> 100%	
Baik	80% < x ≤ 100%	
Butuh Perbaikan	60% < x ≤ 80%	
Kurang	20% < x ≤ 60%	
Sangat Kurang	0% ≤ x ≤ 20%	

Gambar 2.3 Predikat NKO

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Balai Besar POM di Palembang pada Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada periode yang sama. Proses pengukuran dilakukan secara berjenjang dan sistematis, dimulai dari pendokumentasian data mentah secara tertib, perhitungan realisasi indikator kinerja, hingga tahap validasi data.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Triwulan I Tahun 2025 merupakan hasil penghitungan terhadap total capaian indikator kinerja yang telah dinormalisasi, dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian pada periode tersebut. Berdasarkan mekanisme tersebut, terdapat 6 indikator kinerja yang tidak memiliki capaian pada Triwulan I karena tidak memiliki target kinerja sehingga tidak dapat dihitung pencapaiannya.

Selain itu, dari 19 indikator kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, terdapat tiga indikator yang dikecualikan dari perhitungan NKO Triwulan I. Pengecualian ini merujuk pada Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM Nomor PR.04.02.21.04.25.124 tanggal 28 April 2025, perihal *Pemberitahuan Indikator yang Dikecualikan dari Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)*. Ketiga indikator tersebut masih dalam proses pembahasan manual IKU dan kertas kerja capaian bersama unit pusat hingga batas akhir pelaporan Triwulan I pada tanggal 16 April 2025. Adapun ketiga indikator tersebut adalah:

1. Persentase sampel Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan yang diuji sesuai standar;
2. Persentase sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
3. Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Dengan demikian, hasil pengukuran capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 didasarkan pada 16 indikator kinerja. Dari penghitungan yang telah dilakukan, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **105,32%**, dengan predikat **Istimewa**. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja dengan pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Justifikasi	Nilai Akhir %Capaian
			Target B3	Realisasi B3	%Capaian B3		
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,00	87	98,74	113,49%	110,00%
2		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00	0	0	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun
3		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	85	99,64	117,22%	110,00%
4		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100	0	Belum Dapat Diukur	Belum Dapat Diukur
5		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	85	70,56	83,01%	83,01%
6		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	79,00	65	82,26	126,55%	110,00%
7		Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,00	90	100	111,11%	110,00%
8		Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,00	90	0	Belum Dapat Diukur	Belum Dapat Diukur
9		Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,75	94,75	0	Belum Dapat Diukur	Belum Dapat Diukur
10		Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	80,00	100	125,00%	110,00%
11		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	80,09	80,09	99,13	123,77%	110,00%
12	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan	61,00	11,11	11,11	100,00%	100,00%

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Justifikasi	Nilai Akhir %Capaian
			Target B3	Realisasi B3	%Capaian B3		
	Pangan Fortifikasi di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
13	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL	64,80	62	67,9	109,52%	109,52%
14	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	89,09	89,09	96,66	108,50%	108,50%
15		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	12	25	25	100,00%	100,00%
16		Jumlah desa pangan aman	4	25	25	100,00%	100,00%
17		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	25	25	100,00%	100,00%
18	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	81,70	15	17,78	118,53%	110,00%
19	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai Besar POM di Palembang	74	32	33,33	104,16%	104,16%
20	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan	Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	12	50,0	416,67%	110,00%

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Justifikasi	Nilai Akhir %Capaian
			Target B3	Realisasi B3	%Capaian B3		
	Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Palembang						
21	Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang yang prima	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palembang	4,70	0	0	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun
22	Terwujudnya tata kelola pemerintah di lingkup Balai Besar POM di Palembang yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Palembang	85,90	0	0	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun
23		Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang	81,04	0	0	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun
24		Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Palembang	5,00	0	0	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun
25		Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Palembang	3,00	0	0	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun
Total Capaian PK							1685,18%
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-rata Capaian PK							105,32%
Predikat NKO							Istimewa

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis. Berikut data pencapaian kinerja berdasarkan sasaran kegiatan :

Tabel 3.1.1 Capaian per Sasaran Kegiatan pada Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Target 2025	Target B3	Realisasi B3	Capaian B3	Normalisasi Capaian	Capaian SK B3
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,00	87	98,74	113,49%	110,00%	106,14% (Kategori : Sangat Baik)
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00	0	0	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	
		3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	85	99,64	117,22%	110,00%	
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100	0	Belum Dapat Diukur	Belum Dapat Diukur	
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	85	70,56	83,01%	83,01%	
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan	79,00	65	82,26	126,55%	110,00%	

			olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder						
		7	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,00	90	100	111,11%	110,00%	
		8	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,00	90	0	Belum Dapat Diukur	Belum Dapat Diukur	
		9	Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,75	94,75	0	Belum Dapat Diukur	Belum Dapat Diukur	
		10	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	80,00	100	125,00%	110,00%	
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	80,09	80,09	99,13	123,77%	110,00%	
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	61,00	11,11	11,11	100,00%	100,00%	100,00% (Kategori : Baik)

3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL	64,80	62	67,9	109,52%	109,52%	109,52% (Kategori : Sangat Baik)
4	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	89,09	89,09	96,66	108,50%	108,50%	102,12% (Kategori : Sangat Baik)
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	12	25	25	100,00%	100,00%	
		16	Jumlah desa pangan aman	4	25	25	100,00%	100,00%	
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	25	25	100,00%	100,00%	
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	81,70	15	17,78	118,53%	110,00%	110,00% (Kategori : Sangat Baik)
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai Besar POM di Palembang	74	32	33,33	104,16%	104,16%	104,16% (Kategori : Sangat Baik)

	efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang								
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Palembang	20	Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	12	50,0	416,67%	110,00%	110,00% (Kategori : Sangat Baik”
8	Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palembang	4,70	0	0	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah di lingkup Balai Besar POM di Palembang yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Palembang	85,90	0	0	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun
		23	Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang	81,04	0	0	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	
		24	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Palembang	5,00	0	0	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	
		25	Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Palembang	3,00	0	0	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan untuk setiap indikator kinerja, dengan membandingkan realisasi kinerja triwulan I dengan target kinerja triwulan I 2025, membandingkan realisasi kinerja triwulan I dengan target tahun 2025, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan rekomendasi perbaikan kinerja,

analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataaan kinerja, dan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya, serta evaluasi dan analisis anggaran. Analisis akuntabilitas kinerja triwulan I tahun 2025 Balai Besar POM di Palembang akan dijelaskan per indikator kinerja sebagai berikut :

SK 1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang

IK 1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.1.2
Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 IKU 1.

Indikator Kinerja	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian (%)	Notifikasi
Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	98,74	113,49%	

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.

Cara perhitungan dan formula terhadap persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, yaitu :

$$Persentase\ Sampel\ Sediaan\ Farmasi\ Berisiko\ yang\ Ditindaklanjuti\ Sesuai\ Ketentuan = \frac{A+B+C+D}{4}$$

A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

A= a+b+c+d

a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%),

$$a = 30\%\ x \left(\frac{Jumlah\ sampel\ dengan\ perencanaan\ sesuai\ ketentuan}{Total\ target\ sampel}\ x\ 100\% \right)$$

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Target sampel,
2. Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring),
3. Renlak Kategori Kelas Terapi

b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %).

$$b = 20\% \; x \left(\frac{Jumlah\ sampel\ dengan\ pelaksana\ sampling\ sesuai\ ketentuan}{Total\ target\ sampel} \; x\ 100\% \right)$$

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Renlak periode/waktu sampling,
2. Ketentuan Evaluasi Penandaan

c. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%).

$$c = 20\% \; x \left(\frac{Jumlah\ sampel\ yang\ diuji\ dengan\ parameter\ sesuai\ ketentuan}{Total\ jumlah\ sampel\ yang\ diuji} \; x\ 100\% \right)$$

Mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai Pedoman Sampling yang berlaku, termasuk uji secara rapid.

d. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)

$$d = 20\% \; x \left(\frac{Jumlah\ sampel\ dengan\ pelaporan\ sesuai\ ketentuan}{Total\ target\ sampel} \; x\ 100\% \right)$$

Mencakup kesesuaian:

1. Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian
2. Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling (Loka POM sampai dengan pelaporan evaluasi penandaan)

e. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%)

$$e = 10\%\ x \left(\frac{Jumlah\ \ laporan\ monitoring\ penarikan\ sesuai\ ketentuan}{Target\ jumlah\ laporan\ Monitoring\ penarikan}\ x\ 100\% \right)$$

B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$Persentase\ Sampel\ Obat\ Bahan\ Alam\ Berisiko\ yang\ Ditindaklanjuti\ Sesuai\ Ketentuan = \frac{a + b + c + d\ + e}{5}$$

a. Pemenuhan target pengawasan

$$a\ = \left(\frac{a1 + a2}{2} \right)$$

Keterangan:

$$a1\ = \left(\frac{Jumlah\ sampel\ yang\ diperiksa\ sesuai\ dengan\ Pedoman\ Sampling\ (renlak\ dan\ kategori\ sampel\ *)}{Target\ sampel\ UPT\ sesuai\ Pedoman\ Sampling\ dan\ \square\square enlak\ UPT} \right) x\ 100\%$$

$$a2\ = \left(\frac{Jumlah\ sampel\ yang\ diuji\ sesuai\ dengan\ Pedoman\ Sampling\ **}{jumlah\ sampel\ yang\ masuk\ laboratorium\ sesuai\ tingkatannya} \right) x\ 100\%$$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

$$b\ = \left(\frac{Jumlah\ sampel\ yang\ disampling, diuji\ dan\ dilaporkan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ seluruh\ sampel\ yang\ diperiksa,\ \ disampling\ dan\ diuji} \right)\ x\ 100\%$$

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan kinerja UPT yang melakukan sampling

c. Kesesuaian parameter uji

$$c\ = \left(\frac{Jumlah\ sampel\ yang\ diuji\ dengan\ parameter\ sesuai\ pedoman\ sampling}{jumlah\ sampel\ yang\ diuji} \right)\ x\ 100\%$$

Catatan:

Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan

$$d = \left(\frac{Jumlah\ kesimpulan\ sampel\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji\ sesuai}{Target\ sampel\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji}\right) x\ 100\%$$

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

$$e = \left(\frac{Jumlah\ surat\ yang\ ditindaklanjuti\ oleh\ UPT}{Jumlah\ surat\ yang\ dikirimkan\ oleh\ Deputi\ Bidang\ Pengawasan\ OT, SK, dan\ Kosmetik}\right) x\ 100\%$$

C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$Persentase\ Sampel\ Suplemen\ Kesehatan\ Berisiko\ yang\ Ditindaklanjuti\ Sesuai\ Ketentuan = \frac{a + b + c + d + e}{5}$$

a. Pemenuhan target pengawasan

$$a = \left(\frac{a1 + a2}{2}\right)$$

Keterangan:

$$a1 = \left(\frac{Jumlah\ sampel\ yang\ diperiksa\ sesuai\ dengan\ Pedoman\ Sampling\ (renlak\ dan\ kategori\ sampel\ *)}{Target\ sampel\ UPT\ sesuai\ Pedoman\ Sampling\ dan\ renlak\ UPT}\right) x\ 100\%$$

$$a2 = \left(\frac{Jumlah\ sampel\ yang\ diuji\ sesuai\ dengan\ Pedoman\ Sampling\ **}{jumlah\ sampel\ yang\ masuk\ laboratorium\ sesuai\ tingkatannya}\right) x\ 100\%$$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

$$b = \left(\frac{Jumlah\ sampel\ yang\ disampling, diuji\ dan\ dilaporkan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ seluruh\ sampel\ yang\ diperiksa,\ \ disampling\ dan\ diuji}\right) x\ 100\%$$

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan kinerja UPT yang melakukan sampling

c. Kesesuaian parameter uji

$$c = \left(\frac{Jumlah\ sampel\ yang\ diuji\ dengan\ parameter\ sesuai\ pedoman\ sampling}{jumlah\ sampel\ yang\ diuji}\right) x\ 100\%$$

Catatan:

Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan

$$d = \left(\frac{Jumlah\ kesimpulan\ sampel\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji\ sesuai}{Target\ sampel\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji}\right) x\ 100\%$$

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut

$$e = \left(\frac{Jumlah\ surat\ yang\ ditindaklanjuti\ oleh\ UPT}{Jumlah\ surat\ yang\ dikirimkan\ oleh\ Deputi\ Bidang\ Pengawasan\ OT, SK, dan\ Kosmetik}\right) x\ 100\%$$

D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$Persentase\ Sampel\ Kosmetik\ Berisiko\ yang\ Ditindaklanjuti\ Sesuai\ Ketentuan = \frac{a + b + c + d + e}{5}$$

a. Pemenuhan target pengawasan

$$a = \left(\frac{a1 + a2}{2}\right)$$

Keterangan:

$$a1 = \left(\frac{Jumlah\ sampel\ yang\ diperiksa\ sesuai\ dengan\ Pedoman\ Sampling\ (*)}{Target\ sampel\ UPT\ sesuai\ Pedoman\ Sampling\ dan\ renlak\ UPT}\right) x\ 100\%$$

$$a2 = \left(\frac{Jumlah\ sampel\ yang\ diuji\ sesuai\ dengan\ Pedoman\ Sampling\ **}{jumlah\ sampel\ yang\ masuk\ laboratorium\ sesuai\ tingkatannya}\right) x\ 100\%$$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kesesuaian pelaksanaan sampling

$$b = \left(\frac{Jumlah\ sampel\ dengan\ pelaksanaan\ sampling\ sesuai\ ketentuan}{Total\ target\ sampel}\right) x\ 100\%$$

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Kategori sampling yang telah ditetapkan
2. Pemilihan parameter uji

Catatan:

Kesesuaian pelaksanaan sampling menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan

$$c = \left(\frac{Jumlah\ sampel\ yang\ disampling, diuji\ dan\ dilaporkan\ lengkap\ dan\ tepat\ waktu}{jumlah\ seluruh\ sampel\ yang\ diperiksa, diuji, dan\ dilaporkan}\right) x\ 100\%$$

Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu:

1. SLA Sampling
2. SLA Pengujian
3. SLA Pelaporan

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan

$$d = \left(\frac{Jumlah\ kesimpulan\ sampel\ yang\ diperiksa, diuji\ dan\ dilaporkan\ sesuai}{Jumlah\ sampel\ yang\ diperiksa, diuji, dan\ dilaporkan}\right) x\ 100\%$$

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Ketepatan dalam penentuan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut

$$e = \left(\frac{Jumlah\ surat\ yang\ ditindaklanjuti\ oleh\ UPT}{Jumlah\ surat\ yang\ dikirimkan\ oleh\ Deputi\ II\ atau\ Direktur\ Pengawasan\ Kosmetik} \right) x\ 100\%$$

Mencakup surat:

1. Edaran pembersihan pasar
2. Edaran pemeriksaan sarana kosmetik

Catatan:

Tanggapan atas surat tindak lanjut menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

Berikut adalah tabel kertas kerja untuk indikator kinerja persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang telah dilakukan selama triwulan I tahun 2025.

Tabel 3.1.3
Kertas Kerja Realisasi Triwulan I Tahun 2025 IKU 1.

Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Sediaan Farmasi	Target Indikator (%)	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (Bobot 60%)	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi (%)
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Februari	45.00	87.00	94.44	95.83	100.00	95.03	96.33
	Maret	59.00	87.00	98.06	100.00	100.00	96.88	98.74

Pada triwulan I tahun 2025, untuk indikator kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan ditetapkan target untuk tahun 2025 sebesar 87.00% dan pada triwulan I dicapai realisasi sebesar 98.74%, dengan capaian sebesar 113.49% dengan kategori tidak dapat disimpulkan disebabkan karena penetapan target yang kecil. Hal ini dikarenakan terjadi perubahan penilaian pada capaian indikator di tahun 2025 jika dibandingkan tahun lalu hanya terfokus pada kesimpulan akhir produk memenuhi ketentuan atau tidak memenuhi ketentuan, sedangkan di tahun 2025 penilaian capaian lebih bersifat komprehensif di mana penilaian ditetapkan mulai dari proses penetapan sampel, timeline pelaporan, ketepatan pemilihan sampel, dan tindak lanjut terhadap sampel sesuai dengan ketentuan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahun 2025 IKU 1.

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,00	98,74	113,49%	Tercapai/Melampaui

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa realisasi terhadap target kinerja persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 98.74% dengan capaian sebesar 113.49% dan mendapat kategori Tercapai/Melampaui. Balai Besar POM di Palembang akan tetap melakukan perbaikan yang berkesinambungan agar dapat mempertahankan pencapaian target di triwulan selanjutnya.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tercapainya target indikator kinerja persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

1) Mitigasi risiko terhadap potensi risiko kegagalan dalam melakukan pengawasan produk sediaan farmasi telah dikendalikan melalui sosialisasi indikator kinerja termasuk perhitungan target dan capaian kepada seluruh personil yang bertanggung jawab terhadap pengawasan produk sediaan farmasi di fungsi Pemeriksaan dan Pengujian, penetapan target dan parameter pengujian sediaan farmasi sesuai Pedoman Sampling Tahun 2025 yang telah ditetapkan oleh unit pengampu, dan penetapan timeline pelaporan sampel sediaan farmasi pada aplikasi SIPT kepada setiap tim yang akan melakukan sampling dan pengujian sediaan farmasi.
2) Membuat evaluasi terhadap hasil pelaksanaan sampling dan pengujian produk sediaan farmasi tahun 2024, sehingga kesalahan dalam pelaksanaan sampling dan pengujian produk sediaan farmasi tidak terulang di tahun 2025.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

1) Peningkatan kompetensi petugas dalam pelaksanaan sampling dan pengujian produk sediaan farmasi, yang merupakan salah satu bentuk mitigasi risiko terhadap potensi risiko tidak tercapainya indikator kinerja
2) Melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian sediaan farmasi secara aktif, dinamis, dan berkesinambungan mengikuti perkembangan ketentuan peraturan yang berlaku
3) Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan sampling dan pengujian sediaan farmasi

d. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan BBPOM di Palembang yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja antara lain :

- Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan sampling dan pengujian produk sediaan farmasi berdasarkan pedoman sampling tahun 2025 yang telah ditetapkan oleh unit pengampu
- Pemerataan kompetensi petugas melalui pelatihan berkelanjutan terkait kegiatan sampling dan pengujian produk sediaan farmasi
- Sosialisasi peraturan terbaru rutin dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi kepada setiap personil di lingkungan Balai Besar POM di Palembang sebelum peraturan tersebut diberlakukan

IK 2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM =

$$\frac{A}{B}\ x\ 100\%$$

Keterangan:

A : merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan

B : merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

Indikator kinerja persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO (kejadian tidak diinginkan/efek samping obat) belum dilakukan sampai akhir triwulan I 2025. Tahap awal kegiatan tersebut akan dilakukan kegiatan KIE (komunikasi, edukasi, dan informasi) terkait farmakovigilans kepada tenaga kesehatan/tenaga medis pada sarana pelayanan kesehatan yang sudah ditetapkan menjadi target pada tahun 2025. Jumlah sarana yang ditargetkan yaitu 45 sarana pelayanan kesehatan.

Dari 45 sarana pelayanan kesehatan yang sudah dilakukan KIE farmakovigilans, akan dilihat berapa persentase fasilitas yang telah melaporkan KTD/ESO pada aplikasi yang telah ditentukan sesuai pedoman. Perencanaan kegiatan KIE farmakovigilans akan dilaksanakan pada April 2025, sehingga indikator ini dapat mulai terlihat realisasinya pada triwulan II 2025.

Tabel 3.1.5
Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 IKU 2

Indikator Kinerja	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian (%)	Notifikasi
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	N/A	N/A	Diukur Akhir Tahun	N/A

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahun 2025

Realisasi indikator kinerja persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO (kejadian tidak diinginkan/efek samping obat) belum dapat diukur. Proses pelaporan belum dimulai, karena tahap awal kegiatan KIE farmakovigilans belum dilaksanakan, sehingga diperlukan upaya keras untuk mencapai target indikator ini sampai akhir tahun 2025.

Tabel 3.1.6
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahun 2025 IKU 2

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian (%)	Kategori
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00	00,00	00,00% 	Perlu upaya keras

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

1. Kegiatan ini belum mulai dilaksanakan, sehingga perlu dilakukan koordinasi yang lebih baik kepada lintas sektor terutama dengan target sarana pelayanan kesehatan dan organisasi keprofesian terkait.
2. Monitoring pelaporan KTD/ESO yang dilakukan setiap bulan oleh petugas kepada penanggung jawab farmakovigilans di sarana pelayanan kefarmasian yang telah diberikan KIE terkait KTD/ESO.

Rekomendasi perbaikan kinerja:

1. Petugas/anggota tim kerja terkait indikator ini rutin mengingatkan kepada penanggung jawab pelaporan KTD/ESO sarana pelayanan kesehatan

d. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Adanya komitmen dari sarana pelayanan kesehatan untuk tertib melakukan pelaporan KTD/ESO

2. Komunikasi dan koordinasi yang baik salah satu cara dengan membuat WAG (*whatsapp group*) untuk memudahkan dalam komunikasi dan sharing informasi kepada tenaga kesehatan.

IK 3. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.1.7
Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 IKU 3.

Indikator Kinerja	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian (%)	Notifikasi
Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	99,64	117,22%	

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling.

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan =

$$20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$$

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan :

$$\frac{(A1 + A2)}{2}$$

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

Catatan: Untuk UPT yang tidak melakukan pengujian hanya melakukan perhitungan A1

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

$$\frac{(Jumlah\ sampel\ yang\ diuji\ dengan\ parameter\ sesuai\ pedoman\ sampling)}{Jumlah\ sampel\ yang\ diuji}\ x\ 100\%$$

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

$$\frac{(Jumlah\ sampel\ yang\ diambil\ kesimpulan\ sesuai\ pedoman\ sampling)}{jumlah\ sampel\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji}\ x\ 100\%$$

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu. Ketepatan pengambilan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

$$\frac{(Jumlah\ sampel\ yang\ diperiksa\ tepat\ waktu\ sesuai\ renlak)}{(Jumlah\ sampel\ yang\ diperiksa)}\ x\ 100\%$$

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :

$$\frac{(Jumlah\ sampel\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji\ yang\ dilaporkan\ tepat\ waktu\ sesuai\ pedoman\ sampling)}{(Jumlah\ sampel\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji)}\ x\ 100\%$$

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

$$\frac{(Jumlah\ sampel\ yang\ ditindaklanjuti)}{(total\ jumlah\ sampel\ yang\ Tidak\ Memenuhi\ Syarat\ )}\ x\ 100\%$$

Pembilang dan penyebut untuk penghitungan pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\%\ B3 = \frac{Total\ pembilang\ (B1+B2+B3)}{Total\ penyebut\ (B1+B2+B3)}\ x\ 100\%$$

Berikut adalah tabel kertas kerja untuk indikator kinerja persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang telah dilakukan selama triwulan I tahun 2025.

Tabel 3.1.8
Kertas Kerja Triwulan I Tahun 2025 IKU 3.

Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%)	Realisasi (%)
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jan	16,00	85,00	46,88	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Feb	21,00	85,00	97,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,52
	Mar	28,00	85,00	98,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,64

Pada triwulan I tahun 2025, untuk indikator kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan ditetapkan target untuk tahun 2025 sebesar 85,00% dan pada triwulan I dicapai realisasi sebesar 99.64%, dengan capaian sebesar 117,22% dengan kategori tidak dapat disimpulkan disebabkan karena penetapan target yang kecil. Hal ini dikarenakan terjadi perubahan penilaian pada capaian indikator di tahun 2025 jika dibandingkan tahun lalu hanya terfokus pada kesimpulan akhir produk memenuhi ketentuan atau tidak memenuhi ketentuan, sedangkan pada tahun 2025 penilaian capaian lebih bersifat komprehensif di mana penilaian ditetapkan mulai dari kesesuaian target sampel UPT; kesesuaian parameter uji; ketepatan pengambilan kesimpulan; ketepatan waktu pengambilan sampel; ketepatan pelaporan sampling dan pengujian; dan tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ ketentuan lainnya. Jumlah sampel pangan olahan yang masuk di Triwulan I sebanyak 28 sampel dengan rincian 25 sampel memenuhi syarat dan 3 sampel yang tidak memenuhi syarat (2 TMS Kadar Air dan 1 TMS PK Siklamat- Rasio Pemanis.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahun 2025 IKU 3

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	99,64	117,22% 	Tercapai/Melampaui

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa realisasi terhadap target kinerja persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 99.64% dengan capaian sebesar 117.22% dan mendapat kategori Tercapai/ Melampaui. Balai Besar POM di Palembang akan tetap melakukan perbaikan yang berkesinambungan agar dapat mempertahankan pencapaian target di triwulan selanjutnya.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tercapainya target indikator kinerja persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

1) Mitigasi risiko terhadap potensi risiko kegagalan dalam melakukan pengawasan produk pangan olahan berisiko telah dikendalikan melalui sosialisasi indikator kinerja termasuk perhitungan target dan capaian kepada seluruh personil yang bertanggung jawab terhadap pengawasan produk pangan olahan berisiko di fungsi Pemeriksaan dan Pengujian, penetapan target dan parameter pengujian pangan olahan berisiko sesuai Pedoman Sampling Tahun 2025 yang telah ditetapkan oleh unit pengampu, dan penetapan timeline pelaporan sampel pangan olahan berisiko pada aplikasi SIPT kepada setiap tim yang akan melakukan sampling dan pengujian pangan olahan berisiko.
2) Membuat evaluasi terhadap hasil pelaksanaan sampling dan pengujian produk pangan olahan tahun 2024, sehingga kesalahan dalam pelaksanaan sampling dan pengujian produk pangan olahan tidak terulang di tahun 2025.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

1) Peningkatan kompetensi petugas dalam pelaksanaan sampling dan pengujian produk pangan olahan, yang merupakan salah satu bentuk mitigasi risiko terhadap potensi risiko tidak tercapainya indikator kinerja
2) Melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian pangan olahan secara aktif, dinamis, dan berkesinambungan mengikuti perkembangan ketentuan peraturan yang berlaku
3) Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan sampling dan pengujian pangan olahan

d. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan BBPOM di Palembang yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja antara lain :

1) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan sampling dan pengujian produk pangan olahan berdasarkan pedoman sampling tahun 2025 yang telah ditetapkan oleh unit pengampu
2) Pemerataan kompetensi petugas melalui pelatihan berkelanjutan terkait kegiatan sampling dan pengujian produk pangan olahan
3) Sosialisasi peraturan terbaru rutin dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi kepada setiap personil di lingkungan Balai Besar POM di Palembang sebelum peraturan tersebut diberlakukan

IK 4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
2) Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Pada awal tahun 2025, telah disusun rancangan Manual IKU yang mencantumkan cara perhitungan dan formula persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar sebagai berikut :

$$Persentase\ KLB = \frac{Jumlah\ sampel\ KLB\ keracunan\ pangan\ yang\ diuji\ sesuai\ standar}{Total\ jumlah\ sampel\ KLB\ keracunan\ pangan\ dikirim\ atau\ diuji\ ke\ BPOM} \times 100\%$$

Dengan beberapa ketentuan sebagai berikut :

a. Diperiksa meliputi pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan.

b. Untuk dugaan pangan KLB keracunan pangan bersumber dari pangan olahan terkemas maka dilakukan pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
c. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang disampling oleh UPT atau sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait.
d. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.

   Contoh : $\%B3 = \frac{Total\ Pembilang\ (B1+B2+B3)}{Total\ Penyebut\ (B1+B2+B3)} x100\%$
e. Sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
f. Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji.
g. Terkait penginputan pelaporan SIPT di Balai Besar/ Balai POM:
   - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
   - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/ Balai Penguji.
   - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/ TMS adalah Balai Besar/ Balai Penyampling.
h. Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
   - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
   - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
   - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.
i. Terkait penginputan SPIMKER KLB Keracunan Pangan:
   - Unit yang bertugas untuk melakukan penginputan adalah unit tempat lokasi kejadian KLB Keracunan Pangan.

Namun pada tanggal 10 April 2025 dilakukan sosialisasi penyusunan dan perhitungan RHPK pada tiap indikator kinerja. Pada sosialisasi tersebut, cara dan formula perhitungan untuk indikator ini, seperti tersebut di atas belum dapat disepakati baik oleh unit pengampu dan Biro Perencanaan dan Keuangan, sehingga perlu dilakukan pembahasan ulang, sehingga penjabaran formula perhitungan di atas masih belum berlaku hingga periode pelaporan saat ini. Selain

daripada itu, pada triwulan I 2025 ini Balai Besar POM di Palembang belum menerima sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan seperti yang telah dijelaskan di atas. Oleh karena itu, pada triwulan I 2025 realisasi atas indikator kinerja ini terhitung 0, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.10
Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 IKU 4.

Indikator Kinerja	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian (%)	Notifikasi
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	00,00	N/A	N/A

Namun menindaklanjuti hal tersebut di atas, telah disepakati bersama Biro Perencanaan dan Keuangan bahwa capaian indikator kinerja ini tidak akan diperhitungkan dalam Nilai Kinerja Organisasi Triwulan I 2025.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahun 2025

Target Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada tahun 2025 adalah 100% sedangkan realisasi pada TW I sebesar 0% sehingga capaian nya terhitung 0% sesuai penjelasan pada poin a, atau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.11
Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahun 2025 IKU 4.

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	00,00	N/A	N/A

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Pada triwulan I 2025 indikator kinerja ini belum dapat dinyatakan keberhasilan atau kegagalannya. Namun sebagai rekomendasi peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya, akan dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Mempersiapkan kebutuhan media dan reagensia untuk persiapan melakukan pengujian KLB sehingga semua parameter uji yang disyaratkan bisa dilakukan uji sesuai dengan standar

2. Berkoordinasi dengan fungsi lain dalam mengawal KLB
3. Senantiasa mengawal keamanan produk obat dan makanan sehingga terhindar dari KLB

IK 5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.1.12
Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 IKU 5.

Indikator Kinerja	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian (%)	Notifikasi
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	70,56	83,01%	

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah PIRT hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan =

$$20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$$

A= Kesesuaian target sampel PIRT
Cara Perhitungan :

$$\frac{(A1 + A2)}{2}$$

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%
A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian
**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

B = Kesesuaian Parameter Uji
Cara Perhitungan =

$$\frac{(Jumlah\ sampel\ sesuai)}{Total\ sampel\ PIRT}\ x\ 100\%$$

C= Ketepatan Pengambilan Kesimpulan
Cara Perhitungan =

$$\frac{(Jumlah\ sampel\ yang\ diambil\ kesimpulan\ sesuai\ pedoman\ sampling)}{jumlah\ sampel\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji}\ x\ 100\%$$

D = Ketepatan waktu pengambilan sampel
Cara Perhitungan =

$$\frac{(Jumlah\ sampel\ yang\ diambil\ di\ TW\ 1)}{(Total\ Sampel\ PIRT)}\ x\ 100\%$$

E = Ketepatan waktu pelaporan
Cara Perhitungan =

$$\frac{(Jumlah\ sampel\ tepat\ waktu)}{(Total\ Sampel\ PIRT)}\ x\ 100\%$$

F = Tindak lanjut Sampel PIRT
Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/ atau Rusak dan/ atau Kedaluwarsa dan/ atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan =

$$\frac{(Jumlah\ sampel\ PIRT\ \ yang\ ditindaklanjuti)}{(total\ jumlah\ sampel\ yang\ Tidak\ Memenuhi\ Syarat\ )}\ x\ 100\%$$

Berikut adalah tabel kertas kerja untuk indikator kinerja persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang telah dilakukan selama triwulan I tahun 2025.

Tabel 3.1.13
Kertas Kerja Triwulan I Tahun 2025 IKU 5.

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan Target Sampel PIRT (Bobot 20%)	% Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	% Ketepatan pengambilan kesimpulan (Bobot 20%)	% Ketepatan waktu pengambilan sampel (Bobot 10%)	% Ketepatan waktu pelaporan (Bobot 10%)	% Tindak lanjut sampel PIRT (Bobot 20%)	Realisasi (%)
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Jan	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Feb	85.00	100,00	0,00	0,00	5,56	0,00	100,00	40,56
	Mar	85.00	100,00	0,00	100,00	5,56	100,00	100,00	70,56

Pada triwulan I tahun 2025, untuk indikator kinerja Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan ditetapkan target untuk tahun 2025 sebesar 85,00% dan pada triwulan I dicapai realisasi sebesar 70,56%, dengan capaian sebesar 83,01% dengan kategori

cukup. Hal ini dikarenakan terjadi perubahan penilaian pada capaian indikator di tahun 2025 jika dibandingkan tahun lalu hanya terfokus pada kesimpulan akhir produk memenuhi ketentuan atau tidak memenuhi ketentuan, sedangkan pada tahun 2025 penilaian capaian lebih bersifat komprehensif di mana penilaian ditetapkan mulai dari kesesuaian target sampel UPT; kesesuaian parameter uji; ketepatan pengambilan kesimpulan; ketepatan waktu pengambilan sampel; ketepatan pelaporan sampling dan pengujian; dan tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ ketentuan lainnya. Jumlah sampel PIRT yang masuk di Triwulan I sebanyak 2 sampel dengan hasil pengujian memenuhi syarat.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.14
Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahun 2025 IKU 5.

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	70,56	83,01%	Akan Tercapai

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa realisasi terhadap target kinerja persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 70.56% dengan capaian sebesar 83,01% dan mendapat kategori Akan Tercapai. Balai Besar POM di Palembang akan selalu melakukan perbaikan yang berkesinambungan agar dapat mempertahankan pencapaian target di triwulan selanjutnya.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tidak tercapainya target indikator kinerja persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I 2025, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

1) Pada bulan Februari terdapat kesalahan pemilihan kategori sampel pada 2 (dua) sampel PIRT

2) Realisasi untuk parameter ketepatan waktu tidak maksimal karena rencana pelaksanaan sampling pada triwulan I tidak terealisasi. Hal ini terjadi karena ketersediaan anggaran yang terdampak dari kebijakan efisiensi

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

1) Peningkatan kompetensi petugas dalam pelaksanaan sampling dan pengujian produk PIRT, yang merupakan salah satu bentuk mitigasi risiko terhadap potensi risiko tidak tercapainya indikator kinerja
2) Melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian PIRT secara aktif, dinamis, dan berkesinambungan mengikuti perkembangan ketentuan peraturan yang berlaku
3) Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan sampling dan pengujian PIRT
4) Mengusulkan perubahan target dengan justifikasi *baseline* perhitungan realisasi saat ini sesuai evaluasi dari Unit Pengampu.

d. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan BBPOM di Palembang yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja antara lain :

1) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan sampling dan pengujian produk PIRT berdasarkan pedoman sampling tahun 2025 yang telah ditetapkan oleh unit pengampu
2) Pemerataan kompetensi petugas melalui pelatihan berkelanjutan terkait kegiatan sampling dan pengujian produk PIRT
3) Sosialisasi peraturan terbaru rutin dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi kepada setiap personil di lingkungan Balai Besar POM di Palembang sebelum peraturan tersebut diberlakukan.

IK 6. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/ distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
- Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/ Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana Produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Palembang dengan target triwulan I 2025 sebesar 65%, dengan realisasi sebesar 82,268% sehinga capaian IKU ini sebesar 126,55% dengan kategori tercapai/melampaui.

Tabel 3.1.15

Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 IKU 6.

Indikator Kinerja	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian (%)	Notifikasi
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	65	82,26	126,55%	

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahun 2025

Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Palembang dengan target tahun 2025 adalah 79,00%, dengan realisasi triwulan I sebesar 82,26% dengan capaian sebesar 104,13% dengan kategori tercapai

Tabel 3.1.16

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahun 2025 IKU 6.

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian (%)	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	79,00	82,26	104,13% 	Tercapai

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan:

1. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam membuat keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan secara tepat waktu.
2. Perhitungan IKU untuk tindak lanjut/rekomendasi pemangku kepentingan tidak hanya Dinas terkait tetapi juga pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan sehingga menambah keberhasilan capaian IKU.
3. Adanya monitoring dan evaluasi secara berjenjang untuk memastikan bahwa keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi telah dilaksanakan.
4. Tersedianya sarana dan prasarana serta alat pengolah data yang memadai seperti komputer, laptop, printer dalam menunjang kelancaran pekerjaan.

Rekomendasi penyempurnaan kinerja:

Untuk penyempurnaan kinerja IKU ini untuk terus dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berjenjang.

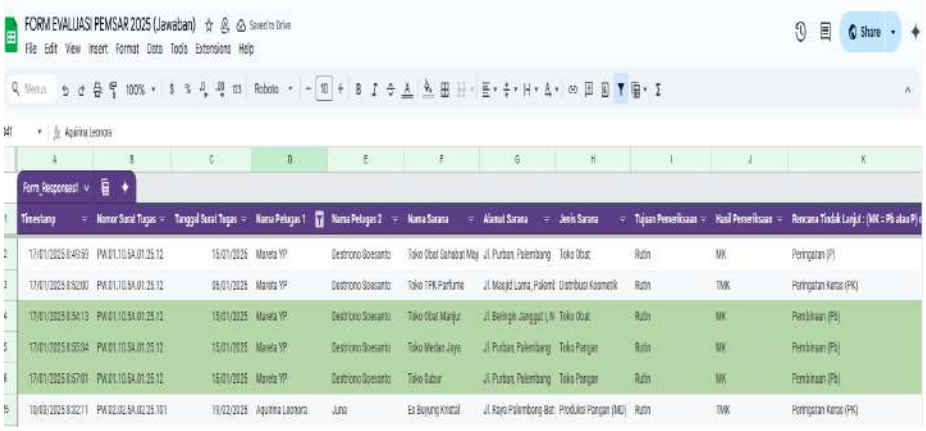
d. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Secara keseluruhan kegiatan pendampingan pada triwulan I sudah sesuai target, Secara umum produsen Pangan Olahan yang wajib izin edar Badan POM sudah mulai banyak, namun masih terbatas untuk produsen OBA dan produsen Kosmetik. Kesadaran pelaku usaha pangan olahan untuk mendaftarkan produknya ke BPOM sudah mulai banyak. Petugas BBPOM di Palembang

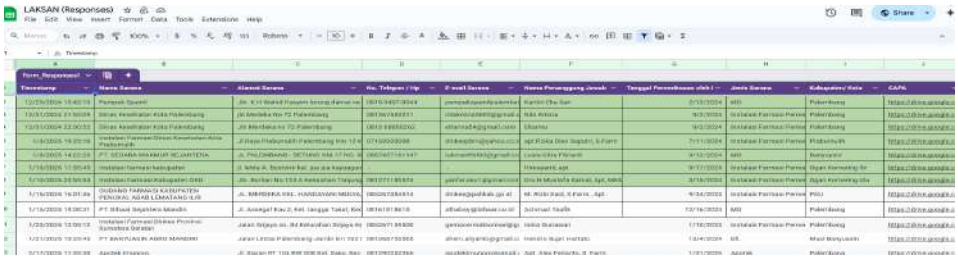
terus melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait seperi Dinkes kab/kota, Dinas Koperasi dan UMKM untuk menggali potensi pelaku usaha yang layak dinaikkan menjadi MD disamping juga informasi langsung dari masyarakat dan media sosial. Selain itu, untuk menunjang keberhasilan maka dibuat tools untuk memudahkan dalam monitoring dan evaluasi.

Agar IKU ini bisa berhasil tercapai maka dilakukan sbb:

1. Adanya tools Sistem Informasi Realisasi Pemeriksaan Sarana (SiLisaMesra) yang dibuat untuk mengetahui hasil pemeriksaan yang terupdate dan dapat dijadikan tools untuk memonitor hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti. pada triwulan I ini untuk pengisian tools oleh petugas dilakukan segera setelah pemeriksaan sarana dilakukan. Sampai dengan saat ini pemanfaatan tools ini dilakukan sepenuhnya oleh petugas. Berikut adalah tampilan toolsSiLisaMesra:



2. Adanya tools Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana (LAKSAN_PALEMBANG) yang dibuat untuk memudahkan pemangku kepentingan menyampaikan feedback atas hasil pemeriksaan serta memudahkan petugas dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sehingga lebih efektif. Berikut tampilan tool LAKSAN_PALEMBANG



IK 7. Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.1.17

Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 IKU 7.

Indikator Kinerja	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian (%)	Notifikasi
Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	100,00	111,11%	

Indikator kinerja utama persentase fasilitas produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dari :

rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

% Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C)

. A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan

$$= \frac{Jumlah\ sarana\ yang\ diperiksa\ sesuai\ dengan\ sasaran\ dan\ cakupan\ renlak\ tahunan}{Jumlah\ sasaran\ dan\ cakupan\ target\ renlak}\ x\ 100\%$$

B. Jumlah pelaksanaan inspeksi

$$= \frac{Jumlah\ realisasi\ pengawasan\ sarana\ yang\ telah\ dilakukan\ dalam\ kurun\ waktu\ setahun}{jumlah\ target\ tahunan}\ x\ 100\%$$

C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut

= rata-rata persentase sub aspek 1-6

1) Ketepatan penetapan tindak lanjut

2) Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut

3) Kesesuaian format laporan inspeksi

4) Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT

5) Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi

6) Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

% Sarprod OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

. A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

$$= \frac{Jumlah\ realisasi\ pengawasan\ sarana}{jumlah\ target\ pengawasan\ inspeksi\ sesuai\ Renlak}\ x\ 100\%$$

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

$$= \frac{Jumlah\ sarana\ yang\ diperiksa\ dan\ dilaporkan\ lengkap\ dan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ seluruh\ sarana\ yang\ diperiksa}\ x\ 100\%$$

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

$$= \frac{Jumlah\ kesimpulan\ pengawasan\ sarana\ yang\ benar}{Jumlah\ sarana\ yang\ selesai\ diperiksa}\ x\ 100\%$$

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

$$= \frac{Jumlah\ tindaklanjut\ hasil\ pengawasan\ sarana\ yang\ sesuai\ dan\ tepat\ waktu}{jumlah\ seluruh\ tindaklanjut}\ x\ 100\%$$

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

% Sarprod Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

. A. Pelaksanaan inspeksi

$$= \frac{Jumlah\ realisasi\ pengawasan\ sarana}{jumlah\ target\ sesuai\ Renlak}\ x\ 100\%$$

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

$$= \frac{Jumlah\ sarana\ yang\ diperiksa\ dan\ dilaporkan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ seluruh\ sarana\ yang\ diperiksa}\ x\ 100\%$$

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

$$= \frac{Jumlah\ kesimpulan\ pengawasan\ sarana\ yang\ sesuai}{jumlah\ sarana\ yang\ selesai\ diperiksa}\ x\ 100\%$$

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

$$= \frac{Jumlah\ tindaklanjut\ hasil\ pengawasan\ sarana\ yang\ sesuai\ dan\ tepat\ waktu}{jumlah\ seluruh\ tindaklanjut}\ x\ 100\%$$

Rencana Pelaksanaan (Renlak) pengawasan sarana produksi pada Triwulan 1 hanya ada 1 sarana yaitu sarana UKOT, dan terealisasi 1 sarana produksi, sehingga realisasi adalah 100 %. Capaian persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan terhadap target tahunan (90%), didapatkan hasil 111,11%.

Pengawasan telah dilakukan berdasarkan ketentuan yaitu kesesuaian pelaksanaan inspeksi, kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat, akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi, Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana.

Untuk pengawasan Sarana Produksi Sediaan farmasi lainnya direncanakan akan dilakukan pada TW 2, TW 3 dan TW 4.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.18

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahun 2025 IKU 7.

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,00	100,00	111,11% ▲	Tercapai/melampaui

Capaian Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan 1 tahun 2025 adalah sebesar 100% dengan capaian adalah 111,11 % terhadap target tahunan (90%). Persentase capaian melampaui target tahun 2025 (>110%) disebabkan oleh kondisi masih menunggu kepastian perhitungan IKU dari kedeputian terkait dan Biro Perencanaan BPOM dikarenakan adanya kebijakan Efisiensi Anggaran Pemerintah sehingga realisasi pemeriksaan hanya 1 sarana (16,67% target tahunan)

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Capaian Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan 1 tahun 2025 sebesar 111,11 %, disebabkan oleh hanya ada 1 sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa pada triwulan 1 tahun 2025, sesuai dengan Perencanaan Pelaksanaan yang sudah dibuat. Sesuai dengan Rencana Output (RO) yang dikeluarkan oleh Badan POM untuk UPT Balai Besar POM di Palembang dimana pada tahun 2025 Balai Besar di Palembang ditargetkan :

- Industri Farmasi = 0
- Industri Obat Tradisional = 1
- UKOT dan UMOT = 3
- Suplemen Kesehatan = 1
- Kosmetika = 1

Rekomendasi perbaikan kinerja :

Relaksasi anggaran yang mengembalikan target anggaran pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi kepada target awal akan memperbaiki kinerja pada triwulan berikutnya.

d. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan 1 tahun 2025 sebesar 111,11 %, disebabkan oleh realisasi pemeriksaan adalah 1 sarana (16,67% target tahunan). Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah yang mengakibatkan penyesuaian target tahunan dari 6 sarana menjadi 3 sarana (50% target awal), sehingga kalau dibandingkan dengan target efisiensi, realisasi triwulan 1 adalah 33,3%

IK 8. Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.1.19

Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 IKU 8.

Indikator Kinerja	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian (%)	Notifikasi
Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	N/A	N/A	N/A

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. Termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain.

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

1) Ketepatan waktu tindak lanjut
2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

Pada awal tahun 2025, penyusunan Manual IKU telah mempertimbangkan cara perhitungan dan formula untuk menghitung realisasi dari indikator kinerja, yaitu sebagai berikut :

$$\%\ Jumlah\ Sarana\ Diperiksa\ \&\ Ditindaklanjuti\ Sesuai\ Ketentuan = \frac{Jumlah\ Sarana\ yang\ diperiksa\ dan\ ditindaklanjuti\ sesuai\ ketentuan}{Jumlah\ Seluruh\ Sarana\ yang\ Diperiksa} \times 100\%$$

Dengan keterangan :

* Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

* Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek $\frac{(a+b+c)}{3}$ yaitu:

a. Ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan, yaitu pada tanggal 15 pada bulan berikutnya;
b. Kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.
c. Kesesuaian grading: kesesuaian grading akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian grading, dimana jika hasil:

    I. Pemeriksaan A dan B atau pemeriksan level I dan level II maka grading sebagai A (MK)
    II. Pemeriksaan C atau pemeriksan level III maka grading sebagai B (TMK)
    III. Pemeriksaan D atau pemeriksan level IV maka grading sebagai C (TMK)

d. Kesesuaian koordinasi (jika diperlukan): kesesuaian koordinasi dihitung dari penyelesaian tindak lanjut dalam bentuk koordinasi dengan lintas sektor terkait. Kordinasi bisa dalam bentuk : surat dinas, rapat/FGD, advokasi.

Tindak Lanjut Pemeriksaan Sarana dihitung sesuai ketentuan apabila memenuhi seluruh aspek tersebut diatas.

Namun, pada tanggal 11 April 2025 dilakukan sosialisasi penyusunan dan pengisian RHPK untuk tiap indikator kinerja dan indikator kinerja ini menjadi salah satu indikator yang belum dapat dimutakhirkan formula perhitungan realisasinya dan akan dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh Unit Pengampu dan Biro Perencanaan dan Keuangan, sehingga penjelasan cara perhitungan dan formula yang dijelaskan di atas belum berlaku. Dengan demikian, hingga triwulan I Balai Besar POM di Palembang belum dapat menyampaikan realisasi dan persentase capaian atas indikator ini. Namun, pengawasan sarana produksi pangan olahan yang telah dilakukan pada triwulan 1 tahun 2025 berjumlah 7 sarana, dengan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT tidak lebih dari tanggal 15 pada bulan berikutnya. Sedangkan untuk kesesuaian tindaklanjut sesuai dengan pedoman hingga akhir triwulan I belum ada evaluasi dari unit pengampu.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.20

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahun 2025 IKU 8.

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,00	0	N/A	N/A

Realisasi kinerja triwulan I belum dapat dibandingkan dengan target tahun 2025 karena formula perhitungan realisasi belum dimutakhirkan bersama unit pengampu dan Biro Perencanaan dan Keuangan. Namun realisasi pemeriksaan sarana pada triwulan I hanya 7 sarana atau 10% target tahunan, realisasi ini menyesuaikan ketersediaan anggaran yang pada triwulan I terdampak kebijakan efisiensi anggaran.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Capaian Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan 1 tahun 2025 belum dapat dinyatakan keberhasilan/kegagalannya dikarenakan perhitungan realiasasi yang belum bisa dilakukan. Namun pada triwulan berikutnya akan dilakukan upaya perbaikan kinerja yaitu dengan melakukan penyesuaian rencana pelaksanaan (renlak) untuk triwulan 2 sampai dengan triwulan 4 yaitu 30% (21 sarana) per triwulan.

d. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pada triwulan berikutnya dengan adanya kebijakan relaksasi anggaran termasuk pada Rincian Output Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan sehingga baik target tahunan maupun anggaran yang disediakan dikembalikan seperti awal. Sehingga penyesuaian renlak mulai dari triwulan 2 sampai degan triwulan 4 tahun 2025 dengan minimal 30% (21 sarana) per triwulan diharapkan dapat menunjang pencapaian kinerja pada triwulan berikutnya.

IK 9. Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.1.21

Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 IKU 9.

Indikator Kinerja	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian (%)	Notifikasi
Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,75	N/A	N/A	N/A

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/ fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

- Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitasi Pengelolaan Kefarmasian;
- Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peratuaran perundang-undangan;
- Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
- Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Indikator kinerja utama persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dari:

$$\frac{(A + B + C)}{3}$$

Keterangan:

A= persentase sarana distribusi obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan,

B= persentase sarana distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dan

C= persentase sarana distribusi kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

A. Persentase Sarana Distribusi Obat Yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan diperoleh dari=

$$\frac{(a+b)}{2}$$

Keterangan:

a= pemenuhan target pemeriksaan

$$\frac{(\sum fasilitas\ yang\ memiliki\ kewenangan\ distribusi +\ fasilitas\ yang\ memiliki\ kewenangan\ penyerahan\ \ obat}{target\ \sum fasilitas\ yang\ ditargetkan\ di\ tahun\ berjalan}$$

b= kesesuaian tindaklanjut.

Menilai tingkat kesesuaian antara tindak lanjut yang telah diberikan oleh UPT dibandingkan dengan standar yang berlaku, yaitu Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan, dan SOP Makro Pengawasan.

B. Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam Dan Suplemen Kesehatan Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Perhitungan diperoleh dari rata-rata terhadap komponen dibawah ini :

- Pelaksanaan dan kesesuaian pelaksanaan inspeksi OBA =

$$\frac{(Jumlah\ realisasi\ pengawasan\ sarana)}{Jumlah\ target\ tahunan}\ x\ 100\%$$

- Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat OBA =

$$\frac{(Jumlah\ sarana\ yang\ diperiksa\ dan\ dilaporkan\ tepat\ waktu)}{Jumlah\ seluruh\ sarana\ yang\ diperiksa}\ x\ 100\%$$

- Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi OBA =

$$\frac{(Jumlah\ kesimpulanb\ pengawasan\ sarana)}{Jumlah\ sarana\ yang\ selesai\ diperiksa/\ inspeksi}\ x\ 100\%$$

- Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana OBA=

$$\frac{(Jumlah\ tindaklanjut\ hasil\ pengawasan\ sarana\ yang\ sesuai\ dan\ tepat\ waktu)}{Jumlah\ seluruh\ tindaklanjut}\ x\ 100\%$$

C. Persentase Sarana Distribusi Kosmetik Yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Perhitungan diperoleh dari rata-rata terhadap komponen dibawah ini :

- Pelaksanaan inspeksi =

$$\frac{(Jumlah\ realisasi\ pengawasan\ sarana)}{Jumlah\ target\ tahunan}\ x\ 100\%$$

- Kelengkapan/ kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat =

$$\frac{(Jumlah\ sarana\ yang\ diperiksa\ dan\ dilaporkan\ tepat\ waktu)}{Jumlah\ sarana\ yang\ diperiksa}\ x\ 100\%$$

- Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi =

$$\frac{(Jumlah\ kesimpulan\ pengawasan\ sarana\ yang\ sesuai)}{Jumlah\ sarana\ yang\ selesai\ diperiksa}\ x\ 100\%$$

- Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana =

$$\frac{(Jumlah\ tindaklanjut\ hasil\ pengawasan\ \ sarana\ yang\ sesuai\ dan\ tepat\ waktu)}{Jumlah\ seluruh\ tindaklanjut}\ x\ 100\%$$

Hasil pengawasan yang dilakukan pada triwulan 1, telah dilakukan pemeriksaan di fasilitas distribusi dan pelayanan kefarmasian sebanyak 16 sarana, pemeriksaan distribusi obat bahan alam sebanyak 1 sarana dan distribusi kosmetika sebanyak 14 sarana. Indikator ini belum dapat dilakukan perhitungan capaian dikarenakan masih menunggu kepastian perhitungan IKU dari kedeputian terkait dan Biro Perencanaan BPOM.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.22

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahun 2025 IKU 9.

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian (%)	Kategori
Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,75	N/A	N/A	N/A

Realisasi indikator ini belum dapat dilakukan perbandingan dengan target 2025, dikarenakan masih menunggu kepastian perhitungan IKU dari kedeputian terkait dan Biro Perencanaan BPOM.

c. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Keberhasilan/ kegagalan pada pencapaian indikator ini belum dapat ditetapkan, dikarenakan perhitungan belum ada kepastian dari kedeputian terkait dan Biro Perencanaan BPOM, namun demikian dari definisi operasional IKU terkait, terdapat potensi kendala, yaitu :

1. Evaluasi kesesuian tindak lanjut yang diberikan oleh Balai Besar POM di Palembang tidak segera dievaluasi oleh BPOM pusat/ Kedeputian terkait sehingga menyebabkan rendahnya capaian

2. Pemahaman petugas pemeriksaan terhadap ketepatan tindak lanjut yang diberikan terhadap hasil pemeriksaan yang telah dilakukan termasuk penyampaian tindak lanjut ke sarana.

3. Ketepatan waktu penginputan hasil pemeriksaan sarana ke sistem SIPT, dimana menjadi salah satu faktur tercapaikan indikator ini.

d. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Belum dapat dilakukan analisis keberhasilan/ kegagalan pencapain kinerja pada Indikator Kinerja ini, dikarenakan perhitungan realisasi belum dapat dilakukan karena menunggu kepastian dari Kedeputian terkait dan Biro Perencanaan BPOM. Namun demikian, beberapa program yang dapat menjadi faktor pendukung, yaitu :

1. Sistem pelaporan (SIPT) menjadi salah satu faktor penting guna perhitungan pencapaian indikator ini, sehingga kehandalan sistem perlu dijamin oleh bagian terkait (Pusdatin).
2. Peningkatan kompetensi SDM pemeriksaan terkait fasilitas distribusi dan pelayanan kefarmasian sehingga pemeriksaan dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IK 10. Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.1.23
Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 IKU 10.

Indikator Kinerja	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian (%)	Notifikasi
Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100,00	125,00%	

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/ atau penyaluran Pangan Olahan

Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
2. Ketepatan waktu pelaporan
3. Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{Jumlah\ Sarana\ yang\ Diperiksa\ Sesuai\ Ketentuan}{Jumlah\ Sarana\ yang\ Diperiksa} \times 100\%$$

Keterangan:

- ✓ Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT

✓ Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen sebagai berikut: jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut (A+B+C), yaitu:

A : Pemenuhan target sarana distribusi yang diperiksa =

$$20\% \times \frac{Jumlah\ Sarana\ yang\ Diperiksa}{Target\ Jumlah\ Sarana\ yang\ Diperiksa} \times 100\%$$

B : Ketepatan tindak lanjut =

$$70\% \times \frac{Jumlah\ Sarana\ yang\ Ditindaktanjuti\ Sesuai\ Ketentuan}{Jumlah\ Sarana\ yang\ Diperiksa} \times 100\%$$

C : Kesesuaian waktu pelaporan =

$$10\% \times \frac{Jumlah\ Sarana\ yang\ Diperiksa\ dan\ Dilaporkan\ Tepat\ Waktu}{Jumlah\ Sarana\ yang\ Diperiksa} \times 100\%$$

Tabel 3.1.24
Kertas Kerja Triwulan I Tahun 2025 IKU 10.

Rencana Aksi	Target pemsar	Realisasi pemsar	% A	TL sesuai dan tepat waktu		% B	Ketepatan input SIPT		% C	Capaian A + B + C
				TL sesuai pedoman	TL tepat waktu		Sarana diperiksa	Input tepat waktu		
Sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan dilaporkan tepat waktu	22	22	20,00%	14	14	70,00%	22	22	10,00%	100,00%

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.25
Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahun 2025 IKU 10

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	100,00	125,00% ▲	Tercapai/ Melampaui

Berdasarkan data di atas bahwa realisasi terhadap target kinerja Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 100% dengan capaian sebesar 125% dan mendapat kategori Tercapai/ Melampaui. Balai Besar POM di Palembang akan tetap melakukan monitoring dan evaluasi agar dapat mempertahankan pencapaian target di triwulan selanjutnya.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

1. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam melakukan perbaikan terhadap hasil pemeriksaan sehingga temuan dapat menurun.
2. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat sebagai dampak pengawasan dan KIE yang telah dilakukan secara intensif dan berkelanjutan, termasuk aplikasi Cek BPOM dan tagline Cek KLIK sehingga temuan produk TMK di sarana distribusi semakin menurun.
3. Peningkatan kompetensi petugas dalam pengawasan di sarana distribusi Pangan Olahan

Rekomendasi perbaikan kinerja:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala tiap bulan
2. Sosialisasi kepada pelaku usaha distribusi pangan olahan terkait Cara Ritel Pangan yang Baik dan Peraturan BPOM terkait pengawasan pangan olahan
3. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Palembang kepada pelaku usaha sehingga meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

d. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan BBPOM di Palembang yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja antara lain :

1) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengawasan sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
2) Pemerataan kompetensi petugas melalui pelatihan berkelanjutan terkait pengawasan sarana distribusi pangan olahan

3) Sosialisasi peraturan terbaru rutin dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi kepada setiap personil di lingkungan Balai Besar POM di Palembang sebelum peraturan tersebut diberlakukan.

IK 11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.1.26

Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 IKU 11.

Indikator Kinerja	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian (%)	Notifikasi
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	80,09	99,13	123,77%	

Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan. Penilaian terhadap capaian iklan yang diawasi adalah mulai dari pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan

$$\boldsymbol{A = \frac{a+b}{2}}$$

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

$$a = \frac{Jumlah\ iklan\ yang\ selesai\ diawasi}{Jumlah\ target\ iklan\ yang\ diawasi\ sesuai\ renlak}\ x\ 100\%$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$b = \frac{Jumlah\ iklan\ yang\ dilaporkan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ target\ iklan\ yang\ diawasi}\ x\ 100\%$$

B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan

$$\boldsymbol{B = \text{Rata} - \text{rata}\ (a + b + c)}$$

a. Pemenuhan target pengawasan

$$a = \frac{Jumlah\ iklan\ yang\ selesai\ diawasi}{Jumlah\ target\ iklan\ yang\ diawasi\ sesuai\ renlak}\ x\ 100\%$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$b = \frac{Jumlah\ iklan\ yang\ dilaporkan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ target\ iklan\ yang\ diawasi}\ x\ 100\%$$

c. Akurasi pengambilan keputusan

$$c = \frac{Jumlah \text{ keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai}}{\text{jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}}\ x\ 100\%$$

C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan

$$\boldsymbol{C = Rata - rata\ (a + b + c)}$$

a. Pemenuhan target pengawasan

$$a = \frac{Jumlah\ iklan\ yang\ selesai\ diawasi}{Jumlah\ target\ iklan\ yang\ diawasi\ sesuai\ renlak}\ x\ 100\%$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$b = \frac{Jumlah\ iklan\ yang\ dilaporkan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ target\ iklan\ yang\ diawasi}\ x\ 100\%$$

c. Akurasi pengambilan keputusan

$$c = \frac{Jumlah \text{ keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai}}{\text{jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}}\ x\ 100\%$$

D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan

$$\boldsymbol{D = \frac{a + b}{2}}$$

a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target

$$a = \frac{\text{Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target}}{\text{jumlah media (sebanyak 4)}}\ x\ 100\%$$

- Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target

$$\%\ Capaian\ Pengawasan\ Iklan = \frac{\text{capaian jumlah iklan per media}}{\text{jumlah target per media}}\ x\ 100\%$$

Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu

$$b = \frac{\text{b1} + \text{b2}}{2}$$

- Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT (b1)

$$b1 = \frac{\text{Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu}}{\text{Jumlah iklan yang dievaluasi}} \; x\; 100\%$$

- Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat (b2)

$$b2 = \frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu}}{\text{Jumlah iklan yang dievaluasi}} \; x\; 100\%$$

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan

$$a = \frac{Jumlah\ iklan\ yang\ diawasi}{Jumlah\ target\ iklan\ yang\ diawasi\ sesuai\ renlak} \; x\; 40\%$$

b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling

$$b = \frac{(\text{Jumlah iklan yang diawasi per media iklan/Jumlah iklan yang diawasi})}{\text{Proporsi target media}} \; x\; 20\%$$

c. Ketepatan waktu pelaporan

$$c = \frac{Jumlah\ iklan\ yang\ dilaporkan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ target\ iklan\ yang\ diawasi} \; x\; 40\%$$

Catatan: poin a dan b, jika realisasi di atas target maka realisasi maksimal dihitung 100%.

Berikut adalah tabel kertas kerja untuk indikator kinerja persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan yang telah dilakukan selama triwulan I tahun 2025.

Tabel 3.1.27

Kertas Kerja Triwulan I Tahun 2025 IKU 11.

Nama Indikator	Bulan	Target Iklan	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Januari	61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Februari	132	100,00	100,00	100,00	100,00	94,17	98,83
	Maret	206	100,00	100,00	100,00	100,00	95,67	99,13

Pada triwulan I tahun 2025, semua iklan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kuasi, dan kosmetik dilakukan pengawasan sesuai dengan kategori iklan dan dilaporkan tepat waktu, sedangkan untuk iklan pangan dikarenakan surat edaran baru diterima UPT di akhir Februari 2025, sehingga pengawasan iklan pangan di Februari dan Maret tidak sesuai kategori iklan yang ditetapkan, yang mengakibatkan capaian iklan pangan hanya sebesar 95.67% di akhir triwulan I,

dan didapatkan realisasi pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan pada triwulan I sebesar 99,13% dan jika dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2025 sebesar 80,09%, sehingga capaian yang didapat sebesar 123,78% dengan kategori tidak dapat disimpulkan disebabkan karena penetapan target triwulan yang kecil. Hal ini dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2025 dan penetapan target didasarkan pada realisasi (capaian) hasil pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan di tahun 2024.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.28

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahun 2025 IKU 11.

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian (%)	Kategori
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	80,09	99,13	123,78% 	Tercapai/Melampui

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa realisasi terhadap target kinerja persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan di triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 99,13% dengan penetapan target indikator kinerja yang bersifat *flat* maka perbandingan dengan target tahunan juga menghasilkan capaian sebesar 123,78% dan mendapat kategori Tercapai/Melampaui. Balai Besar POM di Palembang akan tetap melakukan perbaikan yang berkesinambungan agar dapat mempertahankan pencapaian target di triwulan selanjutnya.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tercapainya target indikator kinerja persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

1) Mitigasi risiko terhadap potensi risiko kegagalan dalam melakukan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan telah dikendalikan melalui sosialisasi indikator kinerja termasuk perhitungan target dan capaian kepada seluruh personil yang bertanggung jawab terhadap pengawasan iklan, penetapan target iklan sesuai surat edaran yang telah ditetapkan oleh unit pengampu, dan penetapan timeline pelaporan iklan pada aplikasi SIPT kepada setiap tim yang akan melakukan pengawasan iklan.

2) Membuat evaluasi hasil pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan tahun 2024, sehingga kesalahan pengawasan iklan tidak terulang di tahun 2025.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

1) Peningkatan kompetensi petugas dalam pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan, yang merupakan salah satu bentuk mitigasi risiko terhadap potensi risiko tidak tercapainya indikator kinerja
2) Meningkatkan peran aktif petugas untuk mengambil iklan sediaan farmasi dan makanan saat sedang melakukan kegiatan pemeriksaan lainnya, sehingga bisa dijadikan bahan sebagai hasil pengawasan iklan di bulan tersebut

d. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan BBPOM di Palembang yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja antara lain :

1) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan berdasarkan surat edaran yang telah ditetapkan oleh unit pengampu
2) Pemerataan kompetensi petugas melalui pelatihan berkelanjutan terkait pengawasan iklan dan penandaan sediaan farmasi dan pangan olahan
3) Sosialisasi peraturan terbaru rutin dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi kepada setiap personil di lingkungan Balai Besar POM di Palembang sebelum peraturan tersebut diberlakukan

SK 2. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang

IK 12. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.1.29
Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 IKU 12.

Indikator Kinerja	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian (%)	Notifikasi
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	11,11	11,11	100,00%	

Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.

Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan).

Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025

$$\textbf{\textit{Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}} = \frac{Sarana\ Produksi\ Pangan\ Fortifikasi\ yang\ diperiksa\ dan\ ditindaklanjuti\ sesuai\ ketentuan}{Jumlah\ Sarana\ Produksi\ Pangan\ Fortifikasi\ Keseluruhan\ yang\ berada\ di\ wilayah\ UPT} \times 100\%$$

Keterangan:

*Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

*Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar.

Tabel 3.1.30
Kertas Kerja Triwulan I Tahun 2025 IKU 12.

No	Rencana Aksi	Target TW I	Realisasi TW I	Jumlah Sarana Produksi Fortifikasi	Capaian IKU TW I
1	Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2	2	18	11,11%

Pada TW I sebanyak 2 sarana produksi pangan fortifikasi yang menjadi target telah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Target bersifat kumulatif dengan sarana yang diperiksa. Terdapat perbedaan *baseline* data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 antara data pusat dan data UPT, di mana data pusat mencatat 18 sarana, sedangkan data UPT mencatat 14 sarana. Perbedaan ini telah disampaikan dalam diskusi bersama Unit Pengampu pada 22 Januari 2025. Namun demikian, pada penetapan IKU, *baseline* yang digunakan tetap mengacu pada data pusat. Setelah dilakukan klarifikasi lanjutan pada 14 April 2025, diketahui bahwa terdapat data ganda pada data pusat, sehingga jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang valid adalah 14 sarana. Apabila 14 sarana digunakan sebagai dasar perhitungan capaian kinerja, maka dapat diestimasikan capaian sebesar 78,57% pada akhir tahun 2025, yang secara signifikan melebihi target yang ditetapkan sebesar 61% sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam evaluasi kinerja.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.31
Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahun 2025 IKU 12.

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian (%)	Kategori
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	61,00	11,11	18,21%	Perlu Upaya Keras

Realisasi sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan BBPOM di Palembang Tahun 2025 TW I adalah 11,11%, Capaian ini terlihat masih jauh dari target tahunan namun penetapan target per triwulan sudah disesuaikan dengan analisi resiko sehingga kita tetap optimis tetap tercapai.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

1. Penentuan target sarana dilakukan berdasarkan analisa resiko
2. Kompetensi petugas dalam melakukan pengawasan memadai
3. Kepatuhan pelaku usaha dalam melakukan perbaikan berkesinambungan dan pemenuhan persyaratan CPPOB

Rekomendasi perbaikan kinerja:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala tiap bulan
2. Bimbingan Teknis terkait Pengawasan Pangan Fortifikasi untuk meningkatkan kompetensi SDM
3. Pendampingan kepada pelaku usaha baik secara langsung pada saat pemeriksaan maupun melalui desk CAPA

d. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan BBPOM di Palembang yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja antara lain :

1) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2) Pemerataan kompetensi petugas melalui pelatihan berkelanjutan terkait Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik
3) Sosialisasi peraturan terbaru secara rutin dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi kepada setiap personil di lingkungan Balai Besar POM di Palembang sebelum peraturan tersebut diberlakukan

SK 3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang

IK 13. Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan Badan POM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1. Balai Besar POM di Palembang termasuk dalam kelompok tingkat 3 bersama Balai Besar dan Balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Laboratorium tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM tingkat 3 terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:

1) Standar Ruang Lingkup;
2) Standar Peralatan;
3) Standar Kompetensi Laboratorium;
4) Standar Metode yang terverifikasi.

Cara perhitungan nilai pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3 sesuai dengan rumus:

$$(50\%\ x\ a) + (20\%\ x\ b) + (20\%\ xc) + (10\%\ x\ d)$$

dengan keterangan sebagai berikut :

a: Nilai pemenuhan SRL BB/ Balai POM

$$a = \frac{Rata - rata\ nilai\ pemenuhan\ SRL\ kimia +\ nilai\ pemenuhan\ SRL\ biologi}{2}$$

b: Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/ Balai POM

$$b = \frac{Nilai\ pemenuhan\ standar\ peralatan\ kimia + nilai\ pemenuhan\ Standar\ biologi}{2}$$

c: Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/ Balai POM

$$C = Jumlah\ dari\ nilai\ kompetensi\ laboratorium$$

d: Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/ Balai POM

$$d = rata - rata\ dari\ nilai\ standar\ MA\ terverifikasi$$

Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan sebagai pengampu indikator ini melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi sekaligus penilaian pemenuhan target SKL setiap triwulan. Tahapan kegiatan monitoring dan evaluasi ini diawali dengan BBPOM Palembang mengisi tools monev SKL dan menyertakan data dukung serta melaporkan kendala yang ditemui serta tindak lanjut penyelesaian kendala tersebut. PPOMN akan melakukan verifikasi terhadap data pengisian dan pengecekan data dukung dan dilakukan penilaian.
Dari hasil monev yang telah dilakukan oleh PPOMN diperoleh nilai SKL BBPOM di Palembang dapat dilihat pada tabel 3.1.54.

Tabel 3.1.32
Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 IKU 13.

Indikator Kinerja	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian (%)	Notifikasi
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL	62	67,90	109,52%	

Dari tabel di atas, capaian yang diperoleh sebesar 109,52% (sangat baik) dari target TW 1 sebesar 62 sedangkan realisasi yang diperoleh sebesar 67,9 dengan nilai pemenuhan tiap komponen sebagai berikut :

1. Nilai pemenuhan SRL = 78,2
2. Nilai pemenuhan Standar Peralatan = 81
3. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium = 50
4. Nilai pemenuhan standar metode analisis = 26,4

Dari keempat komponen tersebut dihitung menggunakan rumus di atas sehingga didapatkan nilai SKL TW 1.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahun 2025

Target nilai SKL tahun 2025 adalah sebesar 64,8 sedangkan realisasi TW 1 tahun 2025 sebesar 67,9 sehingga didapatkan capaian 104,78% (tercapai), dapat dilihat pada tabel 3.1.55

Tabel 3.1.33 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahun 2025 IKU 13.

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian (%)	Kategori
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL	64,80	67,90	104,78% ▲	Tercapai/Melampaui

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Capaian triwulan pada pemenuhan nilai SKL sebesar 109,52% (sangat baik) dan capaian tahunan sebesar 104,78% (tercapai), adapun beberapa penyebab keberhasilan capaian nilai SKL TW 1 adalah sebagai berikut :

1. Berkurangnya jumlah sampel akibat dari efisiensi anggaran menyebabkan penambahan verifikasi metode analisa pada beberapa laboratorium sehingga menambah nilai kompetensi dan capaian verifikasi MA.
2. Adanya pemanfaatan yang baik atas ketersediaan media reagensia, suku cadang, baku pembanding, penunjang laboratorium dan glassware untuk mendukung pengujian sampel laboratorium dan melakukan verifikasi metode analisa.
3. Adanya peran serta aktif dan dukungan personil untuk mengikuti pelatihan sehingga menambah kompetensi untuk melakukan pengujian dan pengelolaan laboratorium sesuai standar SKL
4. Dilakukannya monitoring secara berkala oleh PPOMN setiap triwulan sebagai pengingat dan dapat mendorong pencapaian indikator kinerja ini

d. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian antara lain :

1. Adanya perencanaan yang baik tentang pemenuhan ruang lingkup, pengadaan alat, pemenuhan kompetensi personil dan pemenuhan verifikasi metode analisa pada semua laboratorium.
2. Terpenuhinya roadmap terkait ruang lingkup, kompetensi personil dan verifikasi metode analisa.

3. Adanya sosialisasi dari PPPOMN tentang petunjuk pengisian tools monev SKL secara berkala untuk mengatasi kendala dan kesalahan dalam pengisian tools monev SKL.
4. Kegiatan monev yang dilakukan oleh PPOMN per triwulan untuk menjaga agar pencapaian indikator kinerja persentase pemenuhan laboratorium pengujian sesuai SKL untuk setiap BB/BPOM tetap on the track.
5. Monitoring dari penyelia dan ketua tim terkait tentang pengisian tools monev SKL.

SK 4. Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang

IK 14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Pada Tahun 2025, tingkat efektifitas kie terdiri dari 4 indikator penilaian yaitu aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE. Berikut adalah interpretasi skor indeks efektifitas KIE.

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif
75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif
95,01 – 100	Sangat efektif

Tabel 3.1.34

Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 IKU 14.

Indikator Kinerja	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian (%)	Notifikasi
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	89,09	96,66	108,50%	

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang pada Triwulan I 2025 sebesar 96,66 dengan target 89,09. Capaian yang didapatkan sebesar 108,50% dengan kategori sangat baik. Nilai indeks tersebut didapatkan berdasarkan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1.35

Indeks Surveii Tatap Muka

Indeks Survei TATAP MUKA (total responden : 125)	
Narasumber/Petugas	96.85
Konten/Informasi	96.267
Pemahaman Audiens	93.2
Manfaat	93.8
Indeks Tatap Muka	**95.029**

Tabel 3.1.36

Indeks Survei Media

Indeks Survei MEDIA (total responden : 25)	
Sumber Informasi	98.5
Konten/Informasi	98.667
Pemahaman Audiens	97
Manfaat	99
Indeks Media	**98.292**

Tabel 3.1.37

Nilai Indeks Efektifitas KIE

Jenis Indeks Efektifitas KIE	Nilai
Indeks Tatap Muka	95,029
Indeks Survei Media	98,292
Rata-rata	**96,66**

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.38

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahun 2025 IKU 14.

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian (%)	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	89,09	96,66	108,50% ▲	Melampaui

Target Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang Tahun 2025 adalah 89,09. Target tersebut sudah terlampaui pada triwulan I 2025 dengan nilai sebesar 96,66 sehingga didapatkan capaian sebesar 108,50%. Untuk target indeks sementara sudah tercapai, namun jumlah target responden selama 1 tahun belum tercapai, sehingga akan tetap dilakukan pemantauan sepanjang tahun 2025. Setiap triwulan perlu

dilakukan survei sesuai target responden yang telah ditetapkan baik untuk 1 tahun walaupun *breakdown* setiap triwulan.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Analisis pendukung keberhasilan :

a. Pemahaman indikator kinerja kepada anggota tim sehingga dapat bekerjasama dengan baik untuk mencapai target saat teknis di lapangan sesuai dengan pedoman.

Penyempurnaan Kinerja ke Depan :

a. Dilakukan pemahaman berulang terkait target indikator kinerja kepada petugas saat perencanaan kegiatan KIE
b. Survei efektifitas kie dapat dilakukan juga secara manual jika di tempat kegiatan untuk mengatasi hambatan tidak tersedia sinyal, internet atau faktor lainnya.

d. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja :

1. Materi KIE disesuaikan dengan permasalahan obat dan makanan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat setempat, sehingga peserta lebih tertarik dan lebih mudah memahami kie yang diberikan.
2. Penggunaan alat peraga seperti contoh sampel dapat juga membantu kegiatan kie untuk lebih menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat karena melihat contohnya langsung.
3. Perubahan indikator penilaian survei efektifitas kie pada tahun 2025 juga dapat menjadi faktor yang menunjang keberhasilan dengan indikator tahun sebelumnya yang berupa ragam kegiatan, pamahaman, minat, dan manfaat, telah diubah dengan indikator terkait penilaian narasumber/petugas, konten/informasi yang diberikan, pemahaman audiens, dan manfaat. Dari tahun sebelumnya, indikator “minat” mendapatkan nilai yang paling rendah dibandingkan indikator lainnya, dan mulai tahun 2025 ini indikator “minat” telah digantikan dengan indikator lain yang telah disesuaikan dengan teknis penilaian di lapangan.

IK 15. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.1.39

Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 IKU 15.

Indikator Kinerja	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian (%)	Notifikasi
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25	25,00	100,00%	

Persentase tahapan kegiatan yang terealisasi hanya sebesar 25% dari target TW II 2024 sebesar 25,00%. Capaian realisasi tersebut dapat dihitung sebesar 100% dengan kategori sangat baik. Dalam realisasinya, indikator ini terdiri dari beberapa tahapan kegiatan yang harus dilakukan sesuai petunjuk teknis dari direktorat pengampu yaitu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan BPOM RI. Indikator ini dapat mencapai target, jika seluruh tahapan telah dilaksanakan sampai 100% dengan pembobotan sebagai berikut :

Tabel 3.1.40

Bobot Penilian di Setiap Tahapan Kegiatan

No.	Tahapan Kegiatan	Pembobotan
1	Advokasi	25%
2	Sosialisasi Keamanan Pangan	20%
3	Bimtek Kader Keamanan Pangan	25%
4	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25%
5	Pengawalan	5%
Kumulatif Capaian		**100,0%**

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.41

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahun 2025 IKU 15.

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian (%)	Kategori
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100,00	25,00	25,00% 	Perlu upaya keras

Target Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman BBPOM di Palembang Tahun 2024 adalah sebesar 5 sekolah. Namun, untuk memantau realisasinya digunakan persentase tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan target akhir yaitu 100% yang artinya seluruh tahapan telah dilaksanakan. Persentase tahapan yang telah terlaksana hingga akhir Triwulan I 2025 adalah sebesar 25% sehingga masuk dalam kategori perlu upaya keras.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

1. Penetapan target persentase tahapan kegiatan setiap bulan dan triwulan sudah mempertimbangkan timeline dari unit pengampu
2. Lokus kab/kota yang dintervensi keamanan pangan tahun 2025 berada di area pengawasan Kota Palembang dengan jarak yang tidak jauh sehingga dapat dilakukan efisiensi waktu dan biaya.
3. Komitmen dari berbagai pihak terutama pemda, dinas pendidikan, dan tim sekolah yang akan diintervensi sangat baik

Rekomendasi perbaikan kinerja:

1. Tahapan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kerangka acuan dan timeline unit pengampu Direktorat PMPUPO.
2. Pelaporan kegiatan kepada unit pusat harus tepat waktu, sesuai format yang telah ditetapkan, dan kelengkapan data analisis yang diperlukan.
3. Adanya komitmen tertulis dari pemda dan lintas sektor terkait

d. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Dokumentasi Komitmen pemerintah daerah dan lintas sektor terkait saat kegiatan advokasi.
2. Perlu adanya inovasi yang berkaitan dengan kegiatan terpadu keamanan pangan, dan/atau optimalisasi inovasi yang telah ada.
3. Menjelaskan program keamanan PJAS secara jelas kepada pemda dan lintas sektor terkait untuk menekankan betapa pentingnya dan manfaat program ini

IK 16. Jumlah Desa Pangan Aman

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Jumlah desa dengan pangan aman yang diintervensi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang pada Tahun 2025 sejumlah 2 desa/kelurahan. Realisasi indikator ini terdiri dari beberapa tahapan kegiatan yang harus dilakukan sesuai petunjuk teknis dari direktorat pengampu yaitu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan BPOM RI. Indikator ini dapat mencapai target, jika seluruh tahapan telah dilaksanakan sampai 100% dengan pembobotan sebagai berikut :

No.	Tahapan	Pembobotan
1	Advokasi Kelembagaan Desa	25%
2	Pelatihan KKPD	25%
3	Bimtek Komunitas	20%
4	Monitoring dan Evaluasi	20%
5	Pengawalan	10%
Kumulatif Capaian		**100,0%**

Tabel 3.1.42

Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 IKU 16.

Indikator Kinerja	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian (%)	Notifikasi
Jumlah desa pangan aman	25	25	100,00%	

Kegiatan dimulai dari tahapan advokasi bersama pemerintah kabupaten/kota, lintas sektor terkait dan perangkat desa/kelurahan yang akan diintervensi. Kegiatan advokasi bersama lintas sektor terkait dan kelembagaan desa/kelurahan sudah dilaksanakan, realisasi sampai Triwulan I Tahun 2025 sebesar 25% sesuai dengan target, sehingga capaiannya sebesar 100% dengan kategori Baik.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.43

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahun 2025 IKU 16.

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian (%)	Kategori
Jumlah desa pangan aman	100,00	25,00	25,00% ▼	Perlu upaya keras

Target Desa Pangan Aman BBPOM di Palembang Tahun 2025 adalah sebesar 2 desa/kelurahan. Namun, untuk memantau realisasinya digunakan persentase tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan target akhir yaitu 100% yang artinya seluruh tahapan telah dilaksanakan. Persentase tahapan kegiatan yang terealisasi pada Triwulan I 2025 sebesar 25,00%, sehingga masih diperlukan upaya keras untuk mencapai target 1 tahun.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Analisis Pendukung Keberhasilan:

1. Penetapan target persentase tahapan kegiatan setiap bulan dan triwulan sudah mempertimbangkan timeline dari unit pengampu.
2. Lokus kab/kota yang dintervensi keamanan pangan Tahun 2025 berada di dalam Kota Palembang sehingga dapat menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran.
3. Sudah dilakukan penambahan anggota tim kerja fungsi infokom untuk menjalankan indikator kinerja ini, sehingga tugas dapat dibagi dengan baik sesuai beban kerja.

Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

1. Tahapan kegiatan selanjutnya tetap dilakukan pemantauan sehingga sesuai dengan kerangka acuan dan timeline unit pengampu Direktorat PMPUPO.
2. Pelaporan kegiatan kepada unit pusat harus tepat waktu, sesuai format yang telah ditetapkan, dan kelengkapan data analisis yang diperlukan.

3. Tahapan kegiatan fasilitasi dan intensifikasi pengawasan tetap dilakukan secara mandiri oleh kader keamanan pangan desa/kelurahan dengan pendampingan petugas walaupun tidak masuk dalam bobot penilaian.
4. Kegiatan GKPD akan bersinergi dengan kegiatan lainnya.

d. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan lintas sektor terkait untuk melakukan sinergi program keamanan pangan di desa/kelurahan bersama dengan program nasional lainnya.
2. Pemahaman Aplikasi GKPD online untuk pelaporan kegiatan ini telah diketahui oleh beberapa petugas sehingga ketepatan waktu pelaporan dapat dioptimalkan.
3. Perlu adanya inovasi yang berkaitan dengan kegiatan terpadu keamanan pangan, dan/atau optimalisasi inovasi yang telah ada.

IK 17. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) yang diintervensi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang pada Tahun 2025 sebanyak 1 pasar dengan capaian yang didapatkan sebesar 100,00%. Dalam realisasinya, indikator ini terdiri dari beberapa tahapan kegiatan yang harus dilakukan sesuai petunjuk teknis dari direktorat pengampu yaitu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan BPOM RI. Indikator ini dapat mencapai target, jika seluruh tahapan telah dilaksanakan sampai 100% dengan pembobotan sebagai berikut :

Tabel 3.1.44

Tabel Bobot Penilian berdasarkan Tahapan

No.	Tahapan	Pembobotan
1	Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	25%
2	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%
3	Sosialisasi Kampanye Pangan kepada Komunitas Pasar	20%
4	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring Evaluasi	20%
5	Pengawalan	10%
Kumulatif Capaian		**100,0%**

Kegiatan dimulai dari tahapan advokasi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota, lintas sektor terkait dan petugas pasar yang akan diintervensi. Pada tahun ini, kegiatan survei pasar tidak masuk dalam pembobotan penilaian tetapi tetap dilakukan bersamaan saat kegiatan advokasi dengan petugas pasar.

Tabel 3.1.45

Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 IKU 17.

Indikator Kinerja	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian (%)	Notifikasi
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	25	25	100,00%	

Kegiatan advokasi bersama lintas sektor terkait sudah dilaksanakan, realisasi sampai Triwulan I Tahun 2025 sebesar 25% sesuai dengan target, sehingga capaiannya sebesar 100% dengan kategori Baik.

Tabel 3.1.46

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahun 2025 IKU 17.

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian (%)	Kategori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100,00	25,00	25,00% ▼	Perlu upaya keras

Target Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas BBPOM di Palembang Tahun 2025 adalah 1 pasar. Namun, untuk memantau realisasinya digunakan persentase tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan target akhir yaitu 100% yang artinya seluruh tahapan telah dilaksanakan. Persentase tahapan kegiatan yang terealisasi pada Triwulan I 2025 sebesar 25,00%, sehingga masih diperlukan upaya keras untuk mencapai target 1 tahun.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Analisis Pendukung Keberhasilan:

1. Penetapan target persentase tahapan kegiatan setiap bulan dan triwulan sudah mempertimbangkan timeline dari unit pengampu.
2. Lokus kab/kota yang dintervensi keamanan pangan Tahun 2025 berada di dalam Kota Palembang sehingga dapat menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran.
3. Sudah dilakukan penambahan anggota tim kerja fungsi infokom untuk menjalankan indikator kinerja ini, sehingga tugas dapat dibagi dengan baik sesuai beban kerja.

Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

1. Tahapan kegiatan selanjutnya tetap dilakukan pemantauan sehingga sesuai dengan kerangka acuan dan timeline unit pengampu Direktorat PMPUPO.
2. Pelaporan kegiatan kepada unit pusat harus tepat waktu, sesuai format yang telah ditetapkan, dan kelengkapan data analisis yang diperlukan.
3. Pendampingan petugas pasar terkait pengambilan sampel pada tahap Pengawasan KP (Keamanan Pangan) dan Monitoring evaluasi.

c. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Pemahaman Aplikasi SiPAMAN untuk pelaporan kegiatan ini telah diketahui oleh beberapa petugas sehingga ketepatan waktu pelaporan dapat dioptimalkan.
2. Perlu adanya inovasi yang berkaitan dengan kegiatan terpadu keamanan pangan, dan/atau optimalisasi inovasi yang telah ada.

SK 5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

IK 18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Untuk perhitungan IKU UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/ atau IP CPPOB pangan olahan adalah UMKM yang memenuhi standar dan memiliki kriteria tertentu yaitu sebagai berikut.

UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

Kriteria UMKM yang didampingi:

Untuk UMK Pangan Olahan :

a) UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
b) UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

Untuk UMKM OBA:

1) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
2) *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/ atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
3) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;

4) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
5) UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
6) UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Untuk UMKM Kosmetik:

1) UMKM yang memproduksi kosmetik;
2) UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*);
3) UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
4) UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

Adapun perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut

Persentase IMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/ atau IP-CPPOB=

$$\frac{(A+B+C)}{3}$$

$$A=\frac{(Jumlah\ UMK\ Pangan\ Olahan\ yang\ memperoleh\ IP-CPPOB)}{Jumlah\ UMK\ Pangan\ Olahan\ yang\ didampingi\ pada\ tahun\ berjalan}\ x\ 100\%$$

$$B=\frac{(Jumlah\ rekomendasi\ sertifikat\ CPOTB\ Bertahap)}{Jumlah\ UMKM\ OBA\ yang\ didampingi\ pada\ tahun\ berjalan}\ x\ 100\%$$

$$C=\frac{(Jumlah\ rekomendasi\ SPA\ CPKB)}{Jumlah\ UMKM\ Kosmetik\ yang\ didampingi\ pada\ tahun\ berjalan}\ x\ 100\%$$

Pada triwulan I tahun 2025 bahwa IKU ini terealisasi sebesar 17,78% dari target sebesar 15% yang artinya capaian sebesar 118,53% dimana capaian tahapan sudah pada penetapan target UMKM yang akan dilakukan Bimtek dan pendampingan sarana UMKM pangan olahan oleh petugas.

Tabel 3.1.47

Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 IKU 18.

Indikator Kinerja	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian (%)	Notifikasi
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/ atau IP CPPOB pangan olahan	15	17,78	118,53%	

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahun 2025

Target indikator kinerja ini sebagaimana yang tercantum pada dokumen reviu renstra Tahun 2025-2029 BBPOM di Palembang yaitu sebesar 81,70%. Untuk perbandingan antara realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 dan target tahun 2025 adalah sebesar 17,78% dari target tahunan 81,70% dimana capaian sebesar 21,76% dengan kategori perlu upaya keras. Balai Besar POM di Palembang akan tetap melakukan perbaikan yang berkesinambungan agar dapat meningkatkan pencapaian target di triwulan selanjutnya.

Tabel 3.1.48

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahun 2025 IKU 18.

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian (%)	Kategori
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	81,70	17,78	21,76%	Perlu upaya keras

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Secara keseluruhan kegiatan pendampingan pada triwulan I sudah sesuai target, Secara umum produsen Pangan Olahan yang wajib izin edar Badan POM sudah mulai banyak, namun masih terbatas untuk produsen OBA dan produsen Kosmetik. Kesadaran pelaku usaha pangan olahan untuk mendaftarkan produknya ke BPOM sudah mulai banyak. Petugas BBPOM di Palembang terus melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait seperti Dinkes kabupaten/ kota, Dinas Koperasi dan UMKM untuk menggali potensi pelaku usaha yang layak didaftarkan produknya menjadi MD dan juga memberikan informasi langsung dari masyarakat dan media sosial. selain itu.

Selain itu untuk menunjang keberhasilan IKU adalah sebagai berikut:

1. Adanya pembobotan penilaian setiap tahapan terhadap UMK yang didampingi dalam pemenuhan standar.
2. Telah dilaksanakan penetapan target UMKM yang akan dilakukan Bimtek dan yang akan didampingi sesuai dengan juknis yang ada.
3. Tersedianya sarana permohonan bagi pelaku usaha yang memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan pendampingan yaitu Permohonan Pendampingan dalam pEMenuhan Persyaratan PErizinan produK (PEMPPEK) pada link https://bit.ly/PermohonanPEMPPEK
4. Beberapa UMK yang ditargetkan telah didampingi sepanjang triwulan 1 yaitu sebanyak 7 (tujuh) sarana UMKM pangan olahan
5. Makin meningkatkannya kesadaran pelaku usaha untuk mengurus perijinan produknya ke BPOM terutama UMKM pangan olahan
6. Meningkatnya jumlah SDM dan kompetensi petugas sertifikasi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat lebih optimal dalam pendampingan kepada UMKM
7. Tersedia sarana prasarana seperti laptop dan printer dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sertifikasi

Rekomendasi perbaikan kinerja:

1. Melakukan pendekatan dan pencarian informasi sarana yang layak untuk didaftarkan /di upgrade menjadi MD
2. Agar secara aktif mensosialisasikan link https://bit.ly/PermohonanPEMPPEK kepada pelaku usaha/masyarakat melalui media sosial Balai
3. Terus meningkatkan koordinasi kepada lintas sektor terkait untuk peningkatan UMKM dalam penerapan CPPOB.

d. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan

Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Peningkatan kompetensi petugas melalui kegiatan pelatihan/ bimbingan teknis dalam rangka pendampingan UMK.
2. Pelaksanaan desk CAPA pada pelaku usaha untuk percepatan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan dalam rangka penerbitan rekomendasi.
3. Pelaksanaan Bimbingan Teknis terhadap UMK yang akan di dampingi.
4. Pendampingan secara berkesinambungan.

SK 6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang

IK 19. Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.1.49

Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 IKU 19.

Indikator Kinerja	Target TW 1 2025	Realisasi TW 1 2025	Capaian	Kategori
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	32,00%	33,33%	**104,16%**	

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 Indikator Kinerja utama, yaitu Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Penindakan merupakan serangkaian kegiatan yang diawali dari penyelidikan atau kegiatan intelijen hingga penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUndang-Undangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM diberikan kewenangan melakukan penyidikan pelanggaran terhadap 7 Undang-Undang yaitu: UU no 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, UU no 18 tahun 2012 tentang Pangan, UU no. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, UU no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU no 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penyidikan menurut UU no 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

SPDP sebesar 15% $A = \frac{a+b+c+d}{jumlah\ perkara}$

Tahap I sebesar 40% $B = \frac{b+c+d}{jumlah\ perkara}$

P21 sebesar 30%, dan $C = \frac{c+d}{jumlah\ perkara}$

Tahap 2 sebesar 15% -- nilai $D = \frac{d}{jumlah\ perkara}$

Nilai Tingkat Keberhasilan =

$$(15\%\ x\ A) + (40\%\ x\ B) + (30\%\ x\ C) + (15\%\ x\ D) x \frac{Jumlah\ Capaian}{Target\ Perkara}$$

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara *carry over*. Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Pada tahun 2025 PPNS Balai Besar POM di Palembang memiliki target 3 tahun berjalan dan 9 perkara *carry over* sebagai berikut:

Perkara tahun berjalan:

1. Belum ada realisasi perkara tahun berjalan Perkara *carry over*:
2. SPDP sebanyak 5 perkara
3. Tahap 1 sebanyak 1 perkara
4. P21 sebanyak 2 perkara
5. Penyerahan tahap 2 (penyerahan tersangka dan barang bukti) sebanyak 1 perkara

Berikut adalah tabel perhitungan persentase keberhasilan penindakan kejahatan dibidang obat dan makanan triwulan 1 tahun 2025 berdasarkan posisi tahapan dan pembobotan seperti tersebut diatas.

Tabel 3.1.50

Kertas Kerja Triwulan I Tahun 2025 IKU 19

Tahapan	Maret						
	Target		Realisasi		Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi
	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over			
SPDP	3	9		5	0,15	0,75	33,33
Tahap I				1	0,55	0,55	
P21				2	0,85	1,7	
Tahap II				1	1	1	
Total	3	9	0	9			

(i)	Diisi Sesuai Target DIPA, Dapat Berubah Apabila Realisasi Telah Melebihi Target, Maka Diisi Sesuai Realisasi
(ii)	Target Perkara carryover merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1 (Perkara carry over dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO)
(iii)	Diisi Angka Sesuai Realisasi
(iv)	Realisasi Perkara Carry over diisi dengan seluruh carry over yang ada sesuai pada poin (ii), diisi dengan posisi realisasi terakhir perkara pada bulan tsb
(v)	Tidak Perlu Diisi
(vi)	Capaian RAPK (Tidak Perlu Diisi)

Berdasarkan perhitungan kertas kerja untukk indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang triwulan I 2025 adalah 33,33% dari target sebesar 33,00% sehingga capaian yang diperoleh pada triwulan I 2025 sebesar 104,16% dengan kategori sangat baik.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.51

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahun 2025 IKU 19.

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian (%)	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai Besar POM di Palembang	74,00	33,33	45,04%	**Perlu Upaya Keras**

Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang triwulan I 2025 adalah 33,33% dari target tahun 2025 sebesar 74,00% sehingga capaian yang diperoleh pada triwulan I 2025 sebesar 45,04% dengan kategori perlu upaya keras Realisasi triwulan I ini masih jauh dari target namun dengan upaya keras pelaksanaan tugas pada triwulan-triwulan berikutnya diikuti dengan selalu monitoring dan evaluasi, target tahunan 2025 optimis dapat dicapai.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Target kinerja TW 1 2025 tercapai, namun apabila dibandingkan dengan target sasaran kegiatan tahun 2025, capaian yang telah diperoleh masih sangat kurang. Sehingga untuk kedepannya tetap perlu adanya kewaspadaan dan harus selalu dilakukan monitoring dan evaluasi. Beberapa faktor yang berpengaruh pada keberhasilan capaian kinerja TW 1 antara lain:

- Adanya perkara carry over yang dapat mencapai tahap penyerahan tahap 2 di triwulan I.

- Adanya kerjasama yang baik antar personil di Fungsi Penindakan BBPOM di Palembang serta dengan Korwas PPNS Polda Sumsel, JPU di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan bagian penerimaan tersangka dan barang bukti di Kejaksaan Negeri Palembang.
- Sikap kooperatif dari tersangka yang memenuhi panggilan PPNS BBPOM di Palembang tepat waktu untuk penyerahan tahap 2.
- Memastikan aktifitas pengendalian risiko dapat dilaksanakan dengan baik.

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Kegiatan koordinasi dengan Korwas PPNS Polda Sumatera Selatan, JPU di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan serta Bagian Penerimaan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti di Kejaksaan Negera Palembang.
- Upaya persuasif kepada tersangka untuk selalu kooperatif memenuhi panggilan PPNS BBPOM di Palembang.
- Monitoring risk register terhadap pelaksanaan kegiatan di Fungsi Penyidikan
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang rutin dilaksanakan.

SK 7. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Palembang

IK 20. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

Apabila dirinci lebih lanjut maka indikator kinerja ini, terdiri dari 3 macam kegitan; Persentase Laporan Patroli Siber dan Analisa Penjejakan Digital Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dilaporkan tepat waktu yang memiliki bobot 50, 00 % dari total nilai 100, 00%, Persentase Kualitas Laporan Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Sediaan Farmasi dan pangan Olahan yang memiliki bobot 25, 00 % dari total nilai 100, 00%, dan Persentase Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Sediaan Farmasi dan pangan Olahan yang memiliki bobot 25, 00 % dari total nilai 100, 00%.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Realisasi persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar di Balai Besar POM di Palembang triwulan I 2025 adalah 50,00% dari target sebesar 12,00% sehingga capaian yang diperoleh pada triwulan I 2025 sebesar 416,67% dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Lonjakan capaian indikator ini disebabkan karena penetapan target hingga triwulan I 2025 masih menyesuaikan Manual IKU per 14 Mei 2025 yang pada kolom cara dan formula perhitungan terdapat keterangan sebagai berikut :

“Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun”.

Setelah berkonsultasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM telah dilakukan perubahan Manual IKU pada 15 Mei 2025 oleh Unit Pengampu. Sehingga, target B4 hingga B11 telah dilakukan revisi sesuai surat usulan Kepala Balai Besar POM di Palembang No. B-PR.07.02.5A.05.25.643 Tanggal 15 Mei 2025 yang telah disepakati oleh Biro Perencanaan dan Keuangan melalui surat Kepala Biro No. B-PR.07.21.05.25.143 tanggal 16 Mei 2025. Namun demikian, target pada triwulan I masih sesuai dengan penetapan awal dikarenakan periode pelaporan triwulan I telah dilaksanakan sebelum usulan perubahan target.

Untuk lebih singkatnya perbandingan target dan realisasi Triwulan I dapat dilihat pada tabel 3.1.52

Tabel 3.1.52
Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 IKU 20.

Indikator Kinerja	Target TW 1 2025	Realisasi TW 1 2025	Capaian	Kategori
Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	12,50%	50,00%	**416,67%**	

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahun 2025

Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar di Balai Besar POM di Palembang triwulan I 2025 adalah 12,50% dari target tahun 2025 sebesar 90,00% sehingga capaian yang diperoleh pada triwulan I 2025 sebesar 13,89%. Capaian yang masih rendah dibandingkan dengan target Tahun 2025 terjadi karena penyumbang nilai yang dapat dan telah dilaksanakan adalah terkait Persentase Laporan Patroli Siber dan Analisa Penjejakan Dijital Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dilaporkan tepat waktu yang hanya memiliki bobot 5,00% dibagi total jumlah laporan selama setahun sebanyak 12 (dua belas) laporan sepanjang tahun 2025. Sedangkan 2 (dua) kegiatan lain yaitu persentase Kualitas Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Sediaan Farmasi dan pangan Olahan dan Persentase Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Sediaan Farmasi dan pangan Olahan ditargetkan diselesaikan di akhir tahun 2025.

Tabel 3.1.53
Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahun 2025 IKU 20.

Pencapaian Indikator Kinerja Triwulan 1 Tahun 2025	Target 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian (%)	Kategori
Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	50,00	55,56%	Perlu Upaya Keras

Capaian triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025 apabila dikategorikan masih perlu upaya keras namun dengan pelaksanaan tugas dengan upaya keras pada triwulan-triwulan berikutnya diikuti dengan selalu monitoring dan evaluasi, target tahunan 2025 masih optimis dapat dicapai.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Target kinerja TW 1 2025 tercapai, namun apabila dibandingkan dengan target Sasaran Kegiatan Tahun 2025 capaian yang telah diperoleh masih perlu upaya keras. Untuk kedepannya tetap perlu adanya kewaspadaan dan harus selalu dilakukan monitoring dan evaluasi, karena ada kemungkinan kegagalan yang bisa terjadi disebabkan beberapa faktor, antara lain:

- Laporan Patroli Siber dan Analisa Penjejakan Dijital Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tidak dilaporkan dan/atau dilaporkan tepat waktu melebihi batas pelaporan tanggal 25 setiap bulannya.
- Laporan Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Sediaan Farmasi dan pangan Olahan tidak dapat diselesaikan atau Laporan Analisis diselesaikan namun tidak memenuhi standar yang ditetapkan sehingga pada penilaian beresiko mendapatkan nilai yang kurang sehingga target persentase 92,00% tidak tercapai.
- Rekomendasi Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Sediaan Farmasi dan pangan Olahan tidak dapat ditindaklanjuti dan dilaporkan dan/atau jumlah yang ditindaklanjuti dan dilaporkan tidak mencapai target sebesar 68,00% dari seluruh rekomendasi yang disampaikan.
- Keterbatasan personil dan kemampuan serta minimnya anggaran yang tersedia dalam melaksanakan patroli siber, penjejakan dijital, penulisan analisis kerawanan kejahatan dan pelaksanaan tindak lanjut terhadap rekomendasi analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- Pelaku kejahatan di dunia maya, masih sulit ditelusuri lokasinya, dikarenakan informasi di e-commerce tidak lengkap.

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Membuat Pengingat setiap tanggal 20 tiap bulannya untuk memastikan Laporan Patroli Siber dan Analisa Penjejakan Digital Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

dilaporkan dan/atau dilaporkan tepat waktu, tidakmelebihi batas pelaporan tanggal 25 setiap bulannya.

- Melakukan persiapan, perencanaan dan pengumpulan bahan, data, fakta informasi dan keterangan yang dibutuhkan sehingga Laporan Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Sediaan Farmasi dan pangan Olahan tidak dapat diselesaikan dan Laporan Analisis diselesaikan memenuhi standar yang ditetapkan sehingga pada penilaian beresiko mendapatkan nilai yang sesuai / mencapai target yang ditetapkan.
- Rekomendasi Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Sediaan Farmasi dan pangan Olahan tidak dapat dimonitor, dan segera disampaikan ke pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti dan mengumpulkan hasil tindak lanjut dan segera melaporkan, sehingga jumlah yang ditindaklanjuti dan dilaporkan lebih dari mencapai target yang ditetapkan sebesar 68,00% dari seluruh rekomendasi yang disampaikan.
- Memaksimalkan penggunaan peralatan, aplikasi, teknologi dan pendukung laiinya yang dimiliki meskipun terbatas atau melaksanakan secara manual-sederhana dalam pelaksanaan patroli siber ataupun penjejakan dijital.
- Membentuk jejaring komunikasi dengan instansi terkait guna memperoleh bahan, data, fakta informasi dan keterangan yang dibutuhkan untuk Laporan Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Sediaan Farmasi dan pangan Olahan.
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang rutin dilaksanakan.

SK 8. Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang yang prima

IK 21. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palembang

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.1.54

Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 IKU 21.

Indikator Kinerja	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian (%)	Notifikasi
Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palembang	N/A	N/A	Diukur Akhir Tahun	N/A

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
2) Profesionalitas SDM (25%);
3) Sarana Prasarana (18%);
4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
6) Inovasi (12%).

Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi.
Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03.
Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup *(Dengan Catatan)*
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik *(Dengan Catatan)*
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Progres realisasi indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) sampai dengan akhir triwulan 1 adalah pada 6 (enam) aspek adalah sebagai berikut:

1) Kebijakan Pelayanan:
   a. Standar Pelayanan 2025 yang memenuhi 14 komponen sudah disahkan oleh Kepala BBPOM di Palembang dan sudah dipublikasikan
   b. Maklumat pelayanan sudah ditetapkan dan dipublikasikan
   c. Sudah dilakukan survei kepuasan masyarakat secara mandiri oleh BBPOM di Palembang pada triwulan 1 dengan hasil 95,77 (sangat baik). Survei ini meliputi 9 unsur yaitu persyaratan; sistem, mekanisme dan prosedur; waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk spesifikasi jenis pelayanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; penanganan pengaduan, saran dan masukan; serta sarana dan prasarana. Hasil survei tersebut sudah dipublikasikan.
2) Profesionalitas SDM:
   a. Waktu pelayanan telah ditetapkan, dituangkan dalam Standar Pelayanan dan dipublikasikan
   b. Telah dilakukan penetapan Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi oleh Kepala BBPOM di Palembang melalui SK nomor HK.02.02.5A.01.25.010 tahun 2025 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang tahun 2025
   c. Telah dilakukan penetapan kriteria penghargaan bagi pegawai pelaksana layanan melalui SK nomor HK.02.02.5A.01.25.010 tahun 2025 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang tahun 2025
3) Sarana Prasarana
   a. Sudah dilakukan pengajuan penambahan sarana dan prasarana untuk pengguna layanan berkebutuhan khusus, namun karena efisiensi anggaran sampai dengan akhir triwulan 1 penambahan sarana dan prasarana tersebut belum dapat direalisasikan
   b. Dilakukan monev secara berkelanjutan terhadap pemenuhan sarana dan prasarana, dan sudah dilakukan pengajuan usulan perbaikan saat terjadi kerusakan pada sarana dan prasarana penunjang pelayanan yang mengalami kerusakan, namun masih ada beberapa sarana penunjang pelayanan yang mengalami kerusakan pada triwulan 1 dan belum dapat diperbaiki.
4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)
   a. Telah dilaksanakan penggunaan sistem pelayanan publik secara online

b. Dilakukan pemutakhiran data dan informasi terkait layanan di kanal digital

5) Konsultasi dan Pengaduan

a. Telah disediakan layanan konsultasi dan pengaduan yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media digital
b. Pengaduan dan layanan informasi konsumen selama triwulan 1 berjumlah 23 orang, seluruhnya (100%) sudah ditindaklanjuti dengan status close, serta sudah dilaporkan melalui https://simpellpk.pom.go.id/

6) Inovasi

a. Inovasi AMPERA dan PEMPPEK dilaksanakan selama triwulan 1 serta dilakukan monitoring dan evaluasi

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.55

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahun 2025 IKU 21.

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian (%)	Kategori
Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palembang	4,70	N/A	N/A	N/A

Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dan nilai akan keluar di akhir tahun, sehingga pada triwulan I belum dapat dibandingkan dengan target tahunan.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

1. Adanya komitmen pimpinan, petugas pemberi layanan dan seluruh pegawai BBPOM di Palembang untuk mewujudkan pelayanan prima
2. Pemanfaatan teknologi digital dalam pemberian layanan seperti pemberian layanan informasi dan pengaduan melalui whatsapp, penggunaan media sosial instagram, facebook, X, serta pemanfaatan subsite BBPOM di Palembang.

Rekomendasi perbaikan kinerja:

1. Inovasi terkait pelayanan publik lebih ditingkatkan dan disebarluaskan sehingga lebih dikenal oleh masyarakat dan lebih besar manfaat yang dirasakan

d. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Indikator Kinerja

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian indikator kinerja indeks pelayanan publik pada BBPOM di Palembang pada triwulan 1 tahun 2025:

1. Peningkatan kompetensi petugas pemberi layanan publik
   Pada triwulan 1 tahun 2025 telah dilakukan peningkatan kompetensi petugas pemberi layanan publik yang baru secara online melalui IDEAS
2. Survei kepuasan masyarakat yang dilakukan selama triwulan 1 tahun 2025. Melalui survei ini diketahui unsur-unsur pelayanan apa saja yang masih perlu dilakukan peningkatan, serta saran/masukan dari penerima layanan yang dapat ditindaklanjuti untuk peningkatan kualitas layanan publik
3. Pelaksanaan dan pengembangan inovasi AMPERA dan PEMPPEK

SK 9. Terwujudnya tata kelola pemerintah di lingkup Balai Besar POM di Palembang yang optimal

IK 22. Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Palembang

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.1.56

Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 IKU 22.

Indikator Kinerja	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian (%)	Notifikasi
Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Palembang	N/A	N/A	Diukur Akhir Tahun	N/A

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan *self-assessment* dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I.

Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu:

No.	Komponen Pengungkit	Bobot
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

No.	Komponen Hasil	Bobot
1	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	22,5%
2	Pelayanan Publik yang Prima	17,5%

Sampai dengan akhir triwulan 1 sudah dilakukan pemenuhan LKE dengan progress sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan:

a. Penyusunan Tim Kerja:
   - Telah dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) yang beranggotakan seluruh pegawai BBPOM di Palembang
   - Telah tersedia mekanisme penentuan dan pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dalam rangka Pembangunan ZI

b. Rencana Pembangunan Zona Integritas:
   - BBPOM di Palembang telah menyusun Dokumen Rencana Kerja dan Program Prioritas Tahun 2025
   - Sosialisasi Pembangunan ZI kepada internal seluruh pegawai maupun *stakeholder* melalui media sosial atau aktivitas interaktif lainnya telah dilakukan secara berkala.
   - Contoh kegiatan sosialisasi internal adalah apel pagi setiap hari kamis dan kuis RB setiap triwulan; sementara sosialisasi eksternal dijalankan melalui media sosial (WhatApp, Instagram, Facebook) dan Ruang Pelayanan Publik BBPOM di Palembang

c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM:
   - Seluruh kegiatan Pembangunan ZI pada Rencana Kerja (Renja) telah ditetapkan & dipastikan terlaksana sesuai target melalui monitoring dan evaluasi secara berkala setiap tiga bulan sekali
   - Hasil Monitoring dan Evaluasi Triwulan setiap rencana aksi telah ditindaklanjuti

d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja:
   - Pimpinan BBPOM di Palembang telah berperan sebagai *role model* dalam bentuk penegakan integritas
   - BBPOM di Palembang telah menetapkan 9 (sembilan) agen perubahan dengan 10 (sepuluh) rencana aksi yang diharapkan berkontribusi terhadap perubahan
   - Telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir perubahan melalui sosialisasi pembangunan ZI internal dan eksternal yang dilaksanakan secara berkala
   - Organisasi telah melibatkan semua anggota mulai dari perencanaan hingga evaluasi pada semua program pembangunan ZI

2. Penataan Tatalaksana:

Penataan tata laksana mencakup berbagai aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja di BBPOM di Palembang, menuju Zona Integritas (ZI) dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Bebas dari Gratifikasi (WBGF). Aktivitas ini meliputi penyusunan peta proses bisnis, SOP, internalisasi, dan evaluasi SOP, serta penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan proses manajemen.

Berikut adalah beberapa aktivitas utama dalam penataan tata laksana:

a. Penyusunan Peta Proses Bisnis:

Peta proses bisnis BBPOM di Palembang mengacu pada peta proses bisnis Badan POM.

b. Penyusunan dan Penerapan SOP:
   - Membuat SOP Mikro yang mengacu pada bisnis proses, SOP turunan dari pusat, dan SOP inovasi.
   - Mengimplementasikan SOP melalui pelatihan, internalisasi, dan pengumuman.
   - Melakukan kaji ulang SOP mikro untuk memastikan kesesuaian dengan proses bisnis dan mengikuti perubahan dan perkembangan teknologi.

c. Internalisasi dan Peningkatan Kesadaran:
   - Menginternalisasikan SOP makro dan SOP mikro melalui berbagai cara, seperti apel pagi, tatap muka, website, dan media sosial;
   - Meningkatkan kesadaran dan pemahaman pegawai tentang standar operasional prosedur.

d. Penggunaan Teknologi Informasi:
   - Menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, dan aplikasi.
   - Menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen.
   - Implementasi penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik di BBPOM di Palembang dengan membangun dan mengembangkan Portal Aplikasi Kito sebuah inovasi yang memudahkan pegawai untuk mengakses seluruh aplikasi / inovasi baik internal maupun eksternal BBPOM di Palembang.

e. Keterbukaan Informasi Publik:
   - Menerapkan keterbukaan informasi publik terkait persyaratan, alur, dan biaya layanan melalui spanduk, website, dan media sosial;
   - Memastikan informasi publik mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.

3. Penataan Sistem Manajemen SDM:

   a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
      - Telah tersusun kebutuhan pegawai sesuai dengan peta jabatan dan hasil analisisi beban kerja (ABK) untuk masing-masing jabatan;
      - Penempatan pegawai BBPOM di Palembang telah mengacu pada kebutuhan pegawai sesuai jabatan;
      - Telah dilakukan monitoring dan evaluasi SKP setiap pegawai sebagai perbaikan terhadap kinerja unit kerja

   b. Pola Mutasi Internal

- Mutasi pegawai sudah dilakukan dengan mengacu pada Mekanisme Pola Rotasi dan Mutasi Pegawai dengan memperhatikan kompetensi jabatan
- Telah dilakukan monitoring dan evaluasi enam bulan setelah penempatan terhadap pegawai yang dimutasi

c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
- BBPOM di Palembang telah melakukan *Training Need Analysis* untuk pengembangan kompetensi pegawai;
- Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi setiap tiga bulan melalui penggunaan aplikasi MAKSUBA

d. Penetapan Kinerja Individu
- Telah dilakukan pengukuran kinerja individu berdasarkan capaian terhadap indikator kinerja secara periodik;
- Penilaian kinerja individu dijadikan dasar untuk pemberian *reward* Employee of the Month (EoM) dan Pengembangan Karir Pegawai

e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
- BBPOM di Palembang telah mengimplementasikan pemberian sanksi melalui beberapa dokumen

f. Sistem Informasi Kepegawaian
- BBPOM di Palembang telah melakukan pemutakhiran data pegawai secara berkala melalui akun masing-masing individu

4. Penguatan Akuntabilitas:

a. Keterlibatan Pimpinan

Pimpinan sudah selalu terlibat dalam seluruh tahapan perencanaan perencanaan, terlibat langsung juga dalam penyusunan penetapan kinerja, serta memantau pencapaian kinerja secara berkala. Beberapa kegiatan tersebut antara lain adalah memimpin rapat penetapan kinerja, memimpin rapat penyusunan renstra dan memimpin rapat rencana PoA dan anggaran. pencapaian kinerja selalu dipantau oleh pimpinan dengan melakukan rapat monitoring dan evaluasi setiap awal bulan.

b. Pengelolaan akuntabilitas kinerja

Dokumen perencanaan kinerja sudah dimiliki, seperti Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja. Laporan kinerja sudah disusun dengan tepat waktu.

5. Penguatan Pengawasan:

a. Implementasi Pengendalian dan Gratifikasi

Pengendalian gratifikasi di lingkungan BBPOM di Palembang dilakukan dengan cara *public campaign* kepada seluruh karyawan pada saat apel pagi dan pada media sosial setiap bulannya kepada masyarakat. Pengendalian gratifikasi juga dilakukan menjelang hari raya keagamaan yaitu hari raya Idul Fitri dimana BBPOM di palembang menerbitkan surat edaran terkait gratifikasi kepada lintas sektor dan pelaku usaha; selain itu kepada karyawan diterbitkan memorandum gratifikasi.

Selain itu pula, untuk menunjang keberhasilan kegiatan juga telah diterbitkan SK Tim Pengendali Gratifikasi dan setiap bulan serta triwulan dilakukan monitoring dan evaluasinya. Pada triwulan ini untuk penolakan gratifikasi ada sebanyak 1 (satu) pengaduan penolakan gratifikasi dan telah ditindaklanjuti di sangintegritas.

b. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Proses manajemen risiko meliputi beberapa tahap, tahap awal yaitu mengidentifikasi risiko kemudian melakukan komponen penting yaitu melaporkan manajemen resiko dengan tepat waktu. Kedua tahap pertengahan, yaitu melengkapi justifikasi mengapa kita memberikan level – level resiko untuk pedoman bagaimana kita menentukan level resiko sudah disiapkan oleh tim. Kemudian melakukan pengujian aktifitas penggalian, belum dilaksanakan secara konsisten untuk tiap fungsi yang memiliki level 16 keatas, sedangkan untuk level resiko dibawah 16 tidak wajib melakukan penggalian pengujian.

Untuk penerapan SPIP pada triwulan ini adalah dengan diterbitkannya SK Satgas SPIP Balai pada awal tahun, telah dilakukan sosialisasi pada saat apel dan pada media sosial balai setiap bulan, telah dilakukan pemantauan risiko setiap triwulan oleh masing-masing fungsi. Telah dibuat Risk Register, Rencana Tindakan Pengendalian, dan Tindakan Pemantauan untuk triwulan 1 2025.

c. Pengaduan Masyarakat

Pengaduan Masyarakat disini terkait dengan *Fraud*. *Fraud* adalah tindakan penipuan atau kecurangan yang disengaja dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau merugikan pihak lain. Tindakan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan sektor, seperti bisnis, keuangan, dan kehidupan sehari-hari. Dampak fraud dapat menyebabkan kerugian finansial dan merusak reputasi organisasi.

Untuk implementasi sampai dengan triwulan I 2025 adalah telah dibuat SK tim pengelola pengaduan masyarakat dan telah tersedia SOP pengaduan masyarakat, public compaign kepada karyawan pada saat apel dan sosialisasi melalui media sosial balai.

Pelaporan terkait dengan Fraud di tahun ini masih NIHIL untuk itu perlunya Sosialisasi dan kesarana pihak-pihak terkait termasuk Masyarakat untuk memberanikan diri melaporkan kecuranagn apabila terkadi, pelaporan dijamin kerahasiaannya.

Sarana pengaduan Masyarakat terkait dengan Fraud telah tersedia yaitu pada bit.ly/LAPOR_BBPOM_Palembang.

d. *Whistle-blowing System*

Whistleblowing System (**WBS**) adalah sistem pelaporan pelanggaran yang memungkinkan peran aktif pegawai dan pihak eksternal organisasi untuk menyampaikan pengaduan mengenai tindakan pelanggaran dan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai.

Implementasi yang sudah dilakukan adalah telah diterbitkannya pada awal tahun SK tim pengelola WBS, telah dibuat dan dialporkan laporan triwulan dan monitoring dan evaluasi triwulan, telah dialkukan public compaign untuk pihak internal dan eksternal melalui media sosial balai.

Sarana pengaduan terkait dengan WBS telah tersedia pada bit.ly/WBSBPOM dan email: wbs.bpomplg@gmail.com serta website: www.pom.go.id.

e. Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah situasi di mana penyelenggara negara memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya dalam menjalankan tugas. Ini sering disebut sebagai *conflict of interest.* Untuk triwulan I 2025 ini sebagai bentuk Implementasi pelaksanaannya bahwa telah dibuat identifikasi benturan kepentingan karyawan di awal tahun dan telah dilaporkan melalui apliaksi sangintegritas, telah dibuat laporan triwulan dan monev triwulan, telah dilakukan public campaign untuk pihak internal dan eksternal setiap bulan di media sosial balai.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:

a. Standar Pelayanan:
   - Kebijakan standar pelayanan yang mencakup seluruh jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh BBPOM di Palembang telah ditetapkan dan dipublikasikan secara luas.
   - Maklumat pelayanan sudah ditetapkan dan dipublikasikan

b. Budaya Pelayanan Prima:
   - Telah dilakukan peningkatan kompetensi petugas pemberi layanan melalui pelatihan dengan memanfaatkan IDEAS.
   - Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website/media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional

- Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan
- Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
- Pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi baik secara langsung/tidak langsung
- Inovasi terkait pelayanan prima terus dikembangkan, berupa inovasi AMPERA dan PEMPPEK

c. Pengelolaan Pengaduan
   - Telah disediakan media pengaduan secara offline dan online, serta petugas khusus yang menangani pengaduan
   - Telah terdapat unit pengelola khusus untuk layanan konsultasi dan pengaduan
   - Telah dilaksanakan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi yang dilakukan secara berkala setiap bulan

d. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan

   Selama triwulan 1 telah dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Hasil survei tersebut dapat diakses secara luas oleh masyarakat, serta saran-saran yang disampaikan melalui survei telah ditindaklanjuti

e. Pemanfaatan Teknologi Informasi
   - Pemanfaatan teknologi informasi sudah dilakukan dalam melakukan pelayanan publik di BBPOM di Palembang seperti pemanfaatan whatsapp untuk melakukan layanan informasi dan pengaduan, penggunaan media sosial dan subsite dalam penyebaran informasi kepada masyarakat.
   - Penggunaan buku tamu elektronik sementara ini masih terkendala adanya sarana dan prasarana yang masih dalam proses perbaikan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.57

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahun 2025 IKU 22.

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian (%)	Kategori
Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Palembang	85,90	N/A	N/A	N/A

Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) oleh Tim Penilai Internal (TPI) akan dikeluarkan pada akhir tahun, sehingga pada triwulan I belum dapat dibandingkan dengan target tahun 2025.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

1. Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai BBPOM di Palembang untuk mewujudkan pembangunan ZI menuju WBK;
2. Proses internalisasi pembangunan ZI di lingkungan unit kerja kepada seluruh pegawai belum intensif dilakukan. Pembangunan yang dimaksud meliputi budaya kerja dan pola pikir yang akan tercermin pada Nilai Indeks *Core Values* BerAKHLAK BBPOM di Palembang;
3. Narasi Latar Belakang dan Dampak (*Before/After*) serta Tindak Lanjut atas Hasil Monitoring & Evaluasi pemanfaatan inovasi-inovasi yang dikembangkan belum disusun;
4. Sarana pengaduan terkait dengan gratifikasi, WBS, pengaduan masyarakat (fraud) melalui email, bit.ly, kotak pengaduan yang diletakkan di lobi kantor untuk memudahkan masyarakat dan karyawan memberikan pengaduan/ informasi;
5. Pengendalian gratifikasi melalui surat edaran hari raya keagamaan (Idul Fitri) kepada lintas sektor dan pelaku usaha dan memorandum terkait gratifikasi kepada seluruh karyawan

Rekomendasi perbaikan kinerja:

1. Melakukan upaya intensif dalam menginternalisasikan pembangunan ZI kepada seluruh pegawai;
2. Menyusun program Rencana Aksi Agen Perubahan yang berfokus pada peningkatan Indeks *Core Values* BerAKHLAK;
3. Menyusun narasi Dampak (*Before/After*) serta Tindak Lanjut atas Hasil Monitoring & Evaluasi pemanfaatan inovasi-inovasi yang dikembangkan;
4. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil SKM untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
5. Peningkatan awareness karyawan dalam pelaporan Gratifikasi dan *Fraud;*
6. Melakukan pengelolaan Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA dengan lebih teliti lagi.

d. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja:

1. Apel pagi setiap hari kamis yang diikuti oleh seluruh pegawai BBPOM di Palembang rutin dilaksanakan. Dalam apel pagi tersebut disampaikan sosialisasi mengenai *progress* pembangunan ZI;
2. Penggunaan media sosial untuk mensosialisasikan kegiatan pembangunan budaya kerja dan pola pikir di UPT;
3. Penggunaaan teknologi informasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Pelatihan pelayanan prima bagi petugas layanan publik;
5. Perlunya sosialisasi kembali kepada seluruh karyawan untuk meningkatkan kesadaran pelaporan apabila ada penerimaan/penolakan Gratifikasi dan pengaduan terkait *Fraud* karena pelaporan masih sangat minim.

IK 23. Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.1.58

Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 IKU 23.

Indikator Kinerja	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian (%)	Notifikasi
Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang	N/A	N/A	Diukur Akhir Tahun	N/A

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja satuan kerja/unit kerja. Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP di Balai Besar POM di Palembang. Dalam hal ini BBPOM di Palembang tidak menetapkan target triwulanan melainkan target tahunan sesuai dengan frekuensi penetapan target pada manual IKU. Namun demikian progres pencapaian nilai AKIP BBPOM di Palembang dikendalikan melalui rapat evaluasi internal bulanan.

Evaluasi AKIP dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan Inspektorat Utama dan difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Bobot masing-masing komponen penilaian, sebagai berikut :

No	Komponnen penilaian	Bobot penilaian
1.	Perencanaan Kinerja	24
2.	Pengukuran kinerja	24
3.	Pelaporan kinerja	12
4.	Evaluasi internal	20
5.	Capaian kinerja	20
Nilai Evaluasi		100

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan predikat pada UPT, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90 – 100) Sangat memuaskan.	Telah terwujud good governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level pada Unit Kerja. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis.
A (Nilai >80 – 90) Memuaskan.	Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja/Unit Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator dan individu

BB (Nilai >70 – 80) Sangat Baik.	Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai >60 – 70) Baik.	Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya perbaikan pada Unit Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/Unit Kerja.
CC (Nilai >50 – 60) Cukup (memadai).	Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Unit Kerja
C (Nilai >30 – 50) Kurang.	Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat
D (Nilai >0 – 30) Sangat kurang.	Sistem dan tatatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

Pada tahun 2024 nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang adalah 80,55 atau mendapatkan predikat A dengan interpretasi telah terdapat gambaran bahwa Balai Besar POM di Palembang dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator dan individu.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahun 2025

Realisasi triwulan belum dapat di jabarkan dalam bentuk nilai sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target tahunan 2025 atau seperti dirincikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1.59

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahun 2025 IKU 23.

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian (%)	Kategori
Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang	81,04	N/A	N/A	N/A

Namun demikian, implementasi AKIP BBPOM di Palembang pada Triwulan I Tahun 2025 terlaksana dengan progres yang berjalan sesuai rencana. Adapun rincian progres implementasi AKIP pada Triwulan I adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

   Penyusunan dokumen perencanaan kinerja telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku, diselesaikan, dan dilaporkan tepat waktu, meliputi:

- Rancangan Renstra 2025–2029
- Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2025
- Perjanjian Kinerja (PK) 2025
- Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 2025

2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilaksanakan secara periodik setiap bulan dengan membandingkan realisasi capaian terhadap target indikator kinerja.

3. Pelaporan Kinerja
   Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 telah dilaksanakan pada awal Triwulan I Tahun 2025. Sedangkan Laporan Kinerja Interim untuk Triwulan I disusun pada awal Triwulan II.
4. Evaluasi Internal
   Evaluasi internal dilaksanakan secara periodik setiap bulan, sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. Evaluasi pada bulan Februari dilakukan terhadap capaian kinerja bulan Januari, sedangkan evaluasi pada bulan Maret terhadap capaian kinerja bulan Februari.
5. Capaian Kinerja
   Capaian kinerja diukur secara periodik setiap bulan melalui *link* pengukuran kinerja internal METALIKA.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Hasil monitoring dan evaluasi kinerja hingga akhir Triwulan I menunjukkan bahwa implementasi AKIP berlangsung dengan progres yang sangat baik. Namun, capaian kinerjanya belum dapat diukur, sehingga keberhasilan atau kegagalannya belum dapat dinyatakan. Meski demikian, kegiatan pada Triwulan I, seperti penyusunan dokumen perencanaan kinerja yang selesai tepat waktu dan sesuai pedoman, serta pelaksanaan pengukuran dan evaluasi kinerja yang berjalan sesuai jadwal yang disepakati, menunjukkan progres positif. Keberhasilan ini didorong oleh berbagai faktor positif, antara lain:

- Komitmen dan keterlibatan aktif Pimpinan dalam mengawal proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja.
- Komitmen dan semangat para Ketua Tim dan anggota dalam melaksanakan kinerja secara profesional dan akuntabel.
- Dukungan sarana, prasarana dan anggaran

Pada Triwulan I, diberlakukan kebijakan efisiensi anggaran, yang mendorong Tim Kerja BBPOM di Palembang untuk menyusun strategi melalui peningkatan kerja sama tim dan pemanfaatan sinergi lintas sektor, sehingga proses pengawasan terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan tetap berjalan tanpa hambatan.

Rekomendasi perbaikan kinerja:

Selain rekomendasi perbaikan kinerja yang diperoleh dari hasil penilaian tahun 2024, perlu rekomendasi tambahan dalam rangka pengawalan kegiatan di Triwulan II, yaitu agar seluruh unsur pimpinan, Ketua Tim, dan anggota Tim Kerja berkomitmen dalam mengawal pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun serta konsisten melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran.

d. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang menunjang peningkatan nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang hingga Triwulan I Tahun 2025, antara lain:

- Pemenuhan dokumen perencanaan kinerja, meliputi penyusunan dokumen Rancangan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK), SK Penetapan IKU, serta pelaksanaan cascading indikator kinerja hingga ke tingkat individu.
- Pengawalan capaian indikator kinerja yang dilaksanakan secara rutin melalui monitoring dan evaluasi setiap bulan, termasuk analisis terhadap kendala dan penyusunan rekomendasi perbaikan, sehingga diperoleh rumusan strategi tindak lanjut untuk pencapaian target kinerja.
- Pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi sebagai dasar untuk perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
- Pelaporan hasil evaluasi internal dan laporan kinerja interim sesuai dengan pedoman yang berlaku.

IK 24. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Palembang

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Terdapat 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.

Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
   Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%)
   Efisiensi SBK (bobot 15%)

$$Nilai\ Kinerja\ Anggaran = (Nilai\ EKA\ x\ 50\%) + (Nilai\ IKPA\ x\ 50\%$$

Tabel 3.1.60

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	Kategori	Konversi NIlai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

Tabel 3.1.61

Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 IKU 24.

Indikator Kinerja	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian (%)	Notifikasi
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Palembang	N/A	N/A	Diukur Akhir Tahun	N/A

Penilaian Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palembang dilakukan di akhir tahun sehingga tidak mempunyai realisasi dan target triwulan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.62

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahun 2025 IKU 24.

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian (%)	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Palembang	5,00	N/A	Diukur Akhir Tahun	N/A

Target Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Palembang Tahun 2025 adalah sebesar 5, namun karena penilaian dilakukan di akhir tahun sehingga realisasi triwulan 1 belum dihitung dan belum bisa dibandingkan dengan target tahunan.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Penilaian Nilai Kinerja Anggaran dipengaruhi banyak indikator baik dari penilaian IKPA maupun penilaian EKA. Dalam pencapaian nilai tersebut terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar indikator ini dapat tercapai, antara lain :

- Pengelolaan kegiatan keuangan secara cermat dan optimal, seperti revisi DIPA, penetapan RPD, pengelolaan UP (Uang Persediaan) dan rekon LPJ bendahara yang tepat waktu juga mendukung kelancaran operasional.
- Perbaikan nilai EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran) yang mencakup empat indikator utama: realisasi anggaran, konsistensi RPD awal, konsistensi RPD akhir, capaian keluaran kegiatan, dan efisiensi. Fokus pada kelima aspek ini membantu memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan terukur.

- Pengelolaan administrasi keuangan yang baik meliputi penyelesaian kontrak, penyelesaian tagihan tepat waktu, optimalisasi penyerapan anggaran, pengelolaan retur SP2D, perencanaan kas (Renkas) yang akurat, serta penanganan dispensasi penyampaian SPM dan pagu minus. Selain itu, konfirmasi capaian output yang rutin dilakukan membantu memastikan kesesuaian antara penggunaan anggaran dengan target kinerja yang ditetapkan.
- Monitoring dan evaluasi yang ketat dan berkala dalam pelaksanaan anggaran, peningkatan koordinasi antar bagian, komitmen seluruh pegawai dalam menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur, penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan/ anggaran.

Rekomendasi perbaikan kinerja:

Agar Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Palembang dapat tercapai, direkomendasikan untuk dilakukan beberapa hal strategis sebagai berikut :

1. Pembentukan tim khusus monitoring dan evaluasi kinerja anggaran yang bertugas melakukan pemantauan harian terhadap pelaksanaan anggaran dan pencapaian output;
2. Pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan dan workshop terkait pengelolaan keuangan negara, particularly dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan anggaran;
3. Implementasi sistem informasi terintegrasi yang menghubungkan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja anggaran;
4. Penguatan koordinasi antar bagian/bidang untuk memastikan sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target.

d. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja BBPOM di Palembang dapat diuraikan dalam dua aspek utama:

Pertama, BBPOM di Palembang melakukan pengelolaan kegiatan keuangan secara lebih cermat, yang mencakup beberapa aktivitas penting seperti revisi DIPA, pengelolaan deviasi halaman III DIPA, dan pengelolaan UP (Uang Persediaan). Selain itu, dilakukan pengelolaan pada aspek administrasi keuangan meliputi rekon LPJ bendahara, kontrak, penyelesaian tagihan, dan penyerapan anggaran. Aktivitas ini juga mencakup pengelolaan retur SP2D, perencanaan kas (Renkas), penanganan pengembalian/kesalahan SPM, dispensasi penyampaian SPM, pengelolaan pagu minus, dan konfirmasi capaian output.

Kedua, dilakukan upaya perbaikan terhadap nilai EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran) yang merupakan instrumen pengukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran. Evaluasi ini mencakup empat indikator utama yaitu: realisasi anggaran, konsistensi RPD awal, konsistensi

RPD akhir, capaian keluaran kegiatan, dan efisiensi. Pengelolaan yang cermat terhadap komponen-komponen ini berkontribusi pada pencapaian kinerja anggaran yang optimal.

IK 25. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Palembang

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori.

Tabel 3.1.63
Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Naive	Manjemen risiko tergantung pada individu perorangan
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di sluruh area bisnis. Mengunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manejemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

a) Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
b) Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
c) Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Penilaian maturitas penerapan manajemen risiko pada Balai Besar POM di Palembang dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.02.02.7.72.03.21.05 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM.

Tujuan penilaian tingkat maturitas manajemen risiko adalah sebagai berikut:

a. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan POM sebagaimana diharapkan;
b. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko;
c. Menjaga pemenuhan prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko.

Ruang lingkup penilaian meliputi:

a. Komunikasi dan konsultasi;
b. Penetapan konteks;
c. Identifikasi risiko;
d. Analisis risiko;
e. Evaluasi risiko;
f. Mitigasi risiko;
g. Reviu dan pemantauan.

Penilaian Tingkat maturitas penerapan manajemen risiko dilakukan satu kali dalam satu tahun oleh Inspektorat Utama Badan POM. Berdasarkan penilaian tersebut, tingkat maturitas penerapan manajemen risiko pada Balai Besar POM di Palembang tahun 2024 adalah 2,813 dengan dikategori ***Risk Aware***.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Perhitungan Dan Formula:

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manejemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
Risk Naive	0-16	1	-
Risk Aware	17-32	2	Peningkatan *Risk Naive* menuju *Risk Aware*
Risk Defined	33-48	3	Peningkatan *Risk Aware* menuju *Risk Defined*
Risk Managed	49-64	4	Peningkatan *Risk Defined* menuju *Risk Managed*
Risk Enabled	65-80	5	Peningkatan *Risk Managed* menuju *Risk Enabled*

Cara perhitungan level maturitas

Skor Maturitas = $\frac{Skor\ Total}{16}$

Keterangan:

a) Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
b) Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

Penilaian Tingkat maturitas penerapan manajemen risiko dilakukan setiap tahun di Triwulan 4 oleh Inspektorat Badan POM, oleh karena tidak memiliki target dan realisasi triwulanan.

Tabel 3.1.64

Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 IKU 25.

Indikator Kinerja	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian (%)	Notifikasi
Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Palembang	N/A	N/A	Diukur Akhir Tahun	N/A

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahun 2025

Target penilaian Tingkat maturitas penerapan manajemen risiko Balai Besar POM di Palembang tahun 2025 adalah 3,00 tetapi karena penilaian hanya dilakukan satu kali pada triwulan 4 maka pada triwulan 1 ini belum memiliki nilai tersebut

Tabel 3.1.65

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahun 2025 IKU 25.

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian (%)	Kategori
Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Palembang	3,00	N/A	N/A	N/A

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Belum dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target karena penilaian tingkat maturitas penerapan manajemen risiko baru dilakukan pada triwulan 4 tahun berjalan.

Dalam Upaya pencapaian target IKU indeks manajemen risiko, implementasi manajemen risiko di BBPOM di Palembang konsisten dilaksanakan sesuai SK Kepala Badan POM RI nomor HK.02.02.1.7.07.20.267 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM.

d. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam Upaya pencapaian target IKU indeks manajemen risiko, implementasi manajemen risiko di BBPOM di Palembang konsisten dilaksanakan sesuai SK Kepala Badan POM RI nomor HK.02.02.1.7.07.20.267 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM. Beberapa kegiatan sesuai petunjuk pelaksanaan tersebut antara lain:

1. Melakukan identifikasi risiko untuk seluruh indikator kinerja utama BPOM di Palembang tahun 2025 dan diupload di Sapaapip pada Bulan Januari 2025.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi manajemen risiko persemester dan hasil monev tersebut berupa update identifikasi risiko di upload di sapaapip pada awal semester kedua tahun 2025

3.2. Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 3.2.1 Matriks Tindaklanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**1.** Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian sediaan farmasi belum dilakukan dengan optimal	1. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan sampling dan pengujian produk sediaan farmasi berdasarkan pedoman sampling tahun 2025 yang telah ditetapkan oleh unit pengampu	Akhir 2025	**1.** Mitigasi risiko terhadap potensi risiko kegagalan dalam melakukan pengawasan produk sediaan farmasi	**1.** Pelaksanaan sampling sesuai rencana sembari menunggu kepastian relaksasi anggaran	Akhir 2025	Pelaksanaan kegiatan pengambilan dan pengujian sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tercapai
		2. Terdapat 2 sampel kosmetik yang kesimpulan penandaan tidak sesuai	2. Pengambilan sampel dialihkan ke bulan selanjutnya, sambil menunggu kepastian relaksasi anggaran dan target sampel		**2.** Membuat evaluasi terhadap hasil pelaksanaan sampling dan pengujian produk sediaan farmasi tahun 2024			
		3. Beberapa komoditi sampel kosmetik tidak bisa disampling karena keterbatasan anggaran	3. Lebih teliti dalam melakukan evaluasi penandaan.			**2.** Melakukan evaluasi penandaan dengan tepat agar kesimpulan penandaan sesuai		
		4. Terdapat 1 sampel steril (Lidox Injeksi) yang belum selesai uji dikarenakan menunggu sampel dengan	4. Berkoordinasi dengan balai lain/ loka untuk melakukan sampel steril dengan parameter uji endotoksin.			**3.** Aktif berkoordinasi dengan Balai regional agar pengujian sampel tidak tertunda.		

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		uji endotoksin agar lebih efisien dalam penggunaan reagen.						
		5. Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan sampling dan pengujian sediaan farmasi belum memadai	5. Pemerataan kompetensi petugas melalui pelatihan berkelanjutan terkait kegiatan sampling dan pengujian produk sediaan farmasi			**4.** Peningkatan kompetensi petugas dalam pelaksanaan sampling dan pengujian produk sediaan farmasi		
		6. Kompetensi SDM perlu ditingkatkan seiring dengan tuntutan peningkatan kinerja dan perkembangan teknologi	6. Sosialisasi peraturan terbaru rutin dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi kepada setiap personil di lingkungan Balai Besar POM di Palembang sebelum peraturan tersebut diberlakukan			5. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan sampling dan pengujian sediaan farmasi		
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Tahapan kegiatan belum dilakukan	Dilakukan tahap awal kegiatan berupa KIE farmakovigilans untuk target	Triwulan II 2025	-	Melakukan KIE farmakovigilans	Triwulan II 2025	-
3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti	- Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian pangan olahan	- Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan sampling dan pengujian produk pangan olahan berdasarkan pedoman	Akhir 2025	- Mitigasi risiko terhadap potensi risiko kegagalan dalam melakukan pengawasan produk pangan olahan	- Peningkatan kompetensi petugas dalam pelaksanaan sampling dan pengujian produk pangan olahan	Akhir 2025	Pelaksanaan kegiatan pengambilan dan pengujian sampel pangan

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	sesuai ketentuan	belum dilakukan dengan optimal	sampling tahun 2025 yang telah ditetapkan oleh unit pengampu					olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tercapai
		- Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan sampling dan pengujian pangan olahan belum memadai	- Pemerataan kompetensi petugas melalui pelatihan berkelanjutan terkait kegiatan sampling dan pengujian produk pangan olahan		- Membuat evaluasi terhadap hasil pelaksanaan sampling dan pengujian produk pangan olahan tahun 2024	- Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan sampling dan pengujian pangan olahan		
		- Kompetensi SDM perlu ditingkatkan seiring dengan tuntutan peningkatan kinerja dan perkembangan teknologi	- Sosialisasi peraturan terbaru rutin dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi kepada setiap personil di lingkungan Balai Besar POM di Palembang sebelum peraturan tersebut diberlakukan					
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Belum adanya sampel KLB sesuai ketentuan yang masuk ke laboratorium	Persiapan media dan reagensia sehingga dapat melakukan pengujian KLB	Triwulan II	-	-Perencanaan media reagensia KLB	Triwulan II	-
			Berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan KLB	2025	-	Membuat *whatsapp* grup untuk berkoordinasi dengan fungsi terkait	2025	-
			Senantiasa mengawal keamanan produk obat dan makanan sehingga terhindar dari KLB	Triwulan II	-	Berperan serta dalam penyebaran informasi tentang obat dan makanan yang aman	Triwulan II	-
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti	- Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	- Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan sampling dan	Akhir 2025	- Mitigasi risiko terhadap potensi risiko kegagalan dalam melakukan	- Peningkatan kompetensi petugas dalam pelaksanaan sampling dan pengujian produk PIRT	Akhir 2025	Pelaksanaan kegiatan pengambilan dan

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	sesuai ketentuan	sampling dan pengujian PIRT belum dilakukan dengan optimal	pengujian produk PIRT berdasarkan pedoman sampling tahun 2025 yang telah ditetapkan oleh unit pengampu		pengawasan produk PIRT			pengujian sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tercapai
		- Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan sampling dan pengujian PIRT belum memadai	- Pemerataan kompetensi petugas melalui pelatihan berkelanjutan terkait kegiatan sampling dan pengujian produk PIRT		- Membuat evaluasi terhadap hasil pelaksanaan sampling dan pengujian produk PIRT tahun 2024	- Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan sampling dan pengujian PIRT		
		- Kompetensi SDM perlu ditingkatkan seiring dengan tuntutan peningkatan kinerja dan perkembangan teknologi	- Sosialisasi peraturan terbaru rutin dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi kepada setiap personil di lingkungan Balai Besar POM di Palembang sebelum peraturan tersebut diberlakukan					
6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Tindak lanjut yang disampaikan oleh pemangku kepentingan masih rendah	Dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan terhadap capaian indikator dan diambil langkah-langkah untuk memperbaiki apabila capaian indikator tidak tercapai.	2025	-	koordinasi, komunikasi dan monev secara berkelanjutan untuk meningkatkan tindak lanjut yang disampaikan oleh pemangku kepentingan	2025	Tindak lanjut dari pemangku kepentingan khususnya pelaku usaha masih rendah yaitu sebesar 64,52%

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pemeriksaan sarana telah dilakukan terhadap 1 sarana	Laksanakan pemeriksaan sarana sesuai dengan renlak	Triwulan II	Melakukan pemeriksaan sarana UKOT	Melakukan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi	Triwulan II	Realisasi kinerja telah mencapai target
8	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi belum dapat dihitung, namun sudah ada 7 sarana yang diperiksa (10% dari target tahun 2025)	- Penyesuaian rencana pelaksanaan pemeriksaan sarana menjadi minimal 30% (21 sarana) per triwulan	Triwulan II	-	-Penyesuaian rencana pelaksanaan menjadi 30%	Triwulan II	7 sarana telah diperiksa pada Triwulan I
			- Mengikuti perkembangan proses pemutakhiran formula perhitungan realisasi kinerja			- Koordinasi dengan unit pengampu dan Biro Perencanaan dan Keuangan terkait pemutakhiran formula perhitungan realisasi kinerja		
9	Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi belum dapat dihitung, manual IKU masih dalam pembahasan	Mengikuti perkembangan proses pemutakhiran formula perhitungan realisasi kinerja	Triwulan II	-	Koordinasi bersama Unit Pengampu dan Biro Perencanaan dan Keuangan	Triwulan II	-
10	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa tidak optimal	- Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha	Akhir 2025	Perencanaan dan monitoring terhadap target TW I	Membuat Evaluasi dan monitoring terhadap Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Akhir 2025	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai
			- KIE kepada masyarakat terkait Pangan Olahan					

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								ketentuan tercapai
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan tidak tercapai	- Peningkatan kompetensi petugas dalam pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan	Akhir 2025	- Membuat evaluasi hasil pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan tahun 2024 dan 2025	- Membuat evaluasi hasil pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan tahun 2025	Akhir 2025	Pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan tercapai
			- Meningkatkan peran aktif petugas untuk mengambil iklan sediaan farmasi dan makanan saat sedang melakukan kegiatan pemeriksaan lainnya		- Meningkatkan peran aktif petugas untuk mengambil iklan sediaan farmasi dan makanan saat sedang melakukan kegiatan pemeriksaan lainnya			
					- Mitigasi risiko terhadap potensi risiko kegagalan dalam melakukan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan			
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti	Capaian indikator telah mencapai target triwulanan	Pengawalan capaian kinerja melalui monitoring dan evaluasi secara berkala tiap bulan	2025	Membuat perencanaan berdasarkan analisa risiko	Menggunakan hasil monev untuk peningkatan kinerja	2025	Perencanaan telah dilakukan berdasarkan analisis risiko
			Peningkatan kompetensi SDM melalui bimbingan Teknis terkait	2025	-	Akan mengikuti Bimbingan Teknis yang diadakan oleh pusat terkait Pengawasan Pangan Fortifikasi untuk meningkatkan kompetensi SDM	2025	

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	sesuai ketentuan		Pengawasan Pangan Fortifikasi					
			Pendampingan lebih intensif kepada pelaku usaha	Triwulan II	-	Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha baik secara langsung pada saat pemeriksaan maupun melalui desk CAPA	Triwulan II	
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL	Kondisi awal pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai SKL mencapai 109,52%	Melakukan monitoring pemenuhan aspek kompetensi, peralatan, aspek ruang lingkup dan verifikasi MA tetap on the track	2025	-	Melakukan monitoring pemenuhan aspek kompetensi, peralatan, aspek ruang lingkup dan verifikasi MA tetap on the track	2025	Realisasi kinerja telah mencapai target
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Hanya petugas tertentu yang dapat memberikan kie kepada masyarakat	Dilakukan pelatihan kepada petugas fungsi infokom terkait kie ataupun penyuluhan	Tahun 2025	Pelatihan KIE tingkat I telah diikuti oleh 1 orang petugas	Pelatihan terkait kie ataupun penyuluhan untuk petugas lainnya	Tahun 2025	Penambahan petugas yang sudah mengikuti pelatihan terkait KIE
15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Telah dilakukan kegiatan advokasi dan ditetapkan target intervensi	Laksanakan kegiatan sesuai perencanaan agar realisasi selalu optimal	TW IV	kegiatan advokasi telah dilakukan	Melaksanakan tahapan kegiatan dengan menyesuaikan jadwal Kegiatan belajar di sekolah dan juknis terbaru setelah efisiensi anggaran	Triwulan IV	tercapainya target indikator pada akhir tahun berjalan
16	Jumlah desa pangan aman	Pelaporan kegiatan belum optimal pada aplikasi GKPD online dengan nilai kepatuhan 80%-90% pada	Dilakukan pemantauan pelaporan kegiatan per tahapan sesuai dengan pedoman	Tahun 2025	Pelaporan tahapan kegiatan advokasi sudah dilakukan pada aplikasi GKPD online	Pelaporan tahapan kegiatan lainnya	TW II-IV Tahun 2025	Kepatuhan pelaporan kegiatan sudah sesuai sampai TW I 2025

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		akhir tahun 2024						
		Terdapat inovasi AMPERA (Amankan Produk, Edukasi masyaRAkat) yang belum dioptimalisasi bersama program keamanan pangan terpadu	Melakukan publikasi inovasi AMPERA bersama dengan program Desa Pangan Aman	Tahun 2025	-	Publikasi inovasi AMPERA pada kegiatan pelatihan kader dan bimtek komunitas	TW II-IV 2025	-
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Pelaporan kegiatan belum optimal pada aplikasi SiPAMAN dengan nilai kepatuhan 70%-79,9% pada akhir tahun 2024	Dilakukan pemantauan pelaporan kegiatan per tahapan sesuai dengan pedoman	Tahun 2025	Pelaporan tahapan kegiatan advokasi dan survei pasar sudah dilakukan pada aplikasi SiPAMAN	Pelaporan tahapan kegiatan lainnya	TW II-IV Tahun 2025	Kepatuhan pelaporan kegiatan sudah sesuai sampai TW I 2025
		Terdapat inovasi AMPERA (Amankan Produk, Edukasi masyaRAkat) yang belum dioptimalisasi bersama program keamanan pangan terpadu	Melakukan publikasi inovasi AMPERA bersama dengan program Desa Pangan Aman	Tahun 2025	-	Publikasi inovasi AMPERA pada rangkaian kegiatan PPABK	TW II-IV 2025	-
18	Persentase UMKM yang didampingi dan	Masih terdapat personil di sertiifkasi yang belum	Peningkatan kompetensi petugas terkait alur atau prosedur dan	Triwulan II	Belum dilakukan bimtek kepada petugas	Mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi pada triwulan II	Triwulan II	Masih ada petugas yang belum mengikuti

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	mendapatkan e platihan terkait sertifikasi	persyaratan izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik dan Cara Produksi Kosmetik yang Baik, serta pemanfaatan teknologi informasi.					bimtek fasilitator untuk komoditi pangan, OT dan kosmetik
19	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Realisasi Triwulan I adalah 33,33%. Capaian terhadap Target TW 1 104,16%. Capaian TW 1 terhadap Target Tahun 2025 45,04%	Meningkatkan investigasi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (Intelijen maupun siber)	Desember 2025	Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan, target kinerja tercapai	Melakukan kegiatan/ operasi intelijen untuk memastikan target dapat dilakukan operasi penindakan (A1)	TW 2 - 4	Realisasi kinerja telah mencapai target
			Mempercepat proses pemberkasan perkara jika telah diperoleh perkara yang naik ke proses pro justitia			Melaksanakan proses penyidikan Tahap 1, P21 dan Tahap 2 dengan cepat.	TW 2 - 4	
			Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait (Korwas, Kejati)			Koordinasi dan konsultasi dengan korwas dan JPU terkait penyelesain berkas perkara	TW 2 – TW 4	
			Monev berjenjang dilakukan secara berkala (kegiatan dan manajemen risiko)			Monev setiap bulan terhadap capaian IKU	TW 2 – TW 4	
20	Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang	realisasi berdasarkan capaian analisa penjejakan digital yang dilaporkan tepat waktu yang dilaporkan setiap bulan,	Patroli Siber dan Analisa Penjejakan Dijital Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan melaporkannya tepat waktu	Desember 2025	Patroli Siber dan Analisa Penjejakan Dijital Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan melaporkannya tepat waktu	Patroli Siber dan Analisa Penjejakan Dijital Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan melaporkannya tepat waktu setiap bulannya	TW 2 - TW 4	Realisasi kinerja telah mencapai target

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	diselesaikan sesuai standar	dan telah dilaporkan tepat waktu sebelum tanggal 25 setiap bulannya dimana mencakup 50% dari target tahunan			sebelum tanggal 25 pada bulan Januari, Februari dan Maret			
			Melaksanakan proses penyusunan Laporan Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Sediaan Farmasi dan pangan Olahan	Desember 2025		Melakukan persiapan, perencanaan dan pengumpulan bahan, data, fakta informasi dan keterangan yang dibutuhkan sehingga Laporan Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Sediaan Farmasi dan pangan Olahan	TW 2 - 4	
			Menindaklanjuti rekomendasi Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Sediaan Farmasi dan pangan Olahan	Desember 2025		Rekomendasi Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Sediaan Farmasi dan pangan Olahan tidak dapat dimonitor, dan segera disampaikan ke pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti dan mengumpulkan hasil tindak lanjut dan segera melaporkan	TW 2 – TW 4	
			Monev berjenjang dilakukan secara berkala	Triwulan II		Monev setiap bulan terhadap capaian IKU	TW 2 – TW 4	
21	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palembang	Aspek Inovasi merupakan aspek dengan penilaian paling rendah, yaitu perolehan rata-	Inovasi terkait pelayanan publik lebih ditingkatkan dan disebarluaskan sehingga lebih dikenal oleh masyarakat dan	Desember 2025	Sudah dilakukan sosialisasi inovasi AMPERA baik melalui medsos BBPOM di Palembang maupun secara	Sosialisasi inovasi PEMPPEK melalui medsos BBPOM di Palembang	Juni 2025	Hasil penilaian oleh tim penilai UPP BPOM akan keluar pada akhir tahun

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		rata sebesar 4.5.	lebih besar manfaat yang dirasakan		langsung kepada komunitas pasar			
22	Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Palembang	Nilai PMPZI 84,85 (Tahun 2024)	Melakukan upaya intensif dalam menginternalisasikan pembangunan ZI kepada seluruh pegawai dan sosialisasi ke *stakeholder* sehingga Indeks Pembangunan RB dapat meningkat	31 Desember 2025	-	Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Pembangunan ZI dari setiap Area Perubahan	31 Desember 2025	Target Nilai PMPZI 85.90
		Hasil Survei *Core Value* BerAKHLAK 54,0% (Tahun 2024)	Menyusun Program Rencana Aksi Agen Perubahan Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2025 dengan target meningkatnya Indeks *Core Value* BerAKHLAK tersebut	31 Desember 2025	-	Menjalankan 10 (sepuluh) Rencana Aksi Agen Perubahan Tahun 2025 dan melakukan monitoring evaluasisetiap tiga bulan	31 Desember 2025	Hasil Survei *Core Value* BerAKHLAK meningkat menjadi 60,0%
23	Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang	Perencanaan Kinerja :	Pendokumentasian dasar penetapan target kinerja dan penentuan kenaikan dan penurunan target kinerj harus memadai	2025	- Pada 15 April telah dilakukan perubahan target RAPK dengan justifikasi dan dokumen usulan yang lengkap serta telah disepakati Biro Perencanaan dan Keuangan tanggal 16 April 2025.	Melakukan monitoring kesesuaian penetapan target pada bulan berikutnya	2025	RAPK Tahun 2025 telah direvisi pada 16 April 2025
		Penyusunan dokumen perencanaan telah dilakukan tepat waktu dan sesuai ketentuan						
		Pengukuran kinerja telah dilaksanakan setiap bulan dengan	Penyusunan mekanisme apabila terjadi kesalahan dalam pengumpulan data atau pencegahan	2025	Mekanisme pengumpulan data setelah pelaporan yang termuat dalam	-	-	Revisi SOP Pengumpulan Data dan Monev RAPK telah

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		membandingkan realisasi dan target kinerja menggunakan website METALIKA	kesalahan data yang terkait dengan pelaporan kinerja dengan mutu baku yang jelas;		SOP Pengumpulan Data dan Monev RAPK telah direvisi dan efektif pada tanggal 14 April 2025 serta dilengkapi dengan mutu baku yang jelas			dilakukan 14 April 2025 dan
			Diperlukan monitoring kinerja dan memanfaatkan/ mengimplementasikan hasil pengukuran kinerja sebagai wujud nyata pemberian reward dan punishment yang dilakukan secara berkala (triwulan/semester) sampai ke level individu.	2025	- Sebagai implementasi hasil pengukuran kinerja telah diatur mekanisme pemberian reward dan punishment kepada fungsi atau bagian setiap triwulanan yang termuat dalam SOP Pengumpulan Data dan Monev RAPK	-	-	Revisi SOP Pemilihan Best Employee of The Month yang efektif pada 8 April 2025
					- Pemberian reward pada level individu telah diatur mekanismenya melalui SOP Pemilihan Best Employee of The Month yang juga memperhitungkan hasil kinerja individu			

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pelaporan Kinerja telah dilakukan tepat waktu dan sesuai pedoman, namun terdapat beberapa analisis pembahasan pada laporan kinerja yang masih belum lengkap	Penyajian manfaat informasi kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja	2025	Pemanfaatan informasi kinerja telah disajikan pada Laporan Kinerja Tahun 2024 dan telah dilaporkan pada Biro Perencanaan dan Keuangan dan melalui web esr.menpan.go.id tanggal 26 Februari 2025	-	-	Penyajian pemanfaatan informasi kinerja telah selesai pada Lapkin Tahun 2024
			Melakukan monitoring indikator sasaran, sampai ke level kegiatan dan sub kegiatan dan target per triwulan serta analisis faktor keberhasilan maupun hambatan dan rencana tindak lanjut secara menyeluruh	2025	-	monitoring indikator sasaran, sampai ke level kegiatan dan sub kegiatan dan target per triwulan serta analisis faktor keberhasilan maupun hambatan dan rencana tindak lanjut secara menyeluruh setiap triwulan	2025	-
		Capaian Kinerja perlu dimonitoring agar berjalan sesuai perencanaan	Seluruh unsur pimpinan, Ketua Tim, dan anggota Tim Kerja berkomitmen dalam mengawal pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun serta konsisten melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran.	2025	-	Seluruh unsur pimpinan, Ketua Tim, dan anggota Tim Kerja berkomitmen dalam mengawal pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun serta konsisten melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran.	2025	-

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Palembang	Nilai IKPA dan Nilai EKA kurang optimal	Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap capaian IKPA dan EKA untuk meningkatkan nilai kinerja anggaran	Jan - des	Membahas capaian output dan anggaran di rapat monev Januari-Maret	Membahas capaian output dan anggaran di rapat monev setiap bulannya	Triwulan II	Terjadi peningkatan nilai kinerja anggaran dari kondisi awal
25	Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Palembang	Realisasi nilai maturitas manajemen risiko BBPOM di Palembang adalah 2,813	1. Reviu TL rekomendasi penilaian Manrisk 2024 2. Reviu dan pemantauan Manrisk 2025 3. Monev pemenuhan data dukung penilaian manrisk 2025	TW 2-3	Telah dibuat risk register pada awal tahun	1. Reviu TL rekomendasi penilaian Manrisk 2024 2. Reviu dan pemantauan Manrisk 2025 3. Monev pemenuhan data dukung penilaian manrisk 2025	TW 2	Masih perlu dilakukan reviu terhadap TL rekomendasi penilaian manrisk tahun lalu, dan pelaksanaan tahun ini, serta monev pemenuhan data dukungnya.

3.3 Realisasi Anggaran

SK 1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang

Tabel 3.3.5 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Sasaran Kegiatan 1.

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Target B3	Realisasi B3	Capaian B3	Capaian SK	RPD TW I	Realisasi Anggaran TW I	Capaian Anggaran	Capaian Anggaran per SK	IE per SK	TE per SK	Capaian TE per SK
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	98,74	113,49%	114,31%	100.275.000	100.274.764	100,0%	77%	1,5	0,48	92 % (Efisien)
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	0	Diukur Akhir Tahun		-	-	0,0%				
		3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	99,64	117,22%		4.398.000	2.198.832	50,0%				
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	0	Belum Dapat Diukur		1.466.000	732.944	50,0%				
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	70,56	83,01%		1.466.000	732.944	50,0%				
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	65	82,26	126,55%		529.000	529.000	100,0%				
		7	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	100	111,11%		793.500	793.500	100,0%				
		8	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklsnjuti sesusi ketentuan	90		Belum Dapat Diukur		793.500	793.500	100,0%				
		9	Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,75		Belum Dapat Diukur		3.787.999,5	3.788.100	100,0%				
		10	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	100	125,00%		3.787.999,5	3.788.100	100,0%				
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	80,09	99,13	123,77%		529.000	529.000	100,0%				

Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai Sasaran Kegiatan 1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang hingga triwulan I terhitung efisien (100%). Penjelasan tentang analisis efisiensi penggunaan anggaran disesuaikan dengan 11 (sebelas) indikator kinerja yang mengukur pencapaian sasaran, sebagai berikut:

IK 1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Tabel 3.3.6 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Triwulan I Tahun 2025 IKU 1.

No	Indikator Kinerja	Capaian Output	Input			IE	TE	Capaian
			RPD TW I	Realisasi TW I	Capaian			
1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	113,49%	100275000	100274764	100,00%	1,1	0,13	100 % (Efisien)

Untuk mendukung pencapaian target indikator persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dialokasikan anggaran sebesar Rp 100.275.000,-, pada akhir triwulan I tahun 2025 terealisasi sebesar Rp 100.274.764,-. Capaian output sebesar 113.49% lebih tinggi dibandingkan capaian input atas penggunaan anggaran yang hanya sebesar 100.00% dapat menunjukkan keberhasilan dalam melakukan efisiensi penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran tersebut melekat pada kegiatan pengawasan sampling dan pengujian

sediaan farmasi. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini adalah **efisien** dengan nilai TE 0.1 karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan. Upaya efisiensi ini didukung dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala dengan melibatkan seluruh kelompok substansi yang berkaitan dengan indikator ini. Faktor pendukung lainnya adalah optimalisasi pelaksanaan sampling dan pengujian sediaan faramasi dengan cara sosialisasi/edukasi peraturan terkait kepada petugas dan peningkatan kompetensi petugas.

IK 2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Tabel 3.3.3 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Triwulan I Tahun 2025 IKU 2.

No	Indikator Kinerja	Capaian Output	Input			IE	TE	Capaian
			RPD TW I	Realisasi TW I	Capaian			
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Diukur Akhir Tahun	0	0	N/A	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun

Tingkat efisiensi indikator kinerja ini belum dapat diukur atau dilakukan pemantauan, karena belum mulai dilaksanakan pada triwulan I 2025.

IK 3. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Tabel 3.3.4 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Triwulan I Tahun 2025 IKU 3.

No	Indikator Kinerja	Capaian Output	Input			IE	TE	Capaian
			RPD TW I	Realisasi TW I	Capaian			
3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	117,22%	4398000	2198832	50,00%	2,3	1,3	84 % (Tidak Efisen)

Dalam rangka mendukung pencapaian target indikator persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.398.000, namun hanya digunakan Rp2.198.832,- atau sebesar 50,00% dari total rencana. Penggunaan anggaran tersebut disesuaikan dengan kebijakan efisiensi yang diterapkan pada Triwulan I, yaitu dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia, sedangkan untuk rencana penarikan dana (RPD) dan target realisasi volume rincian output tetap mengacu pada perencanaan target awal tahun 2025, mengingat kebijakan efisiensi pada periode ini hanya menetapkan blokir anggaran tanpa mengurangi total pagu DIPA.

Kebijakan efisiensi anggaran tersebut menyebabkan ketidakselarasan antara capaian anggaran (input) dan capaian indikator kinerja (output). Capaian output sebesar 117,22%, yang menunjukkan hasil terlalu tinggi dibandingkan dengan capaian input (anggaran). Hal ini disebabkan oleh metode penghitungan IKU yang hanya memperhitungkan sampel yang telah selesai seluruh proses sampling dan pengujian sehingga tidak terdampak atas kebijakan blokir anggaran pada triwulan I.

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi nilai TE sebesar 1,31 meskipun hasil kegiatan relatif baik, namun penggunaan anggaran untuk indikator ini dinilai tidak efisien. Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan peninjauan ulang terhadap perencanaan anggaran dalam PoA untuk triwulan berikutnya guna memastikan keselarasan antara kebutuhan riil kegiatan serta pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

IK 4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

Tabel 3.3.7 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Triwulan I Tahun 2025 IKU 4.

No	Indikator Kinerja	Capaian Output	Input			IE	TE	Capaian
			RPD TW I	Realisasi TW I	Capaian			
1	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	0,00%	1466000	732944	50,00%	0,0	-1,0	75 % (Tidak Efisen)

Pada Triwulan I Tahun 2025, capaian persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar masih sebesar 0%. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran yang telah mencapai 50%, maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian indikator kinerja tersebut berada pada kategori **tidak efisien**.

Kondisi ini disebabkan oleh belum adanya sampel KLB yang dapat diuji selama triwulan I, sehingga anggaran yang telah digunakan belum memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian indikator. Meskipun demikian, realisasi anggaran yang digunakan untuk pembelian media dan reagensia sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan adanya sampel KLB yang harus diuji, tidak dapat dikategorikan sebagai penggunaan yang tidak tepat. Hal ini mempertimbangkan karakteristik kegiatan yang bersifat tidak terjadwal dan ketidakpastian atas munculnya kasus KLB di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang.

Sebagai langkah perbaikan, pada Triwulan II akan dilakukan penyesuaian pemanfaatan anggaran yang mengacu pada rencana penarikan dana, namun tetap memperhatikan ketercapaian output yang ditargetkan agar efisiensi penggunaan anggaran dapat lebih optimal.

IK 5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Tabel 3.3.6 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Triwulan I Tahun 2025 IKU 5.

No	Indikator Kinerja	Capaian Output	Input			IE	TE	Capaian
			RPD TW I	Realisasi TW I	Capaian			
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83,01%	1466000	732944	50,00%	1,7	0,66	90 % (Efisien)

Dalam rangka mendukung pencapaian target indikator persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.466.000, namun hanya digunakan Rp732.944,- atau sebesar 50,00% dari total rencana. Penggunaan anggaran tersebut disesuaikan dengan kebijakan efisiensi yang diterapkan pada Triwulan I, yaitu dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia, sedangkan untuk rencana penarikan dana (RPD) dan target realisasi volume rincian output tetap mengacu pada perencanaan target awal tahun 2025, mengingat kebijakan efisiensi pada periode ini hanya menetapkan blokir anggaran tanpa mengurangi total pagu DIPA.

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi nilai TE sebesar 0,66, maka penggunaan anggaran untuk indikator ini dinilai efisien. Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan peninjauan ulang terhadap perencanaan anggaran dalam PoA untuk triwulan berikutnya guna memastikan keselarasan antara kebutuhan riil kegiatan serta pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan

IK 6. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Tabel 3.3.7 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Triwulan I Tahun 2025 IKU 6.

No	Indikator Kinerja	Capaian Output	Input			IE	TE	Capaian
			RPD TW I	Realisasi TW I	Capaian			
6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	126,55%	529000	529000	100,00%	1,3	0,3	95 % (Efisien)

Pelaksanaan kegiatan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dilakukan dikatakan berhasil/ tercapai apabila juga diiringi dengan efisiensi penggunaan sumber daya. Capaian output IKU persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder adalah sebesar 126,55% dan capaian input sebesar 100,00%. Capaian efisiensi atas penggunaan sumber daya adalah sebesar 95% dengan kategori Efisien.

IK 7. Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Tabel 3.3.8 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Triwulan I Tahun 2025 IKU 7.

No	Indikator Kinerja	Capaian Output	Input			IE	TE	Capaian
			RPD TW I	Realisasi TW I	Capaian			
7	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	111,11%	793500	793500	100,00%	1,1	0,1	100 % (Efisien)

Penggunaan anggaran pada triwulan 1 tahun 2025 untuk pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi adalah 100 % karena hanya ada 1 sarana yang dilakukan pemeriksaan yang sesuai dengan rencana pelaksanaan (renlak) triwulan 1 tahun 2025. Pada triwulan berikutnya akan selalu dilakukan perencanaan dan penggunaan anggaran dengan memperhatikan target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

IK 8. Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Tabel 3.3.9 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Triwulan I Tahun 2025 IKU 8.

No	Indikator Kinerja	Capaian Output	Input			IE	TE	Capaian
			RPD TW I	Realisasi TW I	Capaian			
8	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	N/A	793500	793500	100,00%	Belum Dapat Diukur	Belum Dapat Diukur	Belum Dapat Diukur

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Pada triwulan I, tingkat efisiensi penggunaan anggaran belum dapat dihitung karena capaian *output* yang juga belum dapat dihitung. Namun, jika melihat dari realisasi anggaran pada triwulan I sudah sesuai dengan rencana penarikan dana yaitu Rp793.500. Untuk triwulan II dengan penyesuaian renlak jumlah sarana yang akan diperiksa, juga akan dilakukan penyesuaian rencana penarikan dana yang sesuai yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga mendapatkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran yang maksimal.

IK 9. Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Tabel 3.3.10 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Triwulan I Tahun 2025 IKU 9.

No	Indikator Kinerja	Capaian Output	Input			IE	TE	Capaian
			RPD TW I	Realisasi TW I	Capaian			
9	Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	N/A	3787999,5	3788100	100,00%	0,7	-0,3	N/A

Pada IKU ini, belum dapat disimpulkan efisien atau tidaknya, hal ini dikarenakan perhitungan capaian output belum dapat dilakukan karena menunggu kepastian deputi terkait dan Biro Perencanaan BPOM. Namun demikian, terkait serapan anggaran telah dilaksanakan sesuai perencanaan penarikan dana TW 1.

IK 10. Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Tabel 3.3.11 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Triwulan I Tahun 2025 IKU 10.

No	Indikator Kinerja	Capaian Output	Input			IE	TE	Capaian
			RPD TW I	Realisasi TW I	Capaian			
10	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	125,00%	3787999,5	3788100	100,00%	1,2	0,2	95 % (Efisien)

Capaian input sebesar 100.00% lebih tinggi dibandingkan capaian input atas penggunaan anggaran yang hanya sebesar 95% dapat menunjukkan keberhasilan dalam melakukan efisiensi penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran tersebut melekat pada kegiatan pengawasan sarana distribusi pangan olahan. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini adalah **efisien** dengan nilai TE 0.2 karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan. Upaya efisiensi ini didukung dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala dengan melibatkan seluruh kelompok substansi yang berkaitan dengan indikator ini.

IK 11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Tabel 3.3.12 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Triwulan I Tahun 2025 IKU 11.

No	Indikator Kinerja	Capaian Output	Input			IE	TE	Capaian
			RPD TW I	Realisasi TW I	Capaian			
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	123,77%	529000	529000	100,00%	1,2	0,2	95 % (Efisien)

Untuk mendukung pencapaian target indikator persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dialokasikan anggaran sebesar Rp 9.122.000, pada akhir triwulan I tahun 2025 terealisasi sebesar Rp 529.000,-. Capaian output sebesar 123,77% lebih tinggi dibandingkan capaian input atas penggunaan anggaran sebesar 100% dapat menunjukkan keberhasilan dalam melakukan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 95%. Penggunaan anggaran tersebut melekat pada kegiatan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai

indikator ini adalah **efisien** dengan nilai TE 0.2 karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan. Upaya efisiensi ini didukung dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala dengan melibatkan seluruh kelompok substansi yang berkaitan dengan indikator ini. Faktor pendukung lainnya adalah optimalisasi pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan cara sosialisasi/edukasi peraturan terkait kepada petugas dan peningkatan kompetensi petugas.

SK 2. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang

Tabel 3.3.12 Tingkat Efisiensi pada Sasaran Kegiatan 2.

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Target B3	Realisasi B3	Capaian B3	Capaian SK	RPD TW I	Realisasi Anggaran TW I	Capaian Anggaran	Capaian Anggaran per SK	IE per SK	TE per SK	Capaian TE per SK
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	11,11	11,11	100,00%	100,00%	299.999	-	0,0%	0%	#DIV/0!	Tidak Dapat Diukur	Tidak Dapat Diukur

Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai Sasaran Kegiatan 1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang hingga triwulan I tidak dapat diukur. Penjelasan tentang analisis efisiensi penggunaan anggaran disesuaikan dengan 1 indikator kinerja yang mengukur pencapaian sasaran, sebagai berikut:

IK 12. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Tabel 3.3.14 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Triwulan I Tahun 2025 IKU 12.

No	Indikator Kinerja	Capaian Output	Input			IE	TE	Capaian
			RPD TW I	Realisasi TW I	Capaian			
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00%	299999	0	00,00%	N/A	N/A	N/A

Tingkat Efisiensi indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan BBPOM di Palembang pada Triwulan I 2025 belum dapat dihitung karena belum ada realisasi RPD. Hal ini disebabkan adanya keterlambatan

pertanggungjawaban keuangan karena pelaksanaan pemeriksaan dilakukan diakhir bulan ketiga TW I. Pada triwulan berikutnya akan menjadi perhatian dalam menetapkan jadwal pemeriksaan agar tidak mengalami keterlambatan pertanggungjawaban keuangan.

SK 3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang

Tabel 3.3.15 Tingkat Efisiensi pada Sasaran Kegiatan 3.

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Target B3	Realisasi B3	Capaian B3	Capaian SK	RPD TW I	Realisasi Anggaran TW I	Capaian Anggaran	Capaian Anggaran per SK	IE per SK	TE per SK	Capaian TE per SK
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL	62	67,9	109,52%	109,52%	127.380.995	127.379.323	100,0%	100%	1,1	0,10	100 % (Efisien)

Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai Sasaran Kegiatan 3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang hingga triwulan I adalah 100% atau efisien. Penjelasan tentang analisis efisiensi penggunaan anggaran disesuaikan dengan 1 indikator kinerja yang mengukur pencapaian sasaran, sebagai berikut:

IK 13. Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL

Tabel 3.3.16 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Triwulan I Tahun 2025 IKU 13.

No	Indikator Kinerja	Capaian Output	Input			IE	TE	Capaian
			RPD TW I	Realisasi TW I	Capaian			
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL	109,52%	127380995	127379323	100,00%	1,1	0,1	100 % (Efisien)

Dengan tercapainya target SKL TW 1 sebesar 109,52% terhadap realisasi anggaran 100 % maka disimpulkan bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dapat dinyatakan efisien. Penggunaan sumber daya yang digunakan untuk mendukung pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai SKL yaitu adanya pemanfaatan ketersediaan media reagensia, suku cadang, baku pembanding, penunjang lab dan glassware untuk mendukung pengujian sampel laboratorium, uji verifikasi dan validasi metode

analisis guna penjaminan mutu hasil pengujian. Adanya efisiensi anggaran pada TW I tidak mempengaruhi kinerja terhadap pemenuhan laboratorium pengujian sesuai SKL.

SK 4. Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang

Tabel 3.3.17 Tingkat Efisiensi pada Sasaran Kegiatan 4.

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Target B3	Realisasi B3	Capaian B3	Capaian SK	RPD TW I	Realisasi Anggaran TW I	Capaian Anggaran	Capaian Anggaran per SK	IE per SK	TE per SK	Capaian TE per SK
4	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	89,09	96,66	108,50%	102,12%	507.133.995	507.133.300	100,0%	96%	1,1	0,06	100 % (Efisien)
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25	25	100,00%		4.096.000	3.624.802	88,5%				
		16	Jumlah desa pangan aman	25	25	100,00%		-	-	#DIV/0!				
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	25	25	100,00%		13.969.000	13.969.000	100,0%				

Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai Sasaran Kegiatan 4. Meningkatnya efektivitas KIEdi wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang hingga triwulan I adalah 100% atau efisien. Penjelasan tentang analisis efisiensi penggunaan anggaran disesuaikan dengan 4 indikator kinerja yang mengukur pencapaian sasaran, sebagai berikut:

IK 14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang

Tabel 3.3.18 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Triwulan I Tahun 2025 IKU 14.

No	Indikator Kinerja	Capaian Output	Input			IE	TE	Capaian
			RPD TW I	Realisasi TW I	Capaian			
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	108,50%	507133995	507133300	100,00%	1,1	0,1	100 % (Efisien)

Tingkat Efisiensi indikator kinerja tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang pada Triwulan I 2025 sebesar 100% dengan kriteria efisien. Realisasi anggaran sampai Triwulan I 2025 sebesar Rp 507.133.300 dengan perencanaan penggunaan anggaran sebesar Rp 507.133.995. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan penggunaan anggaran yang efisien karena realisasi sesuai dengan perencanaan. Kedepannya diperlukan perencanaan yang lebih baik lagi terkait jadwal pelaksanaan kegiatan KIE, terutama dengan koordinasi yang baik dengan tim ahli tokoh masyarakat.

IK 15. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Tabel 3.3.19 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Triwulan I Tahun 2025 IKU 15.

No	Indikator Kinerja	Capaian Output	Input			IE	TE	Capaian
			RPD TW I	Realisasi TW I	Capaian			
15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100,00%	4096000	3624802	88,50%	1,1	0,1	100 % (Efisien)

Capaian target indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dialokasikan anggaran sebesar Rp 4.096.000, pada triwulan I tahun 2025 terealisasi sebesar Rp 3.624.802,-. Capaian output sebesar 100,00% lebih tinggi dibandingkan capaian input atas penggunaan anggaran yang hanya sebesar 88,50%, hal ini dapat menunjukkan bahwa telah tercapainya keberhasilan dalam melakukan efisiensi penggunaan anggaran.

IK 16. Jumlah Desa Pangan Aman

Tabel 3.3.20 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Triwulan I Tahun 2025 IKU 16.

No	Indikator Kinerja	Capaian Output	Input			IE	TE	Capaian
			RPD TW I	Realisasi TW I	Capaian			
16	Jumlah desa pangan aman	100,00%	0	0	00,00%	-	-	- (Belum dapat ditentukan)

Tingkat Efisiensi indikator kinerja jumlah desa pangan aman BBPOM di Palembang pada Triwulan I 2025 belum dapat ditentukan. Hal ini disebabkan belum adanya realisasi anggaran sampai Triwulan I 2025 terkait indikator ini. Tahapan advokasi telah dilaksanakan bersamaan untuk tahapan advokasi indikator lain, yaitu indikator jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dan indikator jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas. Kegiatan advokasi keamanan pangan terpadu tersebut menggunakan anggaran di indikator jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sehingga lebih efektif dan efisien.

IK 17. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Tabel 3.3.21 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Triwulan I Tahun 2025 IKU 17.

No	Indikator Kinerja	Capaian Output	Input			IE	TE	Capaian
			RPD TW I	Realisasi TW I	Capaian			
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100,00%	13969000	13969000	100,00%	1,0	0,0	100 % (Efisien)

Tingkat Efisiensi indikator kinerja jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas BBPOM di Palembang pada Triwulan I 2025 sebesar 100% dengan kriteria efisien. Realisasi anggaran sampai Triwulan I 2025 sebesar Rp 13.969.000. Hal ini karena penggunaan anggaran telah sesuai dengan pencapaian kinerja. Pada periode berikutnya akan dilakukan pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan, serta mempertanggungjawaban penggunaan anggaran tepat waktu, agar capaian output dan input selalu selaras dengan tingkat efisiensi optimal.

SK 5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Tabel 3.3.22 Tingkat Efisiensi pada Sasaran Kegiatan 5.

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Target B3	Realisasi B3	Capaian B3	Capaian SK	RPD TW I	Realisasi Anggaran TW I	Capaian Anggaran	Capaian Anggaran per SK	IE per SK	TE per SK	Capaian TE per SK
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15	17,78	118,53%	118,53%	299.998	300.000	100,0%	100%	1,2	0,19	100 % (Efisien)

Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai Sasaran Kegiatan 5. Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu hingga triwulan I adalah 100% atau efisien. Penjelasan tentang analisis efisiensi penggunaan anggaran disesuaikan dengan 1 indikator kinerja yang mengukur pencapaian sasaran, sebagai berikut:

IK 18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Tabel 3.3.23 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Triwulan I Tahun 2025 IKU 18.

No	Indikator Kinerja	Capaian Output	Input			IE	TE	Capaian
			RPD TW I	Realisasi TW I	Capaian			
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	118,53%	299998	300000	100,00%	1,2	0,2	100 % (Efisien)

Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai indikator ini hingga triwulan I adalah 100% atau efisien. Penggunaan anggaran yang optimal mendukung pencapaian kinerja telah dijalankan. Pada periode berikutnya, pelaksanaan kegiatan akan sesuai dengan perencanaan, dilakukan monev realisasi anggaran, mempertanggungjawabkan laporan kegiatan sesuai dengan timeline keuangan, agar pencatatan realisasi anggaran selaras dengan capaian output.

SK 6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang

Tabel 3.3.24 Tingkat Efisiensi pada Sasaran Kegiatan 6.

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Target B3	Realisasi B3	Capaian B3	Capaian SK	RPD TW I	Realisasi Anggaran TW I	Capaian Anggaran	Capaian Anggaran per SK	IE per SK	TE per SK	Capaian TE per SK
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai Besar POM di Palembang	32	33,33	104,16%	104,16%	6.869.000	6.869.000	100,0%	100%	1,0	0,04	100 % (Efisien)

Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai Sasaran Kegiatan 6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang hingga triwulan I adalah 100% atau efisien. Penjelasan tentang analisis

efisiensi penggunaan anggaran disesuaikan dengan 1 indikator kinerja yang mengukur pencapaian sasaran, sebagai berikut:

IK 19. Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Tabel 3.3.25 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Triwulan I Tahun 2025 IKU 19

No.	Indikator Kinerja	Capaian Output	Input			IE	TE	Capaian
			RPD TW I	Realisasi TW I	Capaian			
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai Besar POM di Palembang	104,16%	6869000	6869000	100,00%	1,0	0,0	100 % (Efisien)

Untuk mendukung pencapaian target indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dialokasikan anggaran untuk triwulan 1 sebesar Rp 6.869.000,-, pada akhir triwulan I tahun 2025 terealisasi sebesar Rp 6.869.000. Capaian output sebesar 104.16% lebih tinggi dibandingkan capaian input atas penggunaan anggaran yang hanya sebesar 100.00% dapat menunjukkan keberhasilan dalam melakukan efisiensi penggunaan anggaran. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini adalah **efisien** dengan nilai IE 1,0 dan nilai TE 0.0 karena capaian *output* yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan. Pada periode berikutnya akan selalu diupayakan penggunaan anggaran sesuai dengan target pencapaian output, penyusunan rencana serta pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan selalu selaras, agar pengukuran efisiensi selalu optimal.

SK 7. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Palembang

Tabel 3.3.26 Tingkat Efisiensi pada Sasaran Kegiatan 7.

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Target B3	Realisasi B3	Capaian B3	Capaian SK	RPD TW I	Realisasi Anggaran TW I	Capaian Anggaran	Capaian Anggaran per SK	IE per SK	TE per SK	Capaian TE per SK
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Palembang	20	Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	12	50,0	416,67%	416,67%	2.454.000	2.454.000	100,0%	100%	4,2	3,17	75 % Tidak Efisen)

Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai Sasaran Kegiatan 7. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Palembang hingga triwulan I adalah 75% atau tidak efisien. Penjelasan tentang analisis efisiensi penggunaan anggaran disesuaikan dengan 1 indikator kinerja yang mengukur pencapaian sasaran, sebagai berikut:

IK 20. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

Tabel 3.3.27 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Triwulan I Tahun 2025 IKU 20.

No	Indikator Kinerja	Capaian Output	Input			IE	TE	Capaian
			RPD TW I	Realisasi TW I	Capaian			
20	Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	416,67%	2454000	2454000	100,00%	4,2	3,17	75% (Tidak Efisien)

Untuk mendukung pencapaian target indikator Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar dialokasikan anggaran untuk triwulan 1 sebesar Rp 2.454.000,-, pada akhir triwulan I tahun 2025 terealisasi sebesar Rp 2.454.000,-. Capaian output sebesar 416,67% lebih tinggi dibandingkan capaian input atas penggunaan anggaran yang hanya sebesar 100.00%. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini adalah **tidak efisien** dengan

nilai IE 4,2 dan nilai TE 3,17 karena capaian *output* yang dihasilkan jauh melebihi dari anggaran yang dikeluarkan. Hal ini dikarenakan kekeliruan penetapan target indikator. Upaya efisiensi yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya selain melakukan revisi target yang telah dilaksanakan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala dengan melibatkan seluruh kelompok substansi yang berkaitan dengan indikator ini. Faktor pendukung lainnya adalah optimalisasi pelaksanaan patroli siber, penjejakan digital, penyusunan analisa dan tindak lanjut rekomendasi dengan cara sosialisasi/edukasi peraturan, standar dan pedoman terkait kepada petugas dan peningkatan kompetensi petugas pelaksana kegiatan.

SK 8. Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang yang prima

Tabel 3.3.28 Tingkat Efisiensi pada Sasaran Kegiatan 8

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Target B3	Realisasi B3	Capaian B3	Capaian SK	RPD TW I	Realisasi Anggaran TW I	Capaian Anggaran	Capaian Anggaran per SK	IE per SK	TE per SK	Capaian TE per SK
8	Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palembang	0	0	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	1.500.000	1.500.000	100,0%	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun

Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai Sasaran Kegiatan 8. Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang yang prima hingga triwulan I tidak dapat diukur. Penjelasan tentang analisis efisiensi penggunaan anggaran disesuaikan dengan 1 indikator kinerja yang mengukur pencapaian sasaran, sebagai berikut:

IK 21. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palembang

Tabel 3.3.29 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Triwulan I Tahun 2025 IKU 21.

No	Indikator Kinerja	Capaian Output	Input			IE	TE	Capaian
			RPD TW I	Realisasi TW I	Capaian			
21	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palembang	Diukur Akhir Tahun	1500000	1500000	100,00%	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun

Tingkat Efisiensi indikator kinerja indeks pelayanan publik BBPOM di Palembang pada Triwulan I 2025 belum dapat ditentukan. Hal ini disebabkan hasil penilaian indikator indeks pelayanan publik baru akan keluar pada akhir tahun.

SK 9. Terwujudnya tata kelola pemerintah di lingkup Balai Besar POM di Palembang yang optimal

Tabel 3.3.30 Tingkat Efisiensi pada Sasaran Kegiatan 9

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Target B3	Realisasi B3	Capaian B3	Capaian SK	RPD TW I	Realisasi Anggaran TW I	Capaian Anggaran	Capaian Anggaran per SK	IE per SK	TE per SK	Capaian TE per SK
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah di lingkup Balai Besar POM di Palembang yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Palembang	0	0	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	665.480.748	665.480.539	100,0%	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir	Diukur Akhir Tahun
		23	Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang	0	0	Diukur Akhir	Diukur Akhir	665.480.748	665.480.539	100,0%	Diukur Akhir	Diukur Akhir	Diukur	Diukur Akhir
		24	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Palembang	0	0	Diukur Akhir	Diukur Akhir	665.480.748	665.480.539	100,0%	Diukur Akhir	Diukur Akhir	Diukur	Diukur Akhir
		25	Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Palembang	0	0	Diukur Akhir	Diukur Akhir	665.480.748	665.480.539	100,0%	Diukur Akhir	Diukur Akhir	Diukur	Diukur Akhir

Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai Sasaran Kegiatan 9. Terwujudnya tata Kelola pemerintah di Lingkup Balai Besar POM di Palembang yang optimal hingga triwulan I tidak dapat diukur. Penjelasan tentang analisis efisiensi penggunaan anggaran disesuaikan dengan 4 indikator kinerja yang mengukur pencapaian sasaran, sebagai berikut:

IK 22. Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Palembang

Tabel 3.3.31 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Triwulan I Tahun 2025 IKU 22.

No	Indikator Kinerja	Capaian Output	Input			IE	TE	Capaian
			RPD TW I	Realisasi TW I	Capaian			
22	Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Palembang	Diukur Akhir Tahun	665480748	665480539	100,00%	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun

Pemanfaatan sumber daya (anggaran) pada triwulan I belum dapat diukur karena capaian output indikator ini juga akan diukur pada akhir tahun. Namun untuk penggunaan anggaran pada triwulan berikutnya, akan disesuaikan dengan rencana penarikan dana yang telah dilakukan.

IK 23. Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang

Tabel 3.3.32 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Triwulan I Tahun 2025 IKU 23.

No	Indikator Kinerja	Capaian Output	Input			IE	TE	Capaian
			RPD TW I	Realisasi TW I	Capaian			
23	Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang	Diukur Akhir Tahun	665480748	665480539	100,00%	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun

Penggunaan anggaran pada triwulan ini, sudah sesuai dengan rencana penarikan dana. Namun demikian belum dapat menghitung Tingkat Efisiensi penggunaan sumber daya karena capaian

output pada indikator ini belum dapat dihitung karena proses penilaian belum dilakukan oleh Tim Inspektorat. Pada triwulan berikutnya, penggunaan anggaran akan dimaksimalkan sesuai dengan perencanaan.

IK 24. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Palembang

Tabel 3.3.33 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Triwulan I Tahun 2025 IKU 24

No	Indikator Kinerja	Capaian Output	Input			IE	TE	Capaian
			RPD TW I	Realisasi TW I	Capaian			
24	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Palembang	Diukur Akhir Tahun	665480748	665480539	100,00%	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun

Penggunaan anggaran pada triwulan ini sudah sesuai dengan rencana penarikan dana. Namun demikian, belum dapat dihitung tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan capaian indikator ini belum dapat dihitung pada triwulan I. Pada triwulan berikutnya, anggaran akan digunakan sesuai perencanaan.

IK 25. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Palembang

Tabel 3.3.34 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Triwulan I Tahun 2025 IKU 25.

No	Indikator Kinerja	Capaian Output	Input			IE	TE	Capaian
			RPD TW I	Realisasi TW I	Capaian			
25	Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Palembang	Diukur Akhir Tahun	665480748	665480539	100,00%	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun

Karena pengukuran nilai maturitas manajemen risiko dilakukan diakhir tahun maka nilai IE dan TE baru dapat dihitung diakhir tahun juga. Untuk realisasi rencana penarikan dana selama triwulan 1 tahun 2025 telah sesuai target.

BAB IV
PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Tahun 2025 merupakan tahun pertama periode Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029. Bahkan pada triwulan I 2025 ini dokumen Renstra masih berupa Rancangan Renstra 2025-2029. Penyusunan laporan ini telah mempertimbangkan tujuan dan sasaran kegiatan yang telah dicantumkan pada Rancangan Renstra tersebut. Tahun 2025, BBPOM di Palembang memiliki 23 (dua puluh tiga) program/kegiatan untuk mencapai 9 (sembilan) sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dan diukur dengan 25 (dua puluh lima) indikator kinerja sasaran kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Nilai Kinerja Organisasi pada triwulan I 2025 adalah sebesar **105,32%** dengan predikat **Istimewa.** Nilai ini didapatkan dari rata-rata pencapaian 25 indikator kinerja, yang terdiri dari 8 indikator yang memiliki capaian kinerja di atas 110% atau masuk dalam kategori "tidak dapat disimpulkan" sehingga perlu dilakukan normalisasi capaian yaitu sebesar 110%. Selain itu, 3 indikator kinerja dengan capaian kinerja di atas 100% atau masuk dalam kategori "sangat baik" dan 4 indikator lain yang memiliki capaian 100% sehingga masuk dalam kategori "baik". Sedangkan 9 indikator lainnya, terdiri dari 1 indikator dengan kategori cukup, 3 indikator yang belum dapat dihitung capaiannya karena cara dan formula perhitungan indikatornya masih dalam pembahasan bersama Unit Pengampu dan Biro Perencanaan dan Keuangan, serta 6 indikator lainnya yang tidak memiliki target pada triwulan I 2025 karena frekuensi penetapan targetnya dilakukan per tahun.

Capaian kinerja atas 25 indikator secara rinci, sebagai berikut :

1. Indikator kinerja "Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan" dengan capaian 113,49% masuk dalam kategori "tidak dapat disimpulkan" sehingga dilakukan normalisasi menjadi 110% untuk perhitungan NKO.
2. Indikator kinerja "Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO" belum dapat diukur pencapaiannya karena target ditetapkan pada akhir tahun.
3. Indikator kinerja "Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan" dengan capaian 117,22% masuk dalam kategori "tidak dapat disimpulkan" sehingga dilakukan normalisasi menjadi 110% untuk perhitungan NKO.
4. Indikator kinerja "Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar" belum dapat diukur pencapaiannya karena belum adanya sampel KLB yang

diuji Balai Besar POM di Palembang. Indikator ini tidak mempengaruhi penilaian kinerja organisasi pada triwulan ini.

5. Indikator kinerja “Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” dengan capaian 83,01% masuk dalam kategori “cukup”.
6. Indikator kinerja “Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder” dengan capaian 126,55% masuk dalam kategori “tidak dapat disimpulkan” sehingga dilakukan normalisasi menjadi 110% untuk perhitungan NKO.
7. Indikator kinerja “Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” dengan capaian 111,11% masuk dalam kategori “tidak dapat disimpulkan” sehingga dilakukan normalisasi menjadi 110% untuk perhitungan NKO.
8. Indikator kinerja “Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” belum dapat diukur pencapaiannya karena cara dan formula perhitunga masih dalam pembahasan Unit Pengampu dan Biro Perencanaan dan Keuangan. Indikator ini tidak mempengaruhi penilaian kinerja organisasi pada triwulan ini.
9. Indikator kinerja “Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” belum dapat diukur pencapaiannya karena cara dan formula perhitunga masih dalam pembahasan Unit Pengampu dan Biro Perencanaan dan Keuangan. Indikator ini tidak mempengaruhi penilaian kinerja organisasi pada triwulan ini.
10. Indikator kinerja “Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” dengan capaian 125% masuk dalam kategori “tidak dapat disimpulkan” sehingga dilakukan normalisasi menjadi 110% untuk perhitungan NKO.
11. Indikator kinerja “Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan” dengan capaian 123,77% masuk dalam kategori “tidak dapat disimpulkan” sehingga dilakukan normalisasi menjadi 110% untuk perhitungan NKO.
12. Indikator kinerja “Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” dengan capaian 100% masuk dalam kategori “baik”.
13. Indikator kinerja “Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL” dengan capaian 109,52% masuk dalam kategori “sangat baik”.

14. Indikator kinerja “Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang” dengan capaian 108,50% masuk dalam kategori “sangat baik”.
15. Indikator kinerja “Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan” dengan capaian 100% masuk dalam kategori “baik”.
16. Indikator kinerja “Jumlah desa pangan aman” dengan capaian 100% masuk dalam kategori “baik”.
17. Indikator kinerja “Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas” dengan capaian 100% masuk dalam kategori “baik”.
18. Indikator kinerja “Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan” dengan capaian 118,53% masuk dalam kategori “tidak dapat disimpulkan” sehingga dilakukan normalisasi menjadi 110% untuk perhitungan NKO.
19. Indikator kinerja “Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai Besar POM di Palembang” dengan capaian 104,16% masuk dalam kategori “sangat baik”.
20. Indikator kinerja “Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar” dengan capaian 416,67% masuk dalam kategori “tidak dapat disimpulkan” sehingga dilakukan normalisasi menjadi 110% untuk perhitungan NKO.
21. Indikator kinerja “Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palembang” belum dapat diukur pencapaiannya karena target ditetapkan pada akhir tahun.
22. Indikator kinerja “Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Palembang” belum dapat diukur pencapaiannya karena target ditetapkan pada akhir tahun.
23. Indikator kinerja “Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang” belum dapat diukur pencapaiannya karena target ditetapkan pada akhir tahun.
24. Indikator kinerja “Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Palembang” belum dapat diukur pencapaiannya karena target ditetapkan pada akhir tahun.
25. Indikator kinerja “Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Palembang” belum dapat diukur pencapaiannya karena target ditetapkan pada akhir tahun.

Pencapaian kinerja Balai Besar POM di Palembang hingga Triwulan I Tahun 2025 tidak terlepas dari peran serta dan tanggung jawab seluruh pegawai, serta dukungan masyarakat dan kolaborasi lintas sektor dalam pengawasan obat dan makanan di wilayah Sumatera Selatan. Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja pada setiap periode juga dapat menghasilkan penyesuaian strategi pada periode berikutnya. Sinergi antar pemangku

kepentingan juga menjadi faktor kunci dalam memastikan efektivitas pengawasan serta perlindungan terhadap masyarakat dari peredaran produk yang tidak memenuhi standar. Namun demikian, dalam proses pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, Balai Besar POM di Palembang masih menghadapi sejumlah kendala yang dapat memengaruhi efektivitas capaian kinerja. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis serta rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan guna mendorong peningkatan kinerja pada periode selanjutnya. Evaluasi yang komprehensif serta implementasi strategi yang tepat diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I Tahun 2025 turut dipengaruhi oleh ketentuan teknis yang masih dalam proses penyelarasan. Tercatat terdapat tiga indikator kinerja yang formula dan metode perhitungannya masih dalam pembahasan bersama Unit Pengampu dan Biro Perencanaan dan Keuangan. Dalam menghadapi dinamika tersebut, Balai Besar POM di Palembang dituntut untuk bersikap adaptif dan responsif. Koordinasi secara intensif dengan pihak terkait terus dilakukan guna memastikan informasi yang akurat dan diterima tepat waktu oleh Balai Besar POM di Palembang, termasuk dengan mengarahkan Ketua Tim untuk aktif berkoordinasi melalui media komunikasi internal yang tersedia.

Selain itu, diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 22 Januari 2025, telah berdampak pada pemblokiran anggaran sebesar Rp18.600.103.000, atau setara dengan 62,14% dari total pagu Balai Besar POM di Palembang. Hal ini menuntut adanya penyesuaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan ketersediaan anggaran yang tidak terblokir, yaitu sebesar Rp11.334.623.000.
Keterbatasan tersebut berdampak terhadap pencapaian target realisasi volume rincian output dari lima program/kegiatan yang belum dapat dilaksanakan secara optimal pada triwulan I 2025, yaitu:

- Pemeriksaan sampel makanan;
- Pemeriksaan sampel obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan sesuai standar;
- Pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan;
- Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi; dan
- Pemeriksaan sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan.

Sedangkan pada triwulan II 2025, dengan diberlakukannya kebijakan relaksasi pada akhir Maret 2025 terhadap pemanfaatan anggaran yang diblokir, Balai Besar POM di Palembang perlu menyesuaikan kembali rencana kegiatan dan rencana penarikan dana untuk triwulan berikutnya. Seluruh target yang belum tercapai pada Triwulan I perlu dialokasikan secara proporsional ke triwulan selanjutnya. Dalam konteks ini, ketepatan strategi pelaksanaan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia menjadi faktor penentu dalam menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan serta mencegah terjadinya lonjakan beban kerja di akhir tahun anggaran.

Terkait aspek sumber daya manusia, penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan kegiatan serta perkembangan teknologi yang semakin pesat menuntut adanya peningkatan kapasitas pegawai secara berkelanjutan. Balai Besar POM di Palembang mendukung penuh peningkatan kompetensi pegawai melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan, baik teknis maupun non-teknis. Dengan pembekalan pengetahuan dan keterampilan yang relevan, diharapkan seluruh pegawai dapat bekerja secara profesional, adaptif, serta mampu menjawab tantangan pengawasan obat dan makanan di masa mendatang.

Sinergi antar tim kerja dalam merealisasikan target indikator kinerja juga perlu terus diperkuat. Pada Triwulan I Tahun 2025, terdapat kendala dalam strategi pelaksanaan, di mana fungsi pemeriksaan melakukan pengambilan sampel menjelang akhir bulan. Kondisi ini mengakibatkan fungsi pengujian harus mempercepat proses pengujian apabila sampel yang masuk ke laboratorium ingin dihitung sebagai capaian pada bulan yang sama. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, telah disepakati bahwa pada periode berikutnya, pengambilan sampel akan dilakukan pada minggu-minggu awal setiap bulan. Dengan demikian, fungsi pengujian dapat menyelesaikan proses pengujian sesuai dengan *timeline* yang telah ditetapkan tanpa tekanan waktu yang berlebihan.

Selain faktor internal, pencapaian kinerja Balai Besar POM di Palembang juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap aspek keamanan produk yang beredar di pasaran. Keterbatasan pengetahuan ini dapat meningkatkan risiko konsumsi produk yang tidak memenuhi standar dan membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi krusial. Upaya ini dapat dilaksanakan melalui berbagai program yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, lintas sektor, serta pelaku usaha, guna memperkuat kesadaran kolektif terhadap

pentingnya pengawasan produk. Hal ini juga akan mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) oleh Balai Besar POM di Palembang.

BADAN POM

LAMPIRAN

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG
Jl. Pangeran Ratu Seberang Ulu I Jakabaring Palembang Sumatera Selatan
Telp. (0711) 510126, 510042, 510804 ; Fax. (0711) 510195
email : bpomplg@gmail.com ; bpomplg@yahoo.com ; bpom_palembang@pom.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

NOMOR HK.02.02.5A.09.24.229 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Reoublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);

8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG TAHUN 2025.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 September 2024
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BADAN POM DI PALEMBANG

YANI ARDIYANTI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

NOMOR HK.02.02.5A.09.24.229 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG TAHUN 2025

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	64,8
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	98,9
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	12
		Jumlah desa pangan aman	4
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	82
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	70

9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	83
		Nilai AKIP UPT BPOM	81,9
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	91
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,4

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

YANI ARDIYANTI

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI PALEMBANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: YANI ARDIYANTI
Jabatan	: Kepala Balai Besar POM di Palembang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 12 Februari 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Balai Besar POM di Palembang	Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI
YANI ARDIYANTI	TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI PALEMBANG

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87 Persen
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persen
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persen
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	79 Persen
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 Persen
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 Persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94.75 Persen
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	80.09 Persen
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	61 Persen
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	64.8 Nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89.09 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	12 Sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	4 Desa
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	81.7 Persen
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	74 Persen
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	efektif di wilayah kerja UPT		
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7 Indeks
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	85.9 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	81.04 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Skala
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 29,934,726,000 (Dua Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	17,640,819,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	12,293,907,000

Palembang, 12 Februari 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Balai Besar POM di Palembang	Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI
YANI ARDIYANTI	TARUNA IKRAR

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI PALEMBANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	658,613,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	46,450,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	219,683,400
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	73,227,800
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	73,227,800

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	65	65	65	70	73	75	77	77	78	78	79	79	9,122,000
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	13,683,000
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	13,683,000
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94.75	94.75	94.75	94.75	94.75	94.75	94.75	94.75	94.75	94.75	94.75	94.75	178,255,500
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	178,255,500
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang	80.09	80.09	80.09	80.09	80.09	80.09	80.09	80.09	80.09	80.09	80.09	80.09	9,122,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET											ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		diawasi sesuai ketentuan													
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		0	11.11	22.22	33.33	44.44	55.56	55.56	55.56	61	61	61	14,460,000
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			62			63			64			64.8	7,083,711,000
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			89.09	89.09	89.09	89.09	89.09	89.09	89.09	89.09	89	89.09	6,160,063,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		20	25	70	70	80	95	95	95	100	100	12	600,241,000
		03 - Jumlah desa pangan aman		20	25	50	70	70	90	90	90	100	100	4	639,446,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	20	25	25	70	90	100	100	100	100	100	1	148,358,000
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	0	10	15	30	40	50	50	60	75	80	81.7	81.7	63,824,000
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	30	31	32	35	37	43	49	50	60	62	71	74	350,547,000
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	4	8	12	16	20	25	29	33	37	41	45	90	173,193,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	wilayah kerja UPT														
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	159,653,000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												85.9	3,266,976,750
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												81.04	3,266,976,750
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	3,266,976,750
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3	3,266,976,750
														Total	29,934,726,000

Palembang, 16 April 2025

Kepala Balai Besar POM di Palembang

YANI ARDIYANTI

KERTAS KERJA PENGUKURAN REALISASI INDIKATOR KINERJA

TRIWULAN I 2025

IK.1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sampel Obat

Bulan	Jumlah sampel yang disampling	jumlah target sampel sampai dengan periode yang dimaksud	A1	Jumlah sampel yang sesuai Renlak per Kategori Sampel	jumlah target sampel sampai dengan periode yang dimaksud	A2	Jumlah sampel yang sesuai Renlak per Kelas Terapi	jumlah target sampel sampai dengan periode yang dimaksud	A3	A Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%)
Januari	6,00	6,00	100,00	6,00	6,00	100,00	6,00	6,00	100,00	30,00
Februari	8,00	8,00	100,00	8,00	8,00	100,00	8,00	8,00	100,00	30,00
Maret	15,00	15,00	100,00	15,00	15,00	100,00	15,00	15,00	100,00	30,00

Bulan	Jumlah sampel yang sesuai Renlak waktu	jumlah target sampel sampai dengan periode yang dimaksud	B1	Jumlah sampel yang dilakukan evaluasi penandaan sesuai ketentuan	jumlah target sampel untuk dievaluasi penandaan sampai dengan periode yang dimaksud	B2	B Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %)
Januari	6,00	6,00	100,00	6,00	6,00	100,00	20,00
Februari	8,00	8,00	100,00	8,00	8,00	100,00	20,00
Maret	15,00	15,00	100,00	15,00	15,00	100,00	20,00

Bulan	Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan	jumlah sampel yang diuji sampai dengan periode yang dimaksud	C1	C Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%)
Januari	0,00	0,00	0,00	0,00
Februari	21,00	28,00	75,00	15,00
Maret	28,00	31,00	90,32	18,06

Bulan	Jumlah sampel dengan kesimpulan sesuai ketentuan pedoman sampling	jumlah sampel yang dilaporkan sampai dengan periode yang dimaksud	D1	Jumlah sampel yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling	jumlah sampel yang dilaporkan sampai dengan periode yang dimaksud	D2	D Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)
Januari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Februari	6,00	6,00	100,00	6,00	6,00	100,00	20,00
Maret	15,00	15,00	100,00	15,00	15,00	100,00	20,00

Bulan	jumlah laporan monitoring penarikan yang dilaporkan sesuai ketentuan sampai dengan pedoman sampling sampai dengan periode yang dimaksud	jumlah laporan yang harus dilaporkan sampai dengan periode yang dimaksud	E1	E Kesesuaian Pelaporan Montoring Penarikan (Bobot:10%)	% Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Januari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Februari	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44
Maret	1,00	1,00	100,00	10,00	98,06

Sampel OBA

Bulan	Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT	Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Tanggapan atas surat tindak lanjut	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Januari	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Februari	1,00	1,00	100,00	95,83
Maret	1,00	1,00	100,00	100,00

Sampel SK

Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling	Target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan rentak UPT	A1	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling	Jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya	A2	% Pemenuhan Target Pengawasan
Januari	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	1,00	0,00	#DIV/0!
Februari	0,00	0,00	#DIV/0!	2,00	2,00	100,00	#DIV/0!
Maret	1,00	1,00	100,00	3,00	3,00	100,00	100,00

Bulan	Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji	Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan parameter uji	Jumlah seluruh sampel yang diuji	Kesesuaian parameter uji
Januari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Februari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maret	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00

Nama Indikator	Bulan	Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai	Target sampel yang diperiksa dan diuji	Akurasi dalam penentuan kesimpulan	Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT	Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Tanggapan atas surat tindak lanjut	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	0,00	0,00	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	0,00	0,00	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	1,00	1,00	100,00			#DIV/0!	100,00

Sampel Kosmetik

Bulan	Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT	Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang	Tanggapan atas surat tindak lanjut	% Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti
Januari			#DIV/0!	98,75
Februari			#DIV/0!	95,03
Maret	1,00	1,00	100,00	96,88

Total

Bulan	Target Sampel Sediaan Farmasi	Target Indikator (%)	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (Bobot 60%)	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi (%)
Januari							0,00
Februari	45,00	87,00	94,44	95,83	100,00	95,03	96,33
Maret	59,00	87,00	98,06	100,00	100,00	96,88	98,74

IK.3 Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kesesuaian Target Sampel

Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling	target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak	A1 (%)	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling	jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya	A2 (%)	Kesesuaian Target Sampel (%)
Januari	15,00	16,00	93,75	0,00	20,00	0,00	46,88
Februari	20,00	21,00	95,24	34,00	34,00	100,00	97,62
Maret	27,00	28,00	96,43	41,00	41,00	100,00	98,21

Kesesuaian Parameter Uji

Bulan	Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling	jumlah sampel yang diuji	Kesesuaian Parameter Uji (%)
Januari	0,00	0,00	#DIV/0!
Februari	21,00	21,00	100,00
Maret	28,00	28,00	100,00

Ketepatan Pengambilan Keputusan

Bulan	Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling	jumlah sampel yang diperiksa dan diuji	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (%)
Januari	0,00	0,00	#DIV/0!
Februari	10,00	10,00	100,00
Maret	28,00	28,00	100,00

Ketepatan Waktu Pengambilan

Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak	jumlah sampel yang diperiksa	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (%)
Januari	16,00	16,00	100,00
Februari	21,00	21,00	100,00
Maret	28,00	28,00	100,00

Ketepatan Waktu Pelaporan

Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling	jumlah sampel yang diperiksa dan diuji	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (%)
Januari	0,00	0,00	#DIV/0!
Februari	10,00	10,00	100,00
Maret	28,00	28,00	100,00

Tindak Lanjut

Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling	jumlah sampel yang diperiksa dan diuji	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (%)
Januari	0,00	0,00	#DIV/0!
Februari	10,00	10,00	100,00
Maret	28,00	28,00	100,00

Total

Bulan	Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Kelepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Kelepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Kelepatan Waktu Pelaporan Sampling dan	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/	Realisasi (%)
Januari	16,00	85,00	46,88	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	21,00	85,00	97,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,52
Maret	28,00	85,00	98,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,64

IK. 5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pemenuhan Target Sampel

Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling* *Termasuk sampel TE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian	Target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan Renlak UPT	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling** **Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit). untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian dilakukan oleh Balai Pengujl	Jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya	% Pemenuhan Target Sampel PIRT
Januari	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Februari	2,00	2,00	7,00	7,00	100,00
Maret	2,00	2,00	7,00	7,00	100,00

Kesesuaian Parameter Uji

Bulan	Jumlah sampel sesuai	Total Sampel PIRT	% Kesesuaian Parameter Uji
Januari	0,00	0,00	#DIV/0!
Februari	0,00	2,00	0,00
Maret	0,00	2,00	0,00

Kesesuaian Pengambilan Kesimpulan

Bulan	Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling	Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji	% Ketepatan pengambilan kesimpulan
Januari	0,00	0,00	#DIV/0!
Februari	0,00	2,00	0,00
Maret	2,00	2,00	100,00

Ketepatan Waktu Sampling

Bulan	Jumlah sampel diambil	Total Sampel PIRT	% Ketepatan waktu pengambilan sampel
Januari	0,00	36,00	0,00
Februari	2,00	36,00	5,56
Maret	2,00	36,00	5,56

Ketepatan Waktu Pelaporan

Bulan	Jumlah sampel diambil	Total Sampel PIRT	% Ketepatan waktu pengambilan sampel
Januari	0,00	36,00	0,00
Februari	2,00	36,00	5,56
Maret	2,00	36,00	5,56

Tindak Lanjut

Bulan	Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti	Total jumlah sampel yang TMS	% Tindak lanjut sampel PIRT
Januari	0,00	0,00	#DIV/0!
Februari	0,00	0,00	100,00
Maret	0,00	0,00	100,00

Total

Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan Target Sampel PIRT (Bobot 20%)	% Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	% Ketepatan pengambilan kesimpulan (Bobot 20%)	% Ketepatan waktu pengambilan sampel (Bobot 10%)	% Ketepatan waktu pelaporan (Bobot 10%)	% Tindak lanjut sampel PIRT (Bobot 20%)	Realisasi (%)
Januari		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	85,00	100,00	0,00	0,00	5,56	0,00	100,00	40,56
Maret	85,00	100,00	0,00	100,00	5,56	100,00	100,00	70,56

IK. 6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Tindak Lanjut oeh Pelaku Usaha

Bulan	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha
Januari	4,00	5,00	80,00
Februari	6,00	10,00	60,00
Maret	20,00	31,00	64,52

Tindak Lanjut oleh Lintas Sektor

Bulan	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
Januari	0,00	0,00	0,00
Februari	2,00	2,00	100,00
Maret	6,00	6,00	100,00

Total

Bulan	Target Indikator (%)	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi (%)
Januari		80,00	0,00	80,00
Februari		60,00	100,00	80,00
Maret		64,52	100,00	82,26

IK. 7. Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana Produksi OBA

Bulan	Jumlah realisasi	Jumlah target	% Pelaksanaan	Jumlah sarana	Jumlah seluruh	% Kualitas	Jumlah kesimpulan	Jumlah sarana	% Akurasi dalam	Jumlah tindaklanjut	Jumlah seluruh	% Kesesuaian dan	% Sarprod OBA
Januari	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	100,00
Maret	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	100,00

Bulan	Target	% Sarprod Obat	% Sarprod OBA	% Sarprod SK	% Sarprod Kosmetik	% Sarprod SF
Januari	90,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	90,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00
Maret	90,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00

IK. 10 Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Target Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai Renlak	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 20%)	Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Ketepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%)	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 10%)	% Sardis PD
Januari	4	4	4	20,00	4	4	70,00	4	4	10,00	100,00
Februari	12	12	12	20,00	12	12	70,00	12	12	10,00	100,00
Maret	22	22	22	20,00	22	22	70,00	22	22	10,00	100,00

IK. 11 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Iklan Obat

Bulan	Target	Jumlah iklan yang selesai diawasi	Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak	% Pemenuhan jumlah target pengawasan	Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak	% Ketepatan waktu pelaporan	% Iklan Obat
Januari	10	10	10	100.00	10	10	100.00	100.00
Februari	20	20	20	100.00	20	20	100.00	100.00
Maret	30	30	30	100.00	30	30	100.00	100.00

Iklan Kosmetik

Bulan	Target	Capaian jumlah iklan media cetak	Jumlah target media cetak	% Capaian media cetak	Capaian jumlah iklan media luar ruang	Jumlah target media luar ruang	% Capaian media luar ruang	Capaian jumlah iklan media online	Jumlah target media online	% Capaian media online
Januari	18	2	2	100.00	1	1	100.00	11	11	100.00
Februari	42	4	4	100.00	4	4	100.00	25	25	100.00
Maret	66	6	6	100.00	7	7	100.00	39	39	100.00

Bulan	Capaian jumlah iklan media elektronik	Jumlah target media elektronik	% Capaian media elektronik	% Capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target	Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu	Jumlah iklan yang dievaluasi	% Capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT	Jumlah iklan yang diaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu	Jumlah iklan yang dievaluasi	% Capaian pelaporan ke Operator Pusat	% Ketepatan Waktu Pelaporan	% Iklan Kos
Januari	4	4	100.00	100.00	18	18	100.00	18	18	100.00	100.00	100.00
Februari	9	9	100.00	100.00	42	42	100.00	42	42	100.00	100.00	100.00
Maret	14	14	100.00	100.00	66	66	100.00	66	66	100.00	100.00	100.00

Iklan OBA

Bulan	Target	Jumlah iklan yang selesai diawasi	Jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak	% Pemenuhan target pengawasan	Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah iklan yang selesai diawasi	% Ketepatan waktu pelaporan	Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai	Jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan	% Akurasi pengambilan keputusan	% Iklan OBA
Januari	6	6	6	100.00	6	6	100.00	6	6	100.00	100.00
Februari	14	14	14	100.00	14	14	100.00	14	14	100.00	100.00
Maret	22	22	22	100.00	22	22	100.00	22	22	100.00	100.00

Iklan Suplemen Kesehatan dan Kuasi

Bulan	Target	Jumlah iklan yang selesai diawasi	Jumlah target iklan yang diawasi sd periode pelaporan	% Pemenuhan target pengawasan	Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah iklan yang selesai diawasi sd periode pelaporan	% Ketepatan waktu pelaporan	Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai	jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan	% Akurasi pengambilan keputusan	% Iklan Suplemen Kesehatan
Januari	3	3	3	100.00	3	3	100.00	3	3	100.00	100.00
Februari	8	8	8	100.00	8	8	100.00	8	8	100.00	100.00
Maret	13	13	13	100.00	13	13	100.00	13	13	100.00	100.00

Iklan Pangan Olahan

Bulan	Target	Jumlah Iklan yang diawasi	Realisasi	Nilai Pemenuhan Target Iklan	Jumlah iklan yang diawasi (Media Cetak 12,5%)	Proporsi Realisasi Media Cetak	Realisasi Media Cetak
r Januari	24	24	1	40.00	0	0.00%	0
r Februari	48	48	1	40.00	3	6.25%	1
r Maret	75	75	1	40.00	6	8.00%	1

Bulan	Jumlah iklan yang diawasi (Media Online 37,5%)	Proporsi Realisasi Media Online	Realisasi Media Online	Jumlah iklan yang diawasi (Media Penyiaran 25%)	Proporsi Realisasi Media Penyiaran	Realisasi Media Penyiaran	Jumlah iklan yang diawasi (Media Luar Ruang 25%)	Proporsi Realisasi Media Luar Ruang	Realisasi Media Luar Ruang	Kesesuaian Proporsi Media Iklan	Jumlah Iklan Tepat Waktu	Ketepatan Waktu Pelaporan Iklan	% Iklan PO
Januari	20	83.33%	1.00	2	8.33%	0.33	2	8.33%	0.33	20.00	24	40.00	100.00 -
Februari	29	60.42%	1.00	8	16.67%	0.67	8	16.67%	0.67	14.17	48	40.00	94.17 -
Maret	41	54.67%	1.00	14	18.67%	0.75	14	18.67%	0.75	15.67	75	40.00	95.67 -

IK. 12 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT	% Cakupan Sarprod Fortif
Januari	0	0	18	0,00
Februari	0	0	18	0,00
Maret	2	2	18	11,11

IK. 13 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL

Sesuai Surat B-PR.10.01.10.03.25.140 tanggal 26 Maret 2025 Hal Penyampaian Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar/Balai POM Tingkat 3 dan Tingkat 4 TW 1 Tahun 2025

No.	Balai Besar/Balai POM	Target Nilai SKL Tahun 2025 (%)	Nilai Pemenuhan (%)				Nilai Pemenuhan SKL TW 1 (%)	Target Nilai SKL TW 1 (%)	Target Nilai SKL TW 1 (%) - Efisiensi Anggaaran	Pemenuhan thd Target TW 1 (%)	Pemenuhan thd Target TW 1 -Efisiensi Anggaran (%)
			SRL	Standar Peralatan	Standar Kompetensi Laboratorium	Standar Metode Terverifikasi					
1	BBPOM di Banda Aceh	73	83.3	80.3	50	44.4	72.2	71		101.6	
2	BBPOM di Padang	77	83.4	87.0	100	21.3	81.2	76.7		105.9	
3	Balai POM di Batam	67.3	82.1	81.3	30	26.3	65.9	64		103	
4	Balai POM di Bengkulu	71.1	79.0	91.8	70	20.5	73.9	70		105.6	
5	BBPOM di Bandar Lampung	77.2	78.8	76.9	80	44.1	75.2	75		100.2	
6	BBPOM di Palembang	64.8	78.2	81.0	50	26.4	67.9	62		109.6	

IK.14 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang

Sesuai perhitungan dari Unit Pengampu pada Link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1shYofad2TXywpsML9C5JVu9gY0f2p-WM77-Q9_V7APg/edit?gid=676094837#gid=676094837

BPOM KIE				INDEKS			
UNIT PELAKSANA TEKNIS	Tatap Muka	Media	Total Responden	INDEKS TATAP MUKA	INDEKS MEDIA	INDEKS KIE	KATEGORI INDEKS
	3624	2290	5,914	88.53	88.73	88.63	Efektif
BBPOM Palembang	125	25	150	95.03	98.29	96.66	Sangat Efektif

IK 15. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Persentase Tahapan

Bulan	Target	Advokasi Lintas	Sosialisasi Keamanan	Bimbingan Teknis	Monitoring dan Sertifikasi	Pengawalan	Realisasi	Total Jumlah Sekolah
Januari	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Februari	20	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
Maret	25	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	

IK. 16 Jumlah desa pangan aman

Persentase Tahapan

Bulan	Target	Advokasi	Pelatihan kader	Bimtek komunitas	Monev	Pengawalan	Realisasi
Januari							0,00
Februari	20	20,00				0,00	20,00
Maret	25	25,00	0,00			0,00	25,00

IK 17. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Persentase Tahapan

Bulan	Target	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	Pengawalan	Realisasi
Januari	0						0,00
Februari	20	20,00					20,00
Maret	25	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

IK 18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Bulan	Target	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi
	0				
Januari		0.00	0.00	0.00	
Februari	10	10.00	10.00	10.00	10.00
Maret	15	33.33	10.00	10.00	17.78

IK.19 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai Besar POM di Palembang

Bulan	Target Perkara Tahun Berjalan	Target Perkara Carry Over	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (SPDP)	Realisasi Perkara Carry Over (SPDP)	Nilai Realisasi SPDP	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap I)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap I)	Nilai Realisasi Tahap I	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (P21)	Realisasi Perkara Carry Over (P21)	Nilai Realisasi P21	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap II)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap II)	Nilai Realisasi Tahap II	% Keberhasilan Perkara
Januari	3	9	0	5	0,75	0	1	0,55	0	3	2,55	0	0	0	32,08
Februari	3	9	0	5	0,75	0	1	0,55	0	2	1,7	0	1	1	33,33
Maret	3	9	0	5	0,75	0	1	0,55	0	2	1,7	0	1	1	33,33

IK 20. Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar

1. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (bobot 50%)

No.	Nama UPT	Fungsi																				Nilai											
		Patroli Siber												Profiling																					
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Balai Besar POM di Palembang	T	T	T										T	T	T										100,00%	100,00%	100,00%	75,00%	60,00%	50,00%	42,86%	37,50%	33,33%	30,00%	27,27%	25,00%

Keterangan:
Kolom C-Z diisikan dengan kode sebagai berikut pada setiap bulannya:
T Tepat Waktu
L Lewat Waktu

No	Konversi sesuai bobot Nilai Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (bobot 50%)	Konversi sesuai bobot Nilai Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan	Konversi sesuai bobot Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (bobot 25%)	Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar sd Maret 2025
1	50,00%	#VALUE!	#VALUE!	50,00%

PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI

Pengukuran Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Target B3	Realisasi B3	Capaian B3	Capaian SK	RPD TW I	Realisasi Anggaran TW I	Capaian Anggaran	Capaian Anggaran per SK
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	98,74	113,49%	114,31%	100.275.000	100.274.764	100,0%	77%
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	0	Diukur Akhir Tahun		-	-	0,0%	
		3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	99,64	117,22%		4.398.000	2.198.832	50,0%	
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	0	Belum Dapat Diukur		1.466.000	732.944	50,0%	
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	70,56	83,01%		1.466.000	732.944	50,0%	
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	65	82,26	126,55%		529.000	529.000	100,0%	
		7	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	100	111,11%		793.500	793.500	100,0%	
		8	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90		Belum Dapat Diukur		793.500	793.500	100,0%	
		9	Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,75		Belum Dapat Diukur		3.787.999,5	3.788.100	100,0%	
		10	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	100	125,00%		3.787.999,5	3.788.100	100,0%	
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	80,09	99,13	123,77%		529.000	529.000	100,0%	

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Target B3	Realisasi B3	Capaian B3	Capaian SK	RPD TW I	Realisasi Anggaran TW I	Capaian Anggaran	Capaian Anggaran per SK
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	11,11	11,11	100,00%	100,00%	299.999	-	0,0%	0%
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL	62	67,9	109,52%	109,52%	127.380.995	127.379.323	100,0%	100%
4	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	89,09	96,66	108,50%	102,12%	507.133.995	507.133.300	100,0%	96%
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25	25	100,00%		4.096.000	3.624.802	88,5%	
		16	Jumlah desa pangan aman	25	25	100,00%		-	-	#DIV/0!	
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	25	25	100,00%		13.969.000	13.969.000	100,0%	
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15	17,78	118,53%	118,53%	299.998	300.000	100,0%	100%

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Target B3	Realisasi B3	Capaian B3	Capaian SK	RPD TW I	Realisasi Anggaran TW I	Capaian Anggaran	Capaian Anggaran per SK
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai Besar POM di Palembang	32	33,33	104,16%	104,16%	6.869.000	6.869.000	100,0%	100%
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Palembang	20	Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	12	50,0	416,67%	416,67%	2.454.000	2.454.000	100,0%	100%
8	Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palembang	0	0	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	1.500.000	1.500.000	100,0%	Diukur Akhir Tahun
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah di lingkup Balai Besar POM di Palembang yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Palembang	0	0	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	665.480.748	665.480.539	100,0%	Diukur Akhir Tahun
		23	Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang	0	0	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	665.480.748	665.480.539	100,0%	Diukur Akhir Tahun
		24	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Palembang	0	0	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	665.480.748	665.480.539	100,0%	Diukur Akhir Tahun
		25	Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Palembang	0	0	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	665.480.748	665.480.539	100,0%	Diukur Akhir Tahun

Pengukuran Capaian Tingkat Efisiensi per Sasaran Kegiatan hinggan Indikator Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Capaian B3	Capaian SK	Capaian Anggaran	Capaian Anggaran per SK	IE per IK	TE per IK	Capaian TE per IK	IE per SK	TE per SK	Capaian TE per SK
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	113,49%	114,31%	100,0%	77%	1,1	0,13	100 % (Efisien)	1,5	0,48	92 % (Efisien)
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Diukur Akhir Tahun		0,0%		Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun			
		3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	117,22%		50,0%		2,3	1,34	84 % Tidak Efisen)			
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Belum Dapat Diukur		50,0%		Belum Dapat Diukur	Belum Dapat Diukur	Belum Dapat Diukur			
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83,01%		50,0%		1,7	0,66	90 % (Efisien)			
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	126,55%		100,0%		1,3	0,27	95 % (Efisien)			
		7	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	111,11%		100,0%		1,1	0,11	100 % (Efisien)			
		8	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Belum Dapat Diukur		100,0%		Belum Dapat Diukur	Belum Dapat Diukur	Belum Dapat Diukur			
		9	Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Belum Dapat Diukur		100,0%		Belum Dapat Diukur	Belum Dapat Diukur	Belum Dapat Diukur			
		10	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	125,00%		100,0%		1,2	0,25	95 % (Efisien)			
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	123,77%		100,0%		1,2	0,24	95 % (Efisien)			

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Capaian B3	Capaian SK	Capaian Anggaran	Capaian Anggaran per SK	IE per IK	TE per IK	Capaian TE per IK	IE per SK	TE per SK	Capaian TE per SK
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00%	100,00%	0,0%	0%	Tidak Dapat Diukur	Tidak Dapat Diukur	Tidak Dapat Diukur	#DIV/0!	Tidak Dapat Diukur	Tidak Dapat Diukur
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL	109,52%	109,52%	100,0%	100%	1,1	0,10	100 % (Efisien)	1,1	0,10	100 % (Efisien)
4	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	108,50%	102,12%	100,0%	96%	1,1	0,08	100 % (Efisien)	1,1	0,06	100 % (Efisien)
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100,00%		88,5%		1,1	0,13	100 % (Efisien)			
		16	Jumlah desa pangan aman	100,00%		#DIV/0!		Tidak Dapat Diukur	Tidak Dapat Diukur	Tidak Dapat Diukur			
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100,00%		100,0%		1,0	0,00	100 % (Efisien)			
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	118,53%	118,53%	100,0%	100%	1,2	0,19	100 % (Efisien)	1,2	0,19	100 % (Efisien)

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Capaian B3	Capaian SK	Capaian Anggaran	Capaian Anggaran per SK	IE per IK	TE per IK	Capaian TE per IK	IE per SK	TE per SK	Capaian TE per SK
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai Besar POM di Palembang	104,16%	104,16%	100,0%	100%	1,0	0,04	100 % (Efisien)	1,0	0,04	100 % (Efisien)
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Palembang	20	Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	416,67%	416,67%	100,0%	100%	4,2	3,17	75 % Tidak Efisen)	4,2	3,17	75 % Tidak Efisen)
8	Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palembang	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	100,0%	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah di lingkup Balai Besar POM di Palembang yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Palembang	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	100,0%	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun
		23	Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	100,0%	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun
		24	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Palembang	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	100,0%	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun
		25	Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Palembang	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	100,0%	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun	Diukur Akhir Tahun

HISTORY PERUBAHAN LAPORAN KINERJA INTERIM

TRIWULAN I TAHUN 2025

Balai Besar POM di Palembang

Tabel 1. Ringkasan Perubahan Dokumen

Versi	Tanggal Perubahan	Uraian Perubahan	Bagian yang Diubah	Pengaruh Terhadap NKO	Keterangan
1.0	29 April 2025	Laporan awal disahkan			
1.1	30 April 2025	Koreksi perhitungan NKO	Ringkasan Eksekutif, Kata Pengantar, Bab III. Akuntabilitas Kinerja, Bab IV. Penutup	Nilai Kinerja Organisasi berubah dari **106,58%** menjadi **106,43%** (kategori tetap "Istimewa")	Perubahan diperlukan untuk mencerminkan data aktual
1.2	3 Juni 2025	Koreksi realisasi atas 4 indikator kinerja (IK 1, IK 3, IK 5, dan IK 20) berdasarkan hasil verifikasi ulang	Bab III. Akuntabilitas Kinerja, Lampiran 4 (Kertas Kerja), Lampiran 5 (Pengukuran Efisiensi Kinerja)	Nilai Kinerja Organisasi berubah dari **106,43%** menjadi **106,80%** (kategori tetap "Istimewa")	Perubahan diperlukan untuk mencerminkan data aktual
		Perbaikan struktur daftar isi agar sesuai dengan isi terbaru	Daftar Isi		Penyesuaian format dokumen
		Penyesuaian narasi dan NKO	Ringkasan Eksekutif, Kata Pengantar, Penutup		Konsistensi isi laporan
1.3	19 Agustus 2025	Koreksi realisasi atas 2 indikator kinerja (IK 3, IK 5) berdasarkan hasil verifikasi ulang	Bab III. Akuntabilitas Kinerja, Lampiran 4 (Kertas Kerja), Lampiran 5 (Pengukuran Efisiensi Kinerja)	Nilai Kinerja Organisasi berubah dari **106,80%** menjadi **105,32%** (kategori tetap "Istimewa")	Perubahan diperlukan untuk mencerminkan data aktual
		Perbaikan struktur daftar isi agar sesuai dengan isi terbaru	Daftar Isi		Penyesuaian format dokumen
		Penyesuaian narasi dan NKO	Ringkasan Eksekutif, Kata Pengantar, Penutup		Konsistensi isi laporan

Tabel 2. Rincian Perubahan Realisasi Indikator Kinerja

	Indikator	Bulan	Realisasi versi 1.1 ***(Semula)***	Realisasi (***Menjadi)***
IK 1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**B2**	96,79	96,33
		B3	99,04	98,74
IK 3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**B2**	89,05	82,87
IK 5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**B2**	40,56	30,56
IK 20	Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	**B1**	4,17	50
		B2	8,33	50
		B3	12,5	50

	Indikator	Bulan	Realisasi versi 1.2 ***(Semula)***	Realisasi (***Menjadi)***
IK 3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**B2**	82,87	99,52
IK 5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**B2**	30,56	40,56
		B3	90,56	70,56

Catatan :

Perubahan ini telah diverifikasi oleh Tim SAKIP dan disahkan oleh Kepala Balai Besar POM di Palembang. Seluruh penyesuaian telah diperbarui dalam laporan berlaku mulai tanggal 19 Agustus 2025.